



PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, serta Perjanjian Kinerja Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menginformasikan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sepanjang Tahun 2024. Laporan ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menciptakan transparansi informasi guna mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Kami berharap LKjIP ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama Tahun 2024, sekaligus menjadi parameter keberhasilan pembangunan serta peningkatan kepercayaan publik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan partisipasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama Tahun 2024, termasuk dalam penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lebih sejahtera dan unggul.

Kandangan, Januari 2025

Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan



Endri, AP., M.AP

## **2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebagai manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian kinerja dilanjutkan dengan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, sehingga dapat terukur dan diketahui tingkat capaian kinerja pembangunan melalui pelaksanaan program dan realisasi anggaran dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Melalui perjanjian kinerja mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Selanjutnya pada Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya, Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pendukung yang harus diorganisir.

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Permen PAN-RB No. PER/09/M.PAN/5/2007 melalui Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, IKU dijadikan dasar sebagai

Perjanjian Kinerja Bupati setiap tahun selama RPD Tahun 2024 – 2026 masih berlaku. Berikut disampaikan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah :

#### **2.3.1.1 Perjanjian Kinerja**

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya dari 2024 sampai dengan 2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 telah disusun dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Hermansyah, MM. pada bulan Januari 2024.

Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 pada tahun ke-1 (satu) sebagai Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 mengacu Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang meliputi Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang dilaporkan pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) tujuan, 5 (lima) sasaran yang didukung oleh 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran, 109 program sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1.1.1

## Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM
	1		2		3	4	5	6
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomiyang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan	1	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.5	Perencanaan dan Pembangunan Industri
								Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
								Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
								Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
								Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
								Pengembangan Ekspor
								Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
								Program Promosi Penanaman Modal
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
								Program Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal
				2	PDRB Sektor Unggulan	%	6.4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
								Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
								Program Perizinan Usaha Pertanian
								Program Penyuluhan Pertanian
								Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
								Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
								Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				3	Indeks Daya Saing Pariwisata	%	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
								Program Pemasaran Pariwisata
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	85.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM
								Program Penataan Bangunan Gedung
								Program Penyelenggaraan Jalan
								Program Pengembangan Jasa Konstruksi
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
								Program Pengembangan Perumahan
								Program Kawasan Pemukiman
								Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh
								Program Peningkatan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum (PSU)
								Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
								Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
								Program Pengelolaan Tanah Kosong
				5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	71.49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
								Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM
								Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
								Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
								Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
								Program Pengelolaan Persampahan
								Program Penanggulangan Bencana
		2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan	6	Indeks Risiko Bencana	Skor	135	Program Penanganan Bencana
				7	Persentase Penduduk Miskin	%	3.96	Program Pemberdayaan Sosial
				8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.1	Penempatan Tenaga Kerja
				9	Gini Rasio	Rasio	0.257	Hubungan Industrial
								Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
								Program Rehabilitasi Sosial
				10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.75	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
								Penataan Desa
								Peningkatan Kerjasama Desa
								Administrasi Pemerintah Desa

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM
								Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	3	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan. Kesehatan. Komoditas Pangan Dan Non Pangan	11	Indeks Pembangunan Manusia	%	70.26	Program Pengelola Pendidikan
				12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.6	
				13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.82	
				14	Umur Harapan Hidup	Tahun	66.72	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM
								Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
								Program Perlindungan Perempuan
								Program Perlindungan Khusus Anak
				15	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/Orang/Hari	13.413	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				16	Indeks Literasi	Indeks	38.95	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
								Program Pembinaan Perpustakaan
								Program Pengelolaan Arsip
								Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		4	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat Yang Berkarakter Dan Berbudaya	17	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Indeks	0.7	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
								Program pencegahan. penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
								Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
								Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM
								Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
								Program Pengembangan Kebudayaan
				18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56.75	Program Pembinaan Sejarah
								Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
								Program Pengelolaan Permuseuman
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa	19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.2	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
								Program Pelayanan Penanaman Modal
								Program Pendaftaran Penduduk
								Program Pencatatan Sipil
				20	SAKIP	%	A	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
								Pengelolaan Keuangan Daerah
								Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
								Pengelolaan Barang Milik Daerah
								Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM
				21	Indeks Reformasi Birokrasi	%	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
								Penyelenggaraan Pengawasan
				22	Indeks Sistem Merit ASN	Angka	275	Kepegawaian Daerah
								Pengembangan Sumber Daya Manusia
				23	Indeks Inovasi Daerah	%	70.07	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
								Program Aplikasi Informatika
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024

#### 2.3.1.2 Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja 2024

Untuk mengimplementasikan perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah diperjanjikan perlu memperoleh dukungan penganggaran yang dialokasikan pada program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian kinerja dapat dicapai. Selama tahun 2024 terjadi satu kali perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikarenakan adanya tambah kurang pagu program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian target pembangunan daerah pada perangkat daerah

Tabel 2.3.1.2.1  
Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja (Sebelum Perubahan)  
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	1		2		3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomiyang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan	1	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.5	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.238.920.800
								Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.565.000
								Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	481.722.385
								Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	16.214.800
								Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.031.353.726
								Pengembangan Ekspor	1.340.191.850
								Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.000.000
								Program Promosi Penanaman Modal	135.300.000
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	447.247.650
								Program Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	292.275.280

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
				2	PDRB Sektor Unggulan	%	6.4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.673.501.050
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.327.802.148
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	314.255.000
								Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	487.765.900
								Program Perizinan Usaha Pertanian	97.802.750
								Program Penyuluhan Pertanian	438.128.000
								Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	231.520.250
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.010.637.280
								Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.059.418.000
								Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	79.017.500
				3	Indeks Daya Saing Pariwisata	%	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	928.287.260
								Program Pemasaran Pariwisata	1.073.532.750

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	148.390.000
				4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	85.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19.766.685.074
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.780.655.919
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.285.514.744
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.509.607.000
								Program Penataan Bangunan Gedung	155.715.182.735
								Program Penyelenggaraan Jalan	67.341.815.580
								Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.365.378.800
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.318.855.500
								Program Pengembangan Perumahan	219.798.750
								Program Kawasan Pemukiman	1.052.149.000
								Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	8.506.740.000



NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Peningkatan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum (PSU)	10.087.227.588
								Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	19.850.000
								Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	24.975.000
								Program Pengelolaan Tanah Kosong	34.079.000
				5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	71.49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	371.371.650
								Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	862.261.600
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	128.194.500
								Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	43.542.500
								Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	581.944.700

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	57.507.000
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.975.000
								Program Pengelolaan Persampahan	13.188.808.220
				6	Indeks Risiko Bencana	Skor	135	Program Penanggulangan Bencana	938.347.212
								Program Penanganan Bencana	644.395.000
		2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan	7	Persentase Penduduk Miskin	%	3.96	Program Pemberdayaan Sosial	6.343.776.800
				8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.1	Penempatan Tenaga Kerja	51.999.950
								Hubungan Industrial	61.999.750
								Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	202.911.488
				9	Gini Rasio	Rasio	0.257	Program Rehabilitasi Sosial	8.723.188.463
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.217.246.250
				10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.75	Penataan Desa	138.645.000
								Peningkatan Kerjasama Desa	37.750.000
								Administrasi Pemerintah Desa	275.970.000
								Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat	776.603.300
								Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	1.099.363.900

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	3	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan. Kesehatan. Komoditas Pangan Dan Non Pangan	11	Indeks Pembangunan Manusia	%	70.26	Program Pengelola Pendidikan	79.974.383.825
				12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.6		
				13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.82		
				14	Umur Harapan Hidup	Tahun	66.72	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	156.157.271.719
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70.693.880.095
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.478.229.000
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	291.293.000
								Program Pengendalian Penduduk	420.416.800
								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.766.900.050
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.769.805.350

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	13.052.000
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	856.210.900
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	207.049.400
								Program Perlindungan Perempuan	88.542.500
								Program Perlindungan Khusus Anak	563.907.500
				15	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/Orang/Tahun	13413	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	209.750.000
				16	Indeks Literasi	Indeks	38.95	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	609.662.600
								Program Pembinaan Perpustakaan	278.373.000
								Program Pengelolaan Arsip	167.762.000
								Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1.837.500
		4	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat Yang Berkarakter Dan	17	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Indeks	0.7	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	8.037.375.278

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
			Berbudaya					Program pencegahan. penanggulangan. Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.520.753.000
								Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.520.012.500
								Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	473.323.800
								Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	553.320.000
								Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konfil Sosial	
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	103.576.000
				18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56.75	Program Pengembangan Kebudayaan	5.286.375.000
								Program Pembinaan Sejarah	218.990.000
								Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.076.786.800
								Program Pengelolaan Permuseuman	1.108.116.250
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.244.025.259

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	697.655.950
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa	19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.2	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.128.850.300
								Program Pendaftaran Penduduk	69.980.000
								Program Pencatatan Sipil	31.505.000
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	460.539.000
				20	SAKIP	%	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.411.462.795
								Pengelolaan Keuangan Daerah	230.616.191.826
								Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	3.037.142.800
								Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.920.597.000
								Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.646.260.450
				21	Indeks Reformasi Birokrasi	%	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	640.567.450
								Penyelenggaraan Pengawasan	1.440.960.000
				22	Indeks Sistem Merit ASN	Angka	275	Kepegawaian Daerah	4.968.942.385
								Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.952.045.360
				23	Indeks Inovasi Daerah	%	70.07	Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.625.427.050

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	180.924.200
								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	906.886.100
								Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.902.108.200
								Program Aplikasi Informatika	3.607.892.312
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.506.200
									973.459.591.856

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui sebanyak 109 program dengan 23 indikator kinerja sasaran yang mendukung 5 sasaran strategis dengan jumlah anggaran Rp. 973.459.591.856,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Berikut tabel di bawah ini dukungan anggaran perjanjian kinerja sesudah perubahan yang mengacu perubahan PK Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Tabel 2.3.1.1.2  
Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja (Sesudah Perubahan)  
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	1		2		3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomiyang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan	1	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.433.183.900
								Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.852.500
								Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	696.847.335
								Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	16.214.800
								Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.691.467.290
								Pengembangan Ekspor	1.866.691.600
								Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.000.000
								Program Promosi Penanaman Modal	135.300.000
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	447.247.650
								Program Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	292.275.280
				2	PDRB Sektor Unggulan	%	6.4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.000.802.480
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.074.210.370		



NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	337.619.800
								Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	883.465.900
								Program Perizinan Usaha Pertanian	97.802.750
								Program Penyuluhan Pertanian	438.128.900
								Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	661.420.250
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	895.614.530
								Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.119.418.000
								Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	79.017.500
				3	Indeks Daya Saing Pariwisata	%	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.178.299.535
								Program Pemasaran Pariwisata	1.073.532.750
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	148.390.000
				4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	85,2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30.086.793.380
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.044.474.401
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.464.146.869
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.155.507.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Penataan Bangunan Gedung	166.874.743.080
								Program Penyelenggaraan Jalan	116.884.844.037
								Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.365.378.800
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.619.755.500
								Program Pengembangan Perumahan	219.798.750
								Program Kawasan Pemukiman	1.727.661.000
								Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	15.163.940.000
								Program Peningkatan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum (PSU)	12.805.030.188
								Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	19.850.000
								Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	24.975.000
								Program Pengelolaan Tanah Kosong	34.079.000
				5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	71,49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	371.371.650
								Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	840.361.600
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	378.432.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	596.892.250
								Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	708.744.700
								Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	77.507.000
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.975.000
								Program Pengelolaan Persampahan	13.517.328.220
				6	Indeks Risiko Bencana	Skor	135	Program Penanggulangan Bencana	6.110.244.094
				2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan			Program Penanganan Bencana	647.335.000
								Program Pemberdayaan Sosial	6.033.920.950
								Penempatan Tenaga Kerja	51.999.950
								Hubungan Industrial	71.951.350
								Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	360.546.938
								Program Rehabilitasi Sosial	8.634.888.163
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.938.158.350
								Penataan Desa	175.070.000
								Peningkatan Kerjasama Desa	37.750.000
								Administrasi Pemerintah Desa	281.291.850

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat	930.603.300
								Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	1.134.363.900
								Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	650.000.000
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	3	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan. Kesehatan. Komoditas Pangan Dan Non Pangan	11	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,26	Program Pengelola Pendidikan	88.377.747.325
				12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,6		
				13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,82		
				14	Umur Harapan Hidup	Tahun	66.72	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	160.340.146.392
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.398.972.355
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.415.366.500
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	291.293.000
								Program Pengendalian Penduduk	102.890.100
								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.841.423.050
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.443.368.750
								Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	13.052.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.337.759.600
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	163.754.100
								Program Perlindungan Perempuan	56.165.800
								Program Perlindungan Khusus Anak	433.184.200
				15	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/ Orang/ tahun	13.413	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	209.750.000
								Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	921.980.617
				16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	38,95	Program Pembinaan Perpustakaan	278.373.000
								Program Pengelolaan Arsip	167.762.000
								Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1.837.500
		4	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat Yang Berkarakter Dan Berbudaya	17	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Indeks	0.7	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	11.421.544.878
								Program pencegahan. penanggulangan. Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.605.515.000
								Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	2.306.758.888
								Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	548.323.800
								Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	507.820.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	103.336.000
				18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56.75	Program Pengembangan Kebudayaan	5.695.633.400
								Program Pembinaan Sejarah	218.990.000
								Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.426.786.800
								Program Pengelolaan Permuseuman	1.119.336.250
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.060.665.259
								Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	927.857.450
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa	19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,2	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.143.850.000
								Program Pendaftaran Penduduk	55.820.000
								Program Pencatatan Sipil	31.145.000
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	258.536.000
				20	SAKIP	%	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.729.095.384
								Pengelolaan Keuangan Daerah	269.433.738.205
								Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	9.422.192.800
								Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.735.950.800
								Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.903.662.750
				21	Indeks Reformasi Birokrasi	%	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	793.787.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
								Penyelenggaraan Pengawasan	1.459.745.000
				22	Indeks Sistem Merit ASN	Angka	275	Kepegawaian Daerah	4.470.744.585
								Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.942.017.060
				23	Indeks Inovasi Daerah	%	70,07	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.546.167.300
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	176.424.200
								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	906.886.100
								Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.060.529.600
								Program Aplikasi Informatika	4.891.863.000
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.506.200

Sumber : PK Perubahan Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Dari tabel tersebut dapat diketahui sebanyak 109 program dengan 23 indikator kinerja sasaran yang mendukung 5 sasaran strategis dengan jumlah anggaran sesudah perubahan sebesar Rp. 1.183.701.571.388,00 (satu triliyun seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan empat rupiah).

### 2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja 2024

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 - 2026.

Untuk mengukur kinerja tiap sasaran yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten digunakan rumus presentase sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin rendah (pernyataan negatif), maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Baik :  $\geq 91\%$ ;
- b. Baik : 76 – 90,99%;
- c. Cukup : 66 – 75,99%;
- d. Kurang : 51 – 65,99%;
- e. Sangat Kurang :  $\leq 50,99\%$ .

Tabel 2.3.2.1

#### Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Sumber Data
Tujuan 1 RPD Kab. HSS 2024-2026 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan						
Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan						



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Sumber Data
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	5.15	93.63	BPS
2	PDRB Sektor Unggulan	%	6,4	5.1	79,68	BPS
3	Indeks Daya Saing Pariwisata	Tahun	2	3	150,00	Disporapar Kab. HSS
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	85,2	78,65	92,31	Dinas PUTR Kab. HSS dan Dispera KPLH
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	71,49	67,39	94,26	Dispera KPLH
6	Indeks Risiko Bencana	Skor	135	119,36	113,10	BPBD Kab. HSS
Sasaran 2 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan						
7	Persentase Penduduk Miskin	%	3,96	3,38	117,16	BPS
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,1	2,11	99,52	BPS
9	Gini Rasio	Rasio	0,257	0,288	89,23	BPS
10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,77	102,67	Dinas PMD Kab. HSS

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Sumber Data
Tujuan 2 RPD Kab. HSS 2024-2026 : MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER						
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan Dan Non Pangan						
11	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	70,26	71,21	101,35	BPS
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,6	12,48	99,05	BPS
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	8,09	103,45	BPS
14	Umur Harapan Hidup	Tahun	66,72	72,82	109,14	BPS
15	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/Org/Th	13.413	14.150	105,49	BPS
16	Indeks Literasi	Indeks	38,95	83,34	213,97	Dispersip Kab. HSS
Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat Yang Berkarakter Dan Berbudaya						
17	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Indeks	0,7	1	142,86	Satpol PP & Damkar Kab. HSS
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56,75	***	N/A	Dinas Pendidikan Kab. HSS
Tujuan 3 RPD Kab. HSS 2024-2026 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik						

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Sumber Data
Sasaran 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa						
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,2	98,08	111,20	Setda Kab. HSS
20	SAKIP	Nilai	A	A	100	Kemen PAN RB
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB	AA	100	Kemen PAN RB
22	Indeks Sistem Merit ASN	Angka	275	267,5	97,27	BKPSDM Kab. HSS
23	Indeks Inovasi Daerah	%	70,07	73,15	104,40	Bappelitbangda Kab. HSS

Sumber : Data Diolah Tahun 2024

\*\*\* : Belum ada data tahun 2024

Diantara 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran, sebanyak 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian kinerja berada pada interval >90%, 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya berada pada interval 76% sampai 90% masuk dalam kategori baik dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum terdapat data capaian tahun 2024.

### 2.3.3 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada sub bab ini akan dijelaskan analisis capaian kinerja pada setiap tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, sebagai berikut.

**Tujuan 1 RPD Kab. HSS 2024-2026 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan**

## **Sasaran 1 : Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan**

### **1) Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu kabupaten dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat atau lambat perekonomian daerah berkembang, baik dalam skala tahunan maupun triwulanan.

Laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh berbagai sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Jika pertumbuhan ekonomi positif, berarti aktivitas ekonomi meningkat, pendapatan masyarakat cenderung bertambah, dan kesejahteraan dapat meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan negatif, menunjukkan adanya kontraksi ekonomi yang bisa berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, sementara realisasi pertumbuhan mencapai 5,15%, atau sekitar **93.63%** dari target yang ditetapkan. Berdasarkan skala peringkat kinerja, pencapaian ini masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi HSS hampir mencapai target yang direncanakan.

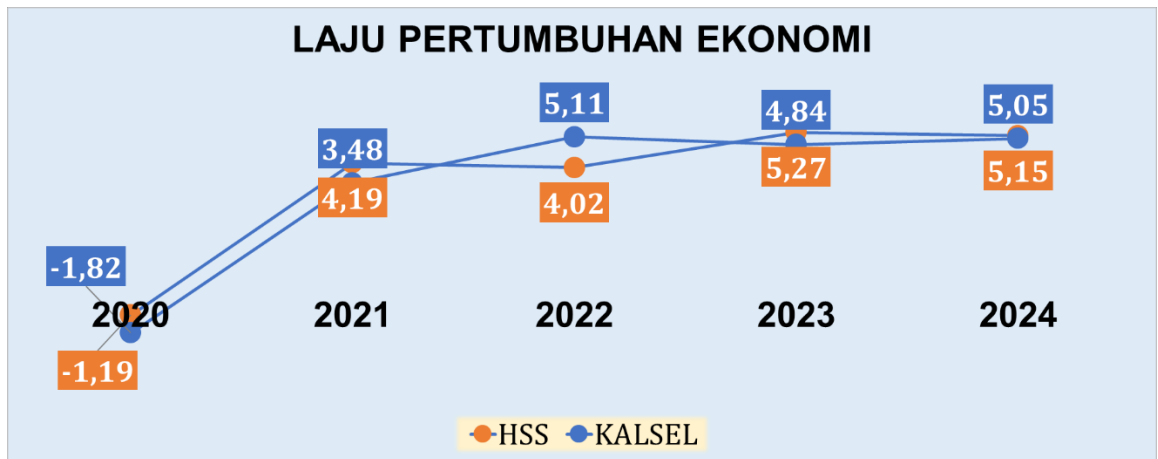
Pertumbuhan tahun ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang sebesar 5,27%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSS pada tahun 2024 berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan (5,05%) dan Nasional (5,03%). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSS disebabkan melambatnya beberapa kategori lapangan usaha (sektor) terutama pada 2 (dua) kategori lapangan usaha yang memiliki *share* paling besar yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian.

Meskipun sedikit di bawah target, hasil ini mencerminkan kinerja ekonomi yang solid dan daya tahan ekonomi daerah yang baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di Kalimantan Selatan (5,05%). Untuk mencapai target penuh di tahun-tahun mendatang, diperlukan optimalisasi sektor unggulan serta strategi peningkatan

investasi dan daya saing ekonomi lokal.

Gambar Grafik 2.3.3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel & Kab. Hulu Sungai Selatan  
2020-2024



Sumber Data : BPS Tahun 2024

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih stabil dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, kontraksi ekonomi Kab. HSS (-1,19%) lebih ringan dibandingkan Kalsel (-1,82%), menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Pasca-pandemi, pemulihan Kab. HSS juga lebih cepat dengan pertumbuhan 4,19% (2021) dibandingkan Kalsel 3,48%. Namun, pada 2022, pertumbuhan Kab. HSS (4,02%) sedikit lebih rendah dari Kalsel (5,11%), meskipun kembali unggul di 2023 dengan 5,27% dibandingkan Prov. Kalsel 4,84%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi HSS (5,15%) masih sedikit lebih tinggi daripada Prov. Kalsel (5,05%), tetapi belum mencapai target 5,5%. Secara keseluruhan, HSS memiliki tren pertumbuhan yang cukup kompetitif dan stabil, menandakan potensi ekonomi daerah yang kuat serta strategi pemulihan yang efektif.

Sektor-sektor penyumbang terbesar PDRB di Hulu Sungai Selatan tahun 2024 adalah pengadaan listrik dan Gas (8,57), pertambangan dan penggalian (7,98), konstruksi (7,47), akomodasi makan minum (7,37), dan jasa perusahaan (7,49). Sektor Pertanian yang menjadi salah satu sektor dominan penyerapan tenaga kerja, hanya menyumbang PDRB sebesar 2,85.

Gambar Tabel 2.3.3.2:

Laju pertumbuhan PDRB atas harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kab.Hulu Sungai Selatan (persen), 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	0,19	0,00	-0,52	4,54	2,85
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-6,20	13,35	6,63	8,78	7,98
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-3,56	5,93	5,25	5,34	5,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,46	4,52	7,41	7,56	8,57
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	8,18	4,91	4,72	2,33	4,23
F	Konstruksi/Construction	-3,48	6,14	5,56	6,51	7,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-2,45	5,40	8,14	4,14	4,51
H	Transportasi dan Pengudangan/Transportation and Storage	-2,61	4,56	5,73	6,15	6,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-2,26	4,08	11,90	6,27	7,37
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	8,92	7,76	6,64	6,03	4,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,13	1,61	-1,25	10,16	4,99
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,62	3,65	4,97	3,34	3,35
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-1,51	2,19	6,44	7,39	7,49

Sumber: BPS Kab.HSS

## 2) PDRB Sektor Unggulan

Perkembangan PDRB sektor unggulan tahun 2024 menunjukkan variasi pertumbuhan di antara sektor-sektor utama. Tabel 2.3.3.2.1 PDRB Sektor Unggulan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023-2024

REALISASI		TARGET
2023	2024	2024
4,39	5,10	6,4

Secara keseluruhan, rata-rata realisasi pertumbuhan PDRB tahun 2024 mencapai 5,10%, masih jauh di bawah target sebesar 6,4% dengan capaian **79,68%** kategori **Baik** : 76 – 90,99%.

Sektor pertambangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,98%.

Jika dibandingkan tahun 2023, sektor ini mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (mengalami peningkatan produksi akan tetapi peningkatan produksinya tidak sebesar tahun sebelumnya). Hal ini diantaranya disebabkan turunnya harga global batu bara dibandingkan tahun sebelumnya, tingginya curah hujan di Sumatera dan Kalimantan yang melampaui perkiraan (curah hujan, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan curah hujan september s.d desember tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan September s.d Desember tahun 2023). Musim hujan berkelanjutan pada bulan September 2024 yang menjadi tantangan tambahan bagi peningkatan produksi. Permintaan batu bara menurun, karena kesadaran akan kelestarian lingkungan dan peralihan ke energi baru-terbarukan.

Faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kategori pertambangan dan penggalan adalah :

- a. Permintaan domestic; Peningkatan permintaan listrik dari dampak pandemi dan beroperasinya pembangkit listrik tenaga batu bara
- b. Permintaan internasional; Negara-negara di Asia dan India masih bergantung pada batu bara sebagai sumber energi primer
- c. Krisis energi; Konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina memengaruhi pasokan gas alam, sehingga mendorong sejumlah negara kembali mengandalkan batu bara

Faktor penghambat produksi adalah:

- d. Cuaca; Cuaca buruk seperti hujan deras dapat menghambat produksi batu bara.
- e. Alat berat; Alat gali muat dan angkut yang tidak dalam kondisi baik dapat menghambat produksi.
- f. Kesenjangan alat; Kesenjangan antara alat gali muat dan angkut yang kurang baik dapat menyebabkan waktu tunggu dan menghambat produksi.
- g. Kondisi jalan; Kondisi jalan yang amblas dapat menghambat proses pengisian batubara ke dumptruk.
- h. Kurangnya pasokan; Kurangnya pasokan batubara dari pit dapat menyebabkan unit crusher harus menunggu.
- i. Konflik pertambangan; Konflik pertambangan antara masyarakat dan pemerintah dapat menghambat produksi.

- j. Ketidaksesuaian pasokan dan permintaan; Ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan batu bara dapat menghambat produksi.
- k. Ekosistem yang belum mendukung; Belum terbentuknya ekosistem yang mendukung pengembangan produk hilirisasi batu bara dapat menghambat produksi.
- l. Kepastian hukum; Kepastian hukum yang belum jelas dapat menghambat investasi hilirisasi batu bara.

Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsisten*) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terdiri dari sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, sub kategori kehutanan dan penambangan kayu dan sub kategori perikanan.

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,85 persen atau mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi jikadibandingkan dengan tahun 2023. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi disebabkan peningkatan produksi tanaman pangan (seperti padi) pada tahun 2024 tidak sebesar peningkatan produksi pada tahun 2023. Selain itu peningkatan produksi perkebunan, hortikultura dan perikanan pada tahun 2024 tidak sebesar peningkatan produksi pada tahun 2023.

Tingginya pertumbuhan pada tahun 2023 disebabkan karena pada tahun 2022 sebagian besar mengalami gagal panen atau puso terutama di daerah nagara yang meliputi 3 kecamatan yaitu Daha Selatan, Daha Barat dan Daha Utara. Faktor gagal panen diakibatkan oleh serangan hama tungro, hama wereng dan terjadinya anomali cuaca yang tidak menentu akibat dampak iklim La Nina. Sementara pada tahun 2023, kondisi iklim di Kabupaten HSS kembali normal sehingga pada triwulan 4 tahun 2023 terutama di wilayah nagara bisa melakukan tanam dan panen tanaman padi dan hortikultura semusim yang peningkatan produksinya signifikan



dibandingkan tahun 2022.

Tahun 2024, secara umum kondisi cuaca di Kabupaten HSS tidak berbeda jauh dengan tahun 2023 sehingga yang sebagian besar wilayah Kabupaten HSS bisa melakukan tanam dan panen padi. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 kondisi cuaca normal sehingga peningkatan produksinya tidak sebesar peningkatan produksi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yang sebagian tidak bisa melakukan tanam dan panen padi dan hortikultura.

Faktor-faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan;

- a. Potensi sumber daya alam: Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023, luas lahan sawah di Kabupaten HSS sebesar 30.164 hektar
- b. Jumlah penduduk: Pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk, khususnya yang tinggal di pedesaan. Persentase penduduk Kabupaten HSS yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 36,69% pada tahun 2024
- c. Pangsa terhadap pendapatan nasional: Pertanian memiliki pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar.
- d. Pangsa terhadap ekspor nasional: Pertanian memiliki pangsa terhadap ekspor nasional yang cukup besar
- e. Teknologi: Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Faktor-faktor penghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan;

- a. Keterbatasan modal: Petani menghadapi kendala finansial yang signifikan.
- b. Perubahan iklim global: Perubahan iklim global berdampak pada hasil panen.
- c. Fluktuasi harga: Fluktuasi harga membuat petani kesulitan secara ekonomi.
- d. Rendahnya akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar.

- e. Skala usaha kecil: Sebagian besar usaha pertanian berukuran kecil.
- f. Penggunaan teknologi sederhana: Teknologi yang digunakan masih sederhana.
- g. Ketergantungan pada tenaga kerja keluarga: Sebagian besar penggerak ekonomi pertanian mengandalkan tenaga kerja keluarga (Berdasarkan data hasil Sakernas tahun 2024: persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama sebagai pekerja keluarga di Kabupaten HSS pada tahun 2024 sebesar 18,42%).
- h. Kurang pelatihan pertanian: Petani belum mendapatkan pelatihan pertanian.
- i. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga cenderung merugikan petani.
- j. Rendahnya ketersediaan benih yang berkualitas untuk petani.
- k. Kurang alat produksi: Petani kesulitan mendapatkan alat produksi.
- l. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Rendahnya ketersediaan benih yang berkualitas untuk petani.

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Pada industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan share yang paling besar adalah industri pengolahan makanan dan minuman. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,06%, mengindikasikan stabilitas dalam aktivitas manufaktur meskipun masih berada di bawah target yang ditetapkan. Industri CPO dan industri penggilingan padi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sejalan

melambatnya produksi tanaman pangan dan perkebunan sawit yang peningkatan produksinya tidak sebesar tahun 2023.

Faktor-faktor pendorong peningkatan kegiatan produksi Industri Pengolahan

- a. Tenaga kerja: Jumlah tenaga kerja yang tersedia dan terampil dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas industri.
- b. Modal: Ketersediaan modal dapat memengaruhi perkembangan industri.
- c. Bahan baku: Ketersediaan bahan baku yang memadai dapat mendukung perkembangan industri.
- d. Infrastruktur: Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti jalan, angkutan umum, alat pengolah, persampahan, dan sanitasi, dapat mendukung perkembangan industri.
- e. Kebijakan pemerintah: Kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perkembangan industri.
- f. Inovasi dan teknologi: Inovasi dan teknologi dapat mendukung perkembangan industri.
- g. Pertumbuhan pasar: Pertumbuhan pasar dapat mendorong perkembangan industri.
- h. Permintaan pasar: Permintaan pasar dapat memengaruhi perkembangan industri.
- i. Strategi pemasaran: Strategi pemasaran dapat memengaruhi perkembangan industri.

Faktor-faktor penghambat peningkatan kegiatan produksi Industri Pengolahan;

- j. Keterbatasan teknologi: Kurangnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk riset dan teknologi
- k. Kualitas sumber daya manusia: Keterbatasan tenaga kerja terampil
- l. Keterbatasan dana: Terbatasnya dana pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur
- m. Masalah logistik: Regulasi pemerintah yang berubah-ubah dapat menghambat proses produksi
- n. Keterbatasan bahan baku: Kurangnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan

- o. Keterbatasan transportasi: Kurangnya sarana transportasi yang memadai
- p. Keterbatasan energi: Kurangnya ketersediaan energi atau bahan bakar

Laju pertumbuhan ekonomi kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi; Tahun 2024 sebesar 4,10%. Pada tahun 2024 mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (mengalami peningkatan produksi akan tetapi peningkatannya tidak sebesar peningkatan tahun sebelumnya) jika dibandingkan tahun 2023. Pada kategori informasi dan komunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pendapatan terbesar adalah pada kegiatan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi seperti segmen data, internet dan jasa teknologi dan informasi.

Perlambatan kategori informasi dan komunikasi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 diantaranya disebabkan peningkatan penduduk yang mengakses internet pada tahun 2024 lebih kecil peningkatannya dibandingkan tahun 2023 dan penurunan penduduk yang menggunakan telepon seluler. Berdasarkan data SUSENAS, peningkatan persentase penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet pada tahun 2023 sebesar 6,35% sedangkan peningkatan persentase penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet pada tahun 2024 sebesar 2,1%.

Persentase penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan HP tahun 2024 mengalami penurunan dari 86,90% pada tahun 2023 menjadi 83,72%. Kemudian peningkatan menara telekomunikasi pada tahun 2024 sebanyak 3 menara telekomunikasi sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 5 menara telekomunikasi. Kehadiran menara telekomunikasi tanpa disadari telah berjasa dalam memenuhi kebutuhan layanan data selular dan menjamin adanya konektivitas sebagai unsur utama dalam kegiatan ekonomi digital. Menara telekomunikasi menjadi syarat utama agar sinyal yang dipancarkan perangkat Base Transceiver Station (BTS) dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Kemudian berdasarkan nilai indeks Masyarakat digital Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan

data dari Kementerian Komdigi, sebesar 44,44 tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 (44,74). Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah inisiatif penting untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Melalui IMDI, kita dapat memetakan kekuatan dan kelemahan masyarakat Indonesia dalam beradaptasi dengan era digital yang semakin pesat. Faktor-faktor pendorong peningkatan jasa digitalisasi:

- a. Perkembangan teknologi finansial yang canggih
- b. Perubahan perilaku konsumen dan harapan konsumen
- c. Pergeseran/perubahan ke bentuk digital dari industri

Faktor-faktor penghambat peningkatan jasa digitalisasi;

- a. Keterbatasan sumber daya manusia: Kurangnya SDM yang terampil menggunakan teknologi digital
- b. Keterbatasan modal: Terbatasnya modal menjadi kendala bagi UMKM, terutama di daerah pedesaan
- c. Regulasi yang kompleks: Regulasi yang belum optimal dan tidak konsisten dapat menghambat transformasi digital
- d. Infrastruktur digital yang belum merata: Kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan dapat menghambat transformasi digital
- e. Persepsi risiko terhadap teknologi digital: Persepsi risiko terhadap teknologi digital dapat menghambat transformasi digital
- f. Keamanan berinternet: Ancaman keamanan siber masih menjadi tantangan bagi sebagian besar pengguna internet di Indonesia
- g. Hambatan sosial dan budaya: Hambatan sosial dan budaya dapat menghambat penggunaan e-commerce
- h. Hambatan ekonomi: Hambatan ekonomi dapat menghambat penggunaan e-commerce
- i. Hambatan hukum dan regulasi: Hambatan hukum dan regulasi dapat menghambat penggunaan e-commerce
- j. Hambatan organisasi: Hambatan organisasi dapat menghambat penggunaan e-commerce

### 3) Indeks Daya Saing Pariwisata

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan target Indeks Daya Saing Pariwisata sebesar 2,00, namun berhasil mencapai realisasi 3,00, dengan tingkat capaian **150%**, yang masuk dalam kategori “**Sangat Baik**” :  $\geq 91\%$  .

Tabel 2.3.3.3.1 Indeks Daya Saing Pariwisata  
Kab. Hulu Sungai Selatan 2024

Indeks Daya Saing Pariwisata	Target 2024	Realisasi 2024
	2	3

Pencapaian ini mencerminkan peningkatan daya tarik destinasi wisata, efektivitas promosi, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan capaian ini, sektor pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin kompetitif, berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat dan peluang usaha di bidang pariwisata.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. PDRB Sektor Pariwisata tahun 2024 sebesar 7,37%. Angka ini meningkat sebesar 0,36% dibanding tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan jumlah kunjungan wisata yang meningkat sebesar 422.691 orang dibanding tahun 2023. Tingkat pengeluaran wisatawan meningkat sebesar 1,8 milyar dibanding tahun 2023.

Gambar: 2.3.3.3.2 Tingkat Pengeluaran Wisatawan 2020-2024



Sumber:Lkj Dinas Porapar 2024

Destinasi wisata andalan Kab.Hulu Sungai Selatan adalah KSPN Loksado, yang menjadi bagian dari Geopark Meratus. Berbagai even pariwisata telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk menarik wisatawan. Even tersebut adalah:

- a. Pemilihan duta pariwisata; kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka rekrutmen generasi muda yang akan menjadi agent-agent promosi pariwisata daerah sebagai agen promosi pariwisata, dilaksanakan 21 Juni 2024.
- b. Festival *bamboo rafting*, Festival Bamboo Rafting menyuguhkan wisata alam, budaya dan kearifan lokal. Festival Bamboo Rafting diisi dengan kegiatan wisata alam dan pertunjukkan seni budaya local dalam bentuk atraksi-atraksi seni budaya masyarakat Banjar dan Dayak Meratus, kegiatan utama Festival Bamboo Rafting adalah atraksi wisata alam Bamboo Rafting (Balanting), yaitu mengarungi jeram-jeram Sungai Amandit dengan menggunakan rakit bambu. Rangkaian pelaksanaan Festival Bamboo Rafting dilaksanakan selama 5 hari dan dilaksanakan pada 2 (dua) tempat, yaitu di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan dan KSPN Loksado. Acara dilaksanakan tanggal 18-22 Juni 2024.
- c. Tour de Loksado, merupakan kegiatan yg digagas dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan bersama DISPORAPAR Kab. Hulu Sungai Selatan berupa fasilitasi dilaksanakan, tanggal 29-30 Juni 2024.
- d. Wisata religius, terdapat tiga even wisata religius di kabupaten hulu sungai selatan yang dilaksanakan setiap tahun. Even tersebut berupa Haulan (peringatan kematian) tiga ulama besar di Hulu Sungai Selatan yakni, Syekh Sa'duddin (Datu Taniran) pada tanggal 10 Agustus 2024, Datu Ahmad Balimau, tanggal 18 September 2024 dan TGH Riduan Basri (Guru Kapuh) pada tanggal 5-7 Juli 2024. Even ini menarik banyak peziarah dan jamaan dari dalam maupun luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi Kalsel.

#### **4) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang

mencakup beberapa sektor utama, yaitu bina marga (jalan dan jembatan), bidang cipta karya (prasarana dasar seperti drainase dan sanitasi), pemukiman (pengelolaan lingkungan permukiman), dan perumahan (ketersediaan serta kualitas hunian). Indeks ini dihitung berdasarkan survei atau evaluasi yang mengukur persepsi pengguna terhadap aspek seperti kualitas, aksesibilitas, keandalan, dan daya guna infrastruktur yang disediakan, sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang lebih optimal.

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas infrastruktur di berbagai sektor, termasuk perumahan, permukiman, bina marga, dan cipta karya. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja layanan infrastruktur, dilakukan perhitungan rata-rata. IKLI Rata-Rata IKLI Kab. HSS = IKLI Perumahan + IKLI Permukiman + IKLI Bina Marga + IKLI Cipta Karya / 4

$$\text{Rata-rata IKLI} = \frac{81,71 + 80,88 + 75,80 + 76,20}{4}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata IKLI dari keempat kategori adalah **78,65**.

Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan menargetkan IKLI sebesar 85,2, sementara realisasi mencapai 78,65, atau sekitar **92,31%** dari target yang ditetapkan. Berdasarkan skala peringkat kinerja, pencapaian ini masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ),

a. IKLI Bina Marga

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bina Marga dengan nilai **75,80** yang masuk dalam kategori mutu pelayanan "**baik**" menunjukkan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola sudah memenuhi standar kualitas yang cukup baik dalam mendukung mobilitas masyarakat. Nilai ini mencerminkan kepuasan pengguna terhadap aspek seperti kondisi jalan, kelancaran arus lalu lintas, keselamatan, serta pemeliharaan yang dilakukan.



Gambar 2.3.3.4.1 Data Survey IKLI Bina Marga 2024

PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA										
NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5					
1	3	3	3	3	3					
2	3	4	3	3	4					
3	3	3	3	3	4					
4	3	3	3	3	3					
5	3	3	4	3	3					
6	3	3	3	3	3					
7	3	4	3	3	3					
8	2	2	3	3	2					
9	3	3	3	3	3					
10	4	3	4	3	3					
11	3	3	3	3	3					
12	3	3	3	3	4					
13	3	3	3	3	3					
14	3	3	3	3	4					
15	3	3	3	4	3					
16	3	3	3	3	3					
17	3	3	3	3	3					
18	3	3	3	3	4					
19	3	2	3	2	2					
20	3	2	3	3	3					
21	3	3	3	3	3					
22	4	3	3	3	3					
23	3	3	2	3	3					
24	3	3	3	3	3					
25	3	3	3	3	3					
Jumlah	76	74	76	75	78					
NRR / unsur	3,040	2,960	3,040	3,000	3,120					
NRR tertbg/ unsur	0,608	0,592	0,608	0,600	0,624					
IKM Unit pelayanan						*) 3,032 75,800				
Keterangan :						No. Unsur Pelayanan Rata-rata				
- U1 s.d. U14 =						U1 Kondisi Prasarana Jalan 3,040				
- NRR =						U2 Kondisi Prasarana Jembatan 2,960				
- IKM =						U3 Ketepatan Pembangunan Jalan dan 3,040				
- IKM =						U4 Penanganan Kerusakan 3,000				
- *) =						U5 Penanganan Pengaduan 3,120				
NRR Per Unsur										
NRR tertimbang										
IKM UNIT PELAYANAN :						75,80				
Mutu Pelayanan :						Baik				

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. HSS Tahun 2024

Faktor pendukung IKLI Bina Marga terutama ketersediaan anggaran yang cukup dengan alokasi APBD sebesar Rp. 116,884,844,037.00 dan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Dukungan juga didapatkan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Jalan yang melaksanakan rehabilitasi jalan nasional dan pemerintah provinsi melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan untuk rehabilitasi jalan provinsi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai 63.60% dari target 63.06% dengan capaian 100.85% dapat dijelaskan bahwa peningkatan tersebut sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan masih berjalan dengan baik meskipun dihadapkan pada tantangan administratif dan teknis hal ini tidak lepas dari peningkatan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu Penggunaan teknologi, seperti sistem manajemen jalan dan teknologi survey kondisi jalan dengan metode PKRMS, memungkinkan dilakukannya pemantauan kondisi jalan secara lebih akurat dan efektif.

Persentase jembatan dalam kondisi baik mencapai 66.46% dari target 66.17% dengan capaian 100.43%. Sama halnya dengan kondisi jalan

mantap, peningkatan kualitas jembatan juga tidak lepas dari peningkatan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jembatan. Penggunaan teknologi, seperti sistem manajemen jembatan dan teknologi survey kondisi jembatan dengan metode BMS serta adanya peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang pemeliharaan jalan/jembatan memungkinkan dilakukannya pekerjaan pemeliharaan jalan/jembatan secara lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pemenuhan infrastruktur kebinamargaan berjalan sesuai rencana dan bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur di masa mendatang.

#### b. IKLI Bidang Cipta Karya

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bidang Cipta Karya dengan nilai **76,20** yang termasuk dalam kategori mutu pelayanan "**baik**" menunjukkan bahwa infrastruktur prasarana dasar, seperti drainase, sanitasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya, telah berfungsi dengan cukup optimal dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

Gambar 2.3.3.4.2 Data Survey IKLI Bidang Cipta Karya 2024

PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA DAN PER UNSUR PELAYANAN									
UNIT PELAYANAN JENIS LAYANAN		NILAI UNSUR PELAYANAN							
NO. RES	U1	U2	U3	U4	U5				
1	3	3	3	3	3				
2	3	3	3	3	3				
3	3	3	3	3	3				
4	3	3	3	3	3				
5	3	3	3	3	3				
6	3	3	3	3	3				
7	3	3	3	3	3				
8	3	3	3	3	3				
9	3	3	3	3	3				
10	3	3	3	3	3				
11	3	3	3	3	3				
12	3	3	3	3	3				
13	3	3	3	3	3				
14	3	3	3	3	3				
15	3	3	3	3	3				
16	3	3	3	3	3				
17	3	3	3	3	3				
18	3	3	3	3	3				
19	3	3	3	3	3				
20	3	3	3	3	3				
21	3	3	3	3	3				
22	3	3	3	3	3				
23	3	3	3	3	3				
24	3	3	3	3	3				
25	3	3	3	3	3				
Nilai Unsur	79	77	79	74	72				
NRRI Unsur	3.160	3.080	3.160	2.900	2.880				
NRRI tertimbang unsur	0.632	0.616	0.632	0.592	0.576				
IKM Unit pelayanan					*)		**) 76,200		
					3.048				
Keterangan :		No.		Unsur Pelayanan		Rata-rata			
- U1 x d U14		U1		Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi		3.160			
- NRRI		U2		Kualitas Air Minum dan Sanitasi		3.080			
- RM		U3		Ketersediaan Layanan Air Minum dan Sanitasi		3.160			
- *)		U4		Aspek Sosial		2.900			
NRRI Per Unsur		U5		Aspek Ekonomi		2.880			
NRRI tertimbang									
IKM UNIT PELAYANAN : 76,20									
Mutu Pelayanan :		Baik							
Mutu Pelayanan :									
A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50									
B (Baik) : 62,51 - 81,25 D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75									

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. HSS Tahun 2024

Jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih sampai dengan tahun 2023 sebanyak 50.732 KK. Untuk meningkatkan akses air bersih maka pada tahun 2024 Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan rehabilitasi, perluasan dan pembangunan sarana prasarana air bersih dengan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga yang memiliki balita stunting. Pada wilayah yang telah tersedia jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dilaksanakan pemasangan sambungan ke rumah penduduk (SR). Sedangkan pada wilayah yang belum ada jaringan perpipaan dilakukan pembangunan menara air dan sambungan ke rumah penduduk dengan jumlah rumah tangga sasaran sebanyak 1.824 KK.

Tahun 2024 jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih berjumlah 52.556 KK atau jika dibandingkan dengan jumlah KK se Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 93,36 persentase. Dengan demikian target awal sebesar 96,43% tidak tercapai, hal ini perlu kerja keras, karena sebaran penduduk perdesaan yang tidak merata dan acak, luasnya wilayah kabupaten sehingga akses perpipaan air minum membutuhkan dana yang lebih besar daripada di daerah perkotaan. Sebagai rencana aksi ke depan akan diupayakan dengan melaksanakan program SPAM perdesaan untuk menjangkau rumah tangga yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum yang dikelola PDAM. Sumber air bersih masyarakat berasal dari jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi seperti air sumur dalam, penampungan mata air.

Gambar Tabel 2.3.3.4.3

**Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak Tahun 2024**

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Sarana Sanitasi dan Air Minum aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase akses air minum layak	%	96,43	93,36	96,82

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. HSS Tahun 2024

Cakupan rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak di tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sebaran penduduk perdesaan yang tidak merata dan acak. Luasnya wilayah

kabupaten menyebabkan akses perpipaian air bersih membutuhkan dana yang lebih besar daripada di daerah perkotaan. Untuk memperluas akses air bersih akan selalu diupayakan untuk memperoleh sumber pendanaan disamping dari APBD melalui DAU juga usulan kegiatan DAK.

c. IKLI Kualitas Kawasan Perumahan

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kualitas Kawasan Perumahan dengan nilai **81,71** yang masuk dalam kategori mutu pelayanan "**baik**" menunjukkan bahwa kawasan perumahan telah memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan kelayakan hunian bagi masyarakat.

Gambar 2.3.3.4.4 Data Survey IKLI Perumahan 2024

Tabel Nilai Unsur Pelayanan				
No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG	JUMLAH NILAI PER UNSUR
1	Jalan Lingkungan	3.49	0.143	0.50
2	Drainase	3.47	0.143	0.50
3	Air Bersih	3.31	0.143	0.47
4	Sanitasi	2.95	0.143	0.42
5	Pengelolaan Sampah	3.07	0.143	0.44
6	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3.45	0.143	0.49
7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.14	0.143	0.45
Jumlah (Nilai Rata-rata Tertimbang)				3.27
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi =		3.27	25	81.71

Sumber Data : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2024

d. IKLI Kualitas Kawasan Permukiman

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kualitas Kawasan Permukiman dengan nilai **80,88** yang masuk dalam kategori mutu pelayanan "**baik**" menunjukkan bahwa infrastruktur dan fasilitas di kawasan permukiman telah mampu mendukung kebutuhan hidup masyarakat dengan cukup baik.

Gambar 2.3.3.4.5 Data Survey IKLI Kawasan Permukiman 2024

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG	JUMLAH NILAI PER UNSUR
1	Rumah Layak Huni	2,95	0,125	0,37
2	Jalan Lingkungan	3,68	0,125	0,46
3	Drainase	3,18	0,125	0,40
4	Air Bersih	3,09	0,125	0,39
5	Sanitasi	3,01	0,125	0,38
6	Pengelolaan Sampah	3,44	0,125	0,43
7	Proteksi Kebakaran	3,12	0,125	0,39
8	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3,41	0,125	0,43
	Jumlah (Nilai Rata-rata Tertimbang)			3,24

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  
setelah dikonversi =

3,24

25

80,88

Sumber Data : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2024

Komponen penilaian yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan survei IKLI kepada masyarakat sebagai penerima manfaat adalah PSU (Prasarana dan Sarana Umum) perumahan dan Permukiman serta Hasil Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni untuk Kawasan Permukiman. Sedangkan Administrasi Pertanahan dalam rangka perizinan perumahan dalam kejelasan aspek hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengembang sebelum serah terima aset perumahan, sudah harus menjadi salah satu kriteria lokasi dilaksanakannya survei IKLI perumahan dan permukiman.

Pelaksanaan survei IKLI perumahan dan permukiman dilakukan secara mandiri oleh bidang permukiman dan bidang perumahan dan pertanahan dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup pada akhir tahun.

Faktor-faktor yang menunjang capaian kinerja adalah:

- adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun.
- Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan demi meningkatkan Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024.

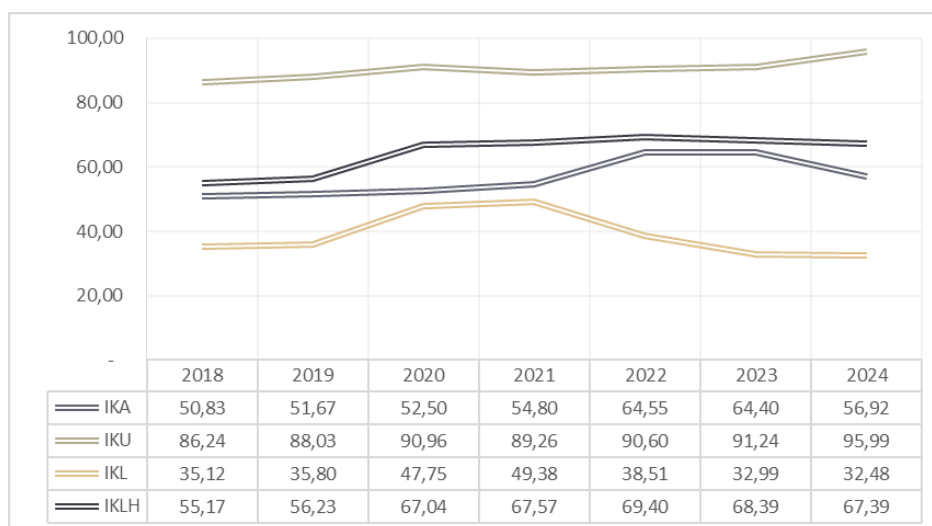
- c. Implementasi penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Dilaksanakan monev triwulan pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui *website*, media elektronik, dan sosial media yang melibatkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi untuk peningkatan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

## 5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah dalam periode tertentu. IKLH dihitung berdasarkan beberapa parameter utama, seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 dengan target 71,49 dan realisasi 67,39 dengan capaian **94,26%** dengan kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ), menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Gambar 2.3.3.5.1 Grafik Capaian IKA, IKU, IKL, dan IKLH  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2024



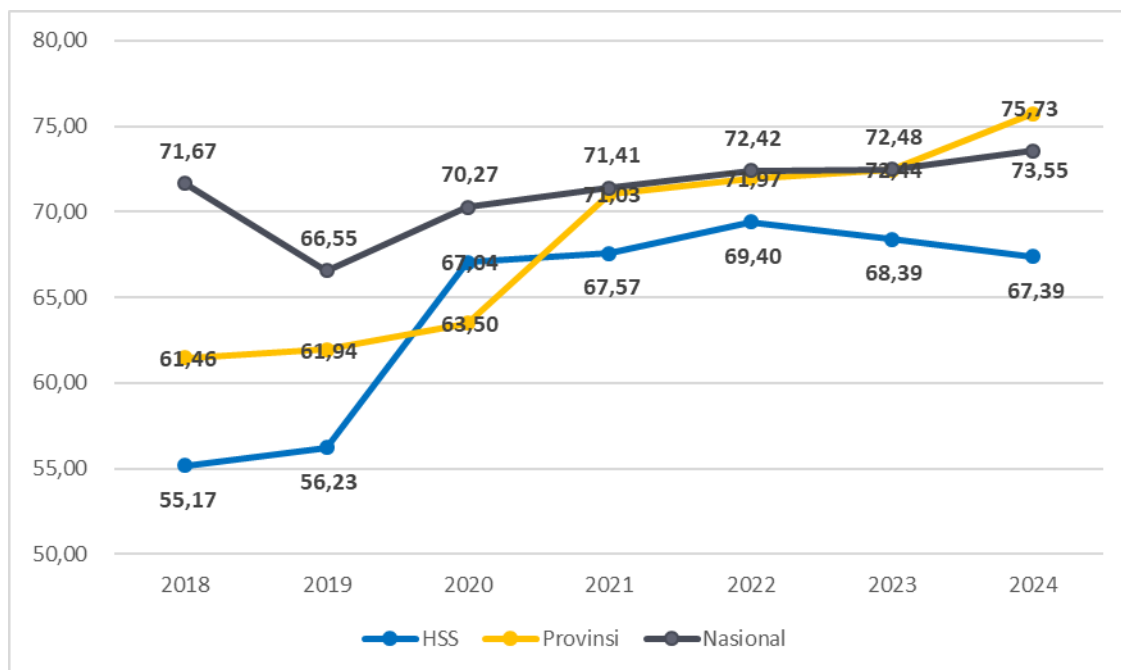
Sumber : Data Bidang P3LH Disperakplh Tahun 2024

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 - 2024 nilai IKA mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 7,48 poin dari tahun sebelumnya. Nilai IKU mengalami peningkatan sebesar 4,75 poin. Sedangkan Nilai IKL terjadi penurunan 0,51 poin berdasarkan penilaian kondisi tutupan lahan hasil pengamatan citra satelit kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh KLHK tahun 2024.

Pada periode tahun-tahun sebelumnya nilai IKLH kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2020 sudah melampaui nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan, walaupun masih dibawah nilai IKLH secara Nasional. Namun pada Tahun 2024 terjadi penurunan dan kembali di bawah IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami trend peningkatan yang cukup signifikan.

Perbandingan capaian nilai IKLH untuk periode Tahun 2018 - 2024 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3.3.5.2 Grafik Perbandingan Capaian IKLH Kab. Hulu Sungai Selatan dengan Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2024



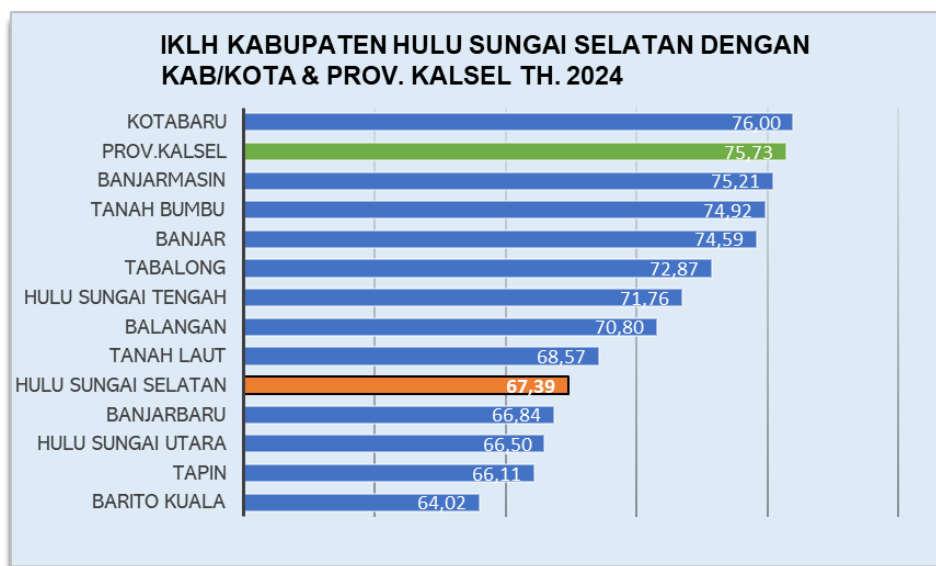
Sumber : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2024

Capaian nilai IKLH pada tahun 2024 sebesar 67,39 atau lebih rendah dari capaian provinsi Kalimantan selatan yaitu 73,55 dengan gap sebesar 6,16 sedangkan apabila dibandingkan terhadap IKLH secara nasional



dengan nilai 75.73 juga masih berada dibawahnya dengan selisih 8,43 poin.

Gambar 2.3.3.5.3 Grafik Perbandingan Capaian IKLH Kab. Hulu Sungai Selatan dengan Kab/Kota di Prov Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2024

Kegagalan pencapaian target IKLH dengan capaian sebesar 94,26% dapat di analisa berdasarkan capaian komponen penyusun Indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sesuai dengan gambaran tabel sebagai berikut

Gambar Tabel 2.3.3.5.4 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKLH Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
	IKLH	68,39	71,49	67,39	94,26%
1	IKA	64,40	66,36	56,92	85,77%
2	IKU	91,24	94,00	95,99	102,12%
3	IKTL	32,99	38,68	32,48	83,97%

Sumber : Data Bidang P3LH Disperakplh tahun 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komponen IKLH yang menyebabkan tidak tercapainya target IKLH pada tahun 2024 adalah kurangnya pencapaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu hanya sebesar 85,77% dan kurangnya capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)



dengan capaian hanya 83,97%. Sedangkan capaian untuk nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) telah melebihi target sebesar 102,12%. Pemantauan Kualitas Air telah dilakukan pada beberapa titik pada Anak Sungai S. Amandit, S. Masimpan dan S. Batang Alai yang diambil sampel airnya pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 9 lokasi dengan jumlah pengambilan 2 kali sehingga terdapat 18 sampel (data) kualitas air sungai pada Tahun 2024. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat peningkatan nilai parameter *Total Coliform* pada daerah hilir aliran sungai amandit. Tingginya nilai pencemar mikrobiologi total coliform disebabkan karena tingginya curah hujan sepanjang tahun 2024 mengakibatkan larutnya berbagai bahan pencemar terutama mikrobiologi dari limbah domestik langsung memasuki aliran badan Sungai Amandit. Penyebab lainnya karena kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair domestik untuk sanitasi dipemukiman dan permukiman serta fasilitas umum, khususnya yang terdapat di sepanjang bantaran Sungai Amandit.

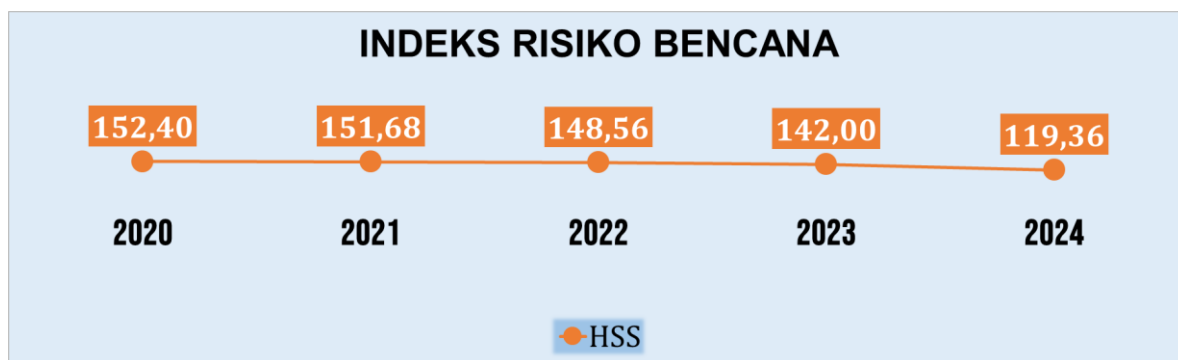
Rencana tindak lanjut mengatasi permasalahan di atas adalah melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait; PUTR, dan Dinas Kesehatan, untuk mencari solusi mengenai pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan di perumahan dan permukiman serta fasilitas umum, terutama yang berada di daerah sepanjang bantaran Sungai Amandit, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban sehat.

## 6) Indeks Risiko Bencana

Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi sebesar 119,36 dari target 135, atau pencapaian dari target sekitar **113,10%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ). Dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yang berada di angka 141,29, terdapat penurunan risiko yang signifikan, mencerminkan efektivitas upaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang dilakukan.

Pencapaian ini menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam mengurangi risiko bencana serta keberhasilan implementasi kebijakan yang mendukung ketahanan wilayah terhadap potensi ancaman bencana.

Gambar 2.3.3.6.1 Grafik Indeks Risiko Bencana Kab. Hulu Sungai Selatan 2020-2024



Sumber Data : Inarisk BNPB

Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari 142 pada tahun 2023 menjadi 119,36 pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam kesiapsiagaan, pengurangan risiko, serta efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan stakeholder terkait.

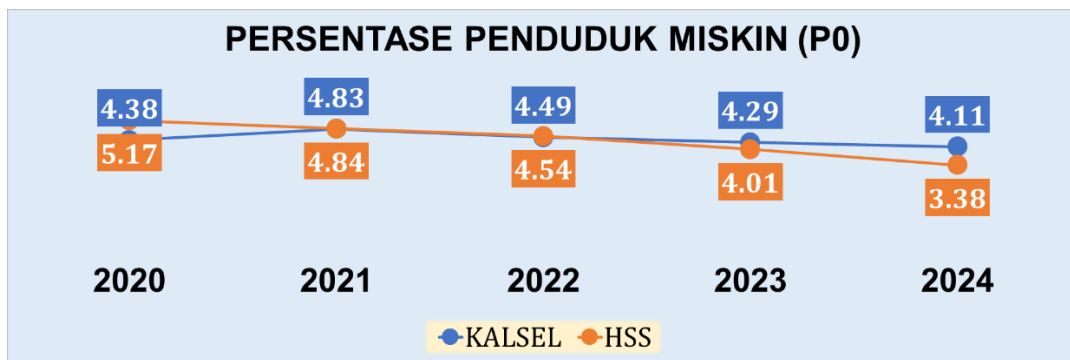
## Sasaran 2 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

### 7) Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan)

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 sebesar 4,54 %, sedangkan 2024 sebesar 3.38 % capaian **117,16%** dengan kategori capaian **Sangat Baik** :  $\geq 91\%$ . Terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1,16% dibanding tahun 2023. Angka ini lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Kalsel sebesar 4,29%, hal ini juga memenuhi capaian target dari RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026 sebesar 3.96%.

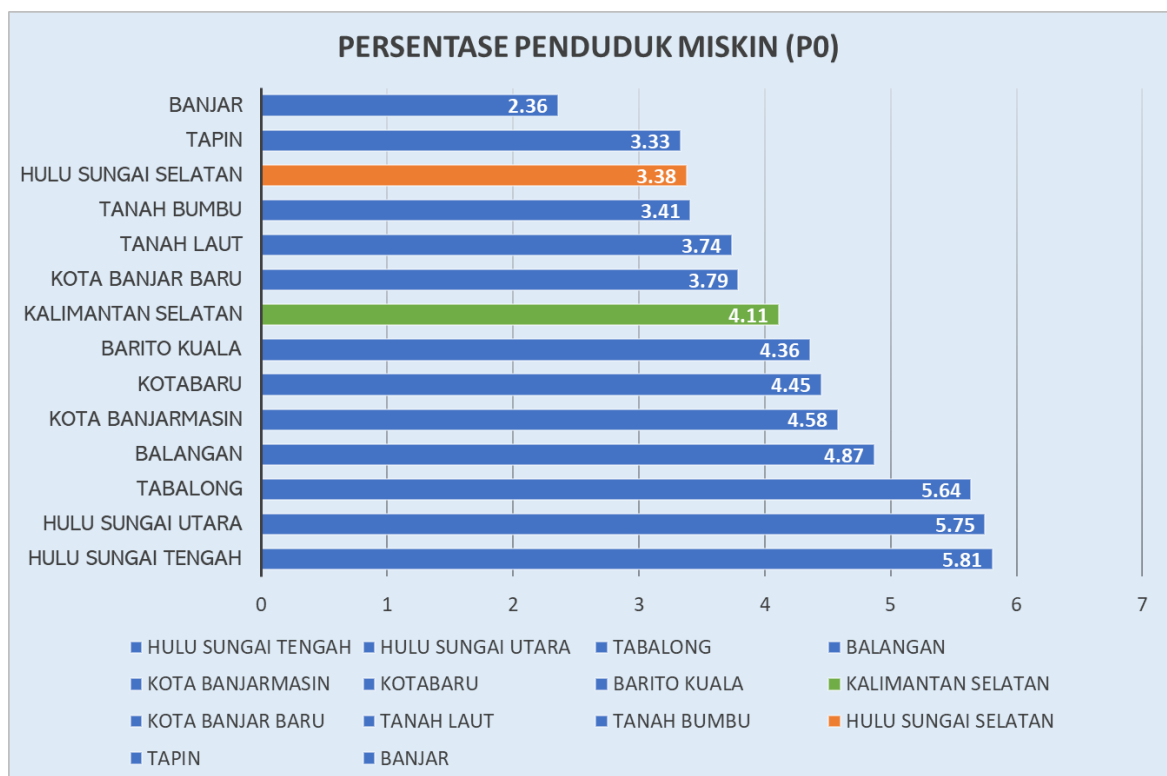
Gambar 2.3.3.7.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin (P0) Prov Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Selatan 2020-2024



Sumber Data : BPS Kalsel

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Persentase penduduk miskin (P0) di Hulu Sungai Selatan berada di urutan ke 3 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 2.3.3.7.2 Grafik Persentase Penduduk Miskin (P0) Prov Kalsel dan Kab/Kota 2024



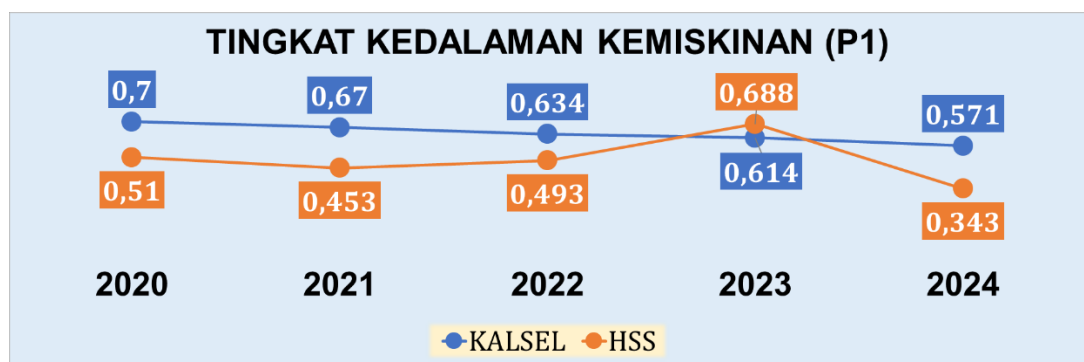
Sumber Data : BPS Kalsel

#### a. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Angka P1 di kabupaten HSS pada periode 2020-2022, lebih rendah dibandingkan Kalsel. Tren penurunan dari 0,51 (2020) ke 0,453 (2021) sebelum sedikit meningkat menjadi 0,493 di tahun 2022. P1 di tingkat Provinsi Kalsel lebih tinggi meskipun mengalami penurunan dari 0,7 ke 0,634 di periode yang sama.

Tahun 2023, HSS mengalami lonjakan signifikan ke 0,688, melampaui Kalsel yang justru turun ke 0,614, hal ini menunjukkan pemulihan yang lebih cepat. Tahun 2024 dengan berbagai strategi dan program pengentasan kemiskinan HSS kembali dapat menurunkan angka kedalaman penurunan menjadi 0,343, lebih baik dibandingkan angka Kalsel yakni 0,571.

Gambar 2.3.3.7.2 Grafik Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Prov Kalsel dan Kab/Kota 2024



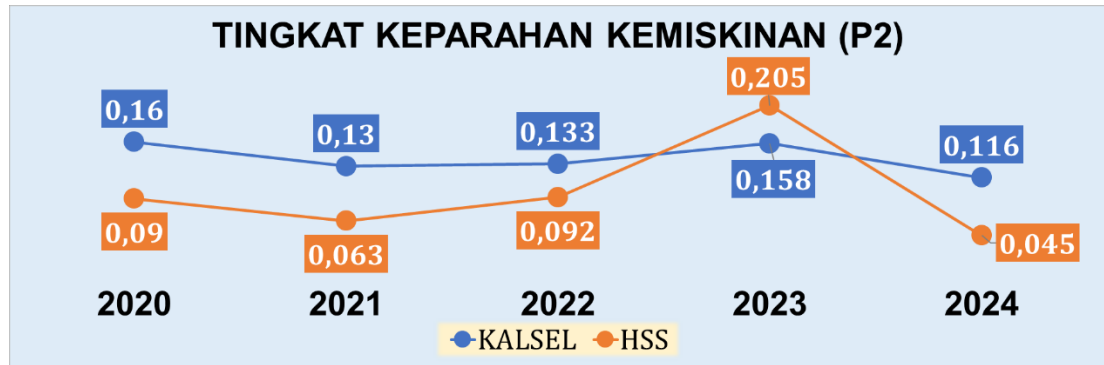
Sumber Data : BPS Kalsel

#### b. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Membandingkan angka P2 Kabupaten HSS dan Provinsi Kalsel tahun 2020-2024, terlihat bahwa P2 Kab.HSS umumnya lebih rendah dibandingkan Prov.Kalsel, kecuali pada tahun 2023, angka P2 HSS lebih tinggi dibanding Prov. Kalsel. Tahun 2024, angka P2 Kab.HSS turun menjadi 0,045 berada di bawah angka P2 Prov.Kalsel

Angka ini menunjukkan tingkat pengeluaran di antara penduduk miskin cukup homogen.

Gambar 2.3.3.7.3 Grafik Tingkat Keparahen Kemiskinan (P2)Prov  
Kalsel dan Kab/Kota 2024



Sumber Data : BPS Kalsel

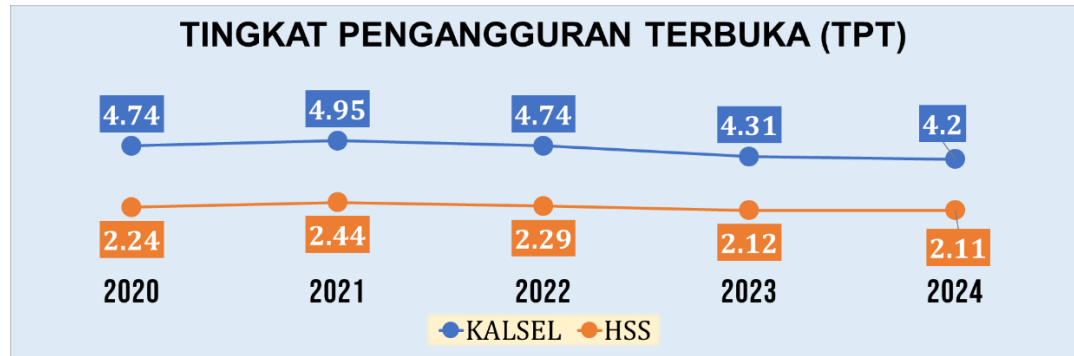
## 8) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,1%, sementara realisasi yang dicapai adalah 2,11%. Dengan capaian **100,47%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan sangat efektif, dengan realisasi yang hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data BPS Kab.HSS Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten HSS sebesar 2.11%. Hal ini menunjukkan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalsel yang mencapai 4.2%, dan paling rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalsel.

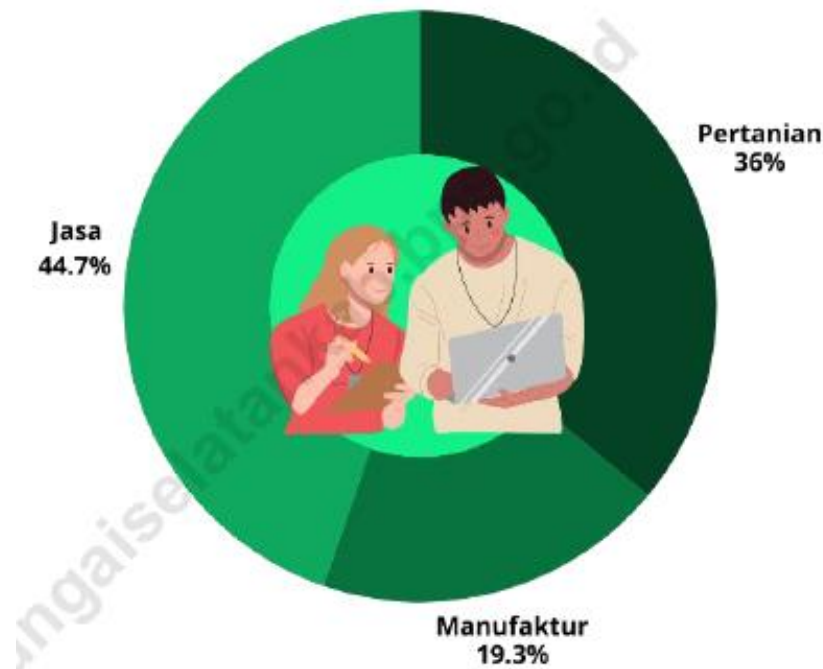
Gambar 2.3.3.8.1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Prov. Kalimantan Selatan 2024



Sumber Data : BPS Kalsel

Sektor pertanian dan Perkebunan menyerap tenaga kerja terbanyak di Kab.HSS, setelah sektor jasa (Data Sakernas 2023). Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah HSS yang merupakan daerah agraris. Secara keseluruhan, HSS menunjukkan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi warganya dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Kalsel.

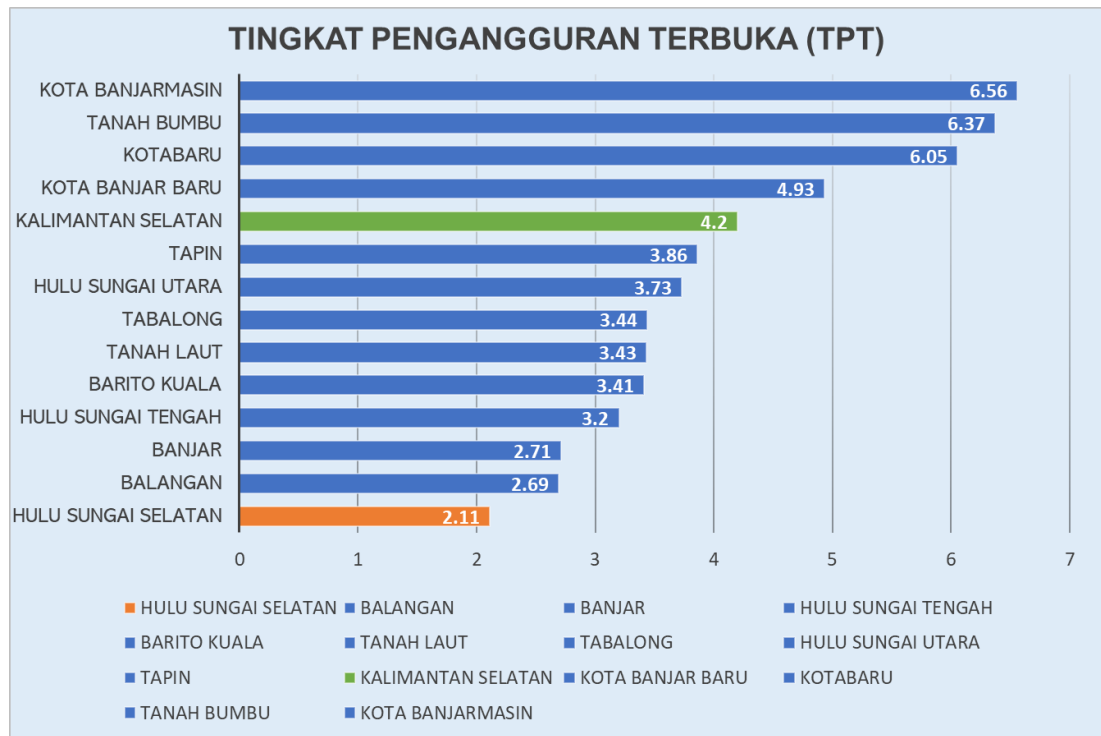
Gambar 2.3.3.8.2 Diagram Serapan Tenaga Kerja Tahun 2023



Sumber: Diolah Sakernas 2023, BPS Kab, HSS

Gambar 2.3.3.8.3 Grafik 2.3.3.18

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Prov. Kalimantan Selatan  
2024



Sumber Data : BPS Kalsel

## 9) Gini Rasio

Salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan penduduk adalah rasio gini. Indikator ini menunjukkan ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara satu sampai nol. Nilai Gini ratio mendekati 1, maka tingkat ketimpangan pendapatan semakin melebar. Nilai Gini ratio mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata. Secara umum angka Gini Ratio dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

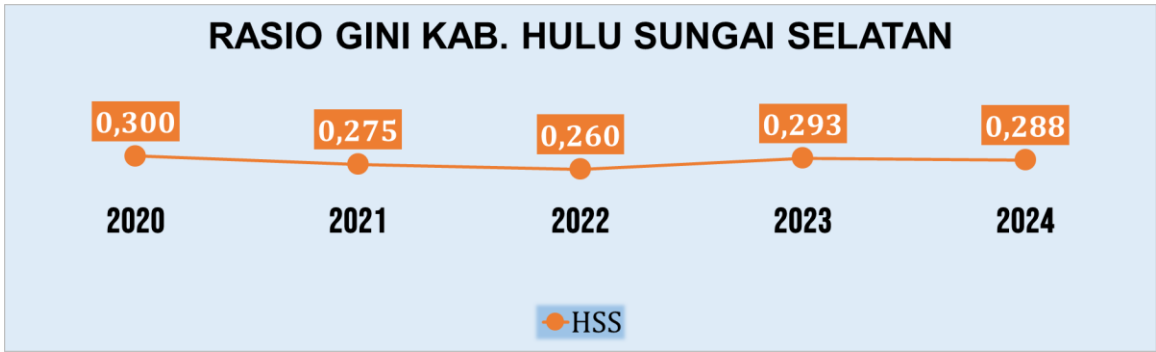
$0 < \text{Gini Ratio} \leq 0,35$  ketimpangan rendah

$0,35 < \text{Gini Ratio} \leq 0,50$  ketimpangan sedang

$\text{Gini Ratio} > 0,50$  ketimpangan tinggi

Target Rasio Gini Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2024 sebesar 0,257 dengan Realisasi Rasio Gini Kabupaten Hulu Sungai Selatan 0,288 Berdasarkan kategori maka capaian 89,24% masuk dalam kategori "Baik" (76 – 90,99%).

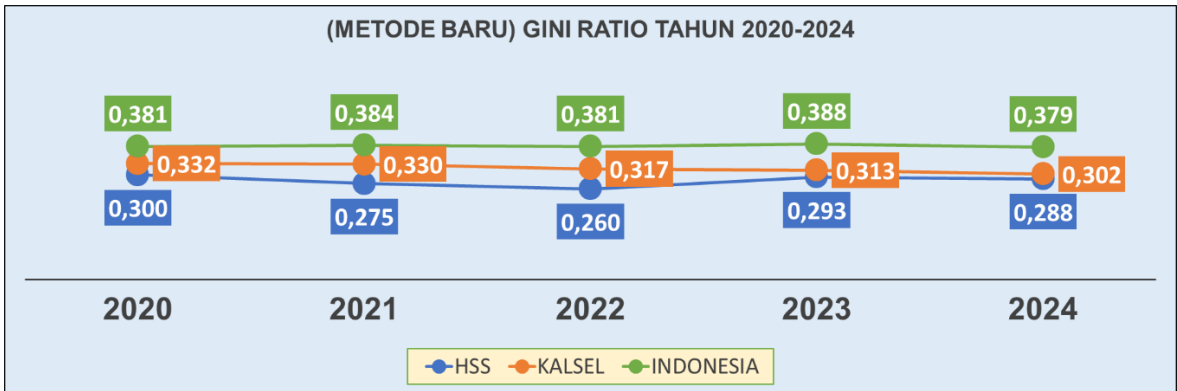
Gambar 2.3.3.9.1 Grafik Gini Rasio Kab. Hulu Sungai Selatan 2020-2024



Rasio Gini Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir. dari tahun 2020-2024, rasio gini Kab.HSS stabil berada pada kategori ketimpangan rendah.

Upaya pemerataan pendapatan yang dilakukan pemerintah terbukti mampu menjaga pemerataan pendapatan masyarakat.

Gambar 2.3.3.9.2 Grafik Gini Rasio Nasional, Prov Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Selatan 2020-2024



Sumber Data : BPS

Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, Rasio Gini di Kabupaten HSS lebih rendah, yang berarti ketimpangan pendapatan di Kab. HSS lebih kecil dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional.

Dari Grafik di atas dapat diketahui IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami laju pertumbuhan yang positif. Namun perkembangan ini masih dibawah angka IPM Provinsi Kalsel dan Nasional.

Perbandingan IPM kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, Rasio Gini di Kabupaten HSS selalu lebih rendah, yang berarti ketimpangan pendapatan di Kab. HSS relatif lebih kecil dibandingkan



tingkat provinsi maupun nasional. Kalimantan Selatan memiliki tren yang hampir mirip, dengan Rasio Gini yang menurun dari 0,332 (2020) ke 0,302 (2024), tetapi tetap lebih tinggi dari HSS. Sementara itu, secara nasional, Rasio Gini juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan di tahun 2023 hingga 0,388, sebelum menurun kembali menjadi 0,379 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten HSS lebih baik dibandingkan dengan skala Nasional, berarti pendapatan penduduk di Hulu Sungai Selatan cukup merata.

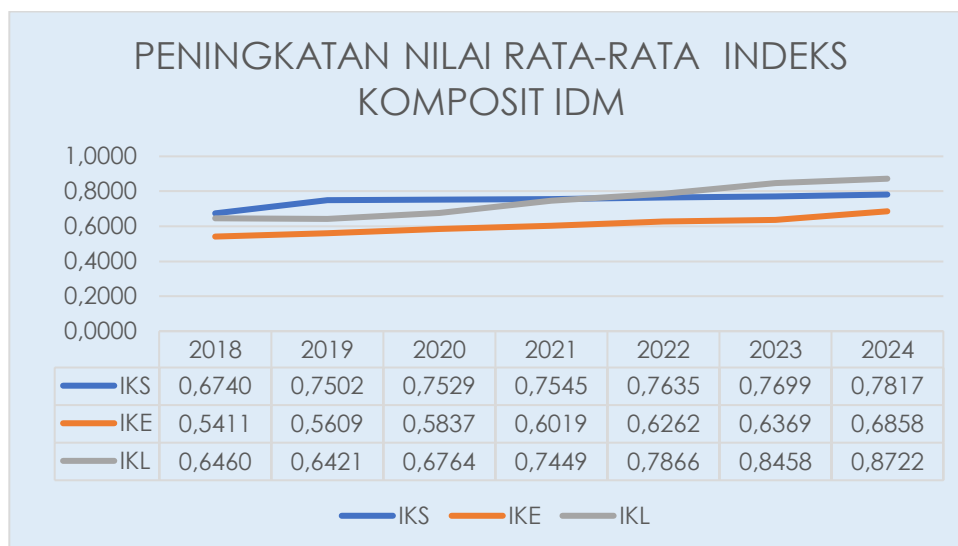
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan Dan Non Pangan

#### **10) Indeks Desa Membangun (IDM)**

Pada perkembangan nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dari awal pengukuran IDM tahun 2018 nilai rata-rata IDM adalah sebesar 0,6204 dengan setiap tahun terjadi peningkatan hingga di tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 0,1594 sehingga menjadi 0,7798. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,75, sementara realisasi yang dicapai adalah 0,77. Dengan capaian **102.6%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ).

Hasil pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2024 yaitu dengan nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 0,7817, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,6858 dan nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,8722 dengan rata-rata nilai IDM 0,7798 dengan kategori Desa Maju. Pada pengukuran ini juga ditetapkan desa dengan Status Desa Mandiri 47 Desa, Status Desa Maju 84 Desa dan Status Desa Berkembang 13 Desa.

Gambar 2.3.3.10.1 Grafik Capaian Rata-rata Nilai IKS, IKE, IKL Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2024



Sumber : Hasil Pengukuran IDM Dinas PMD Kab. HSS

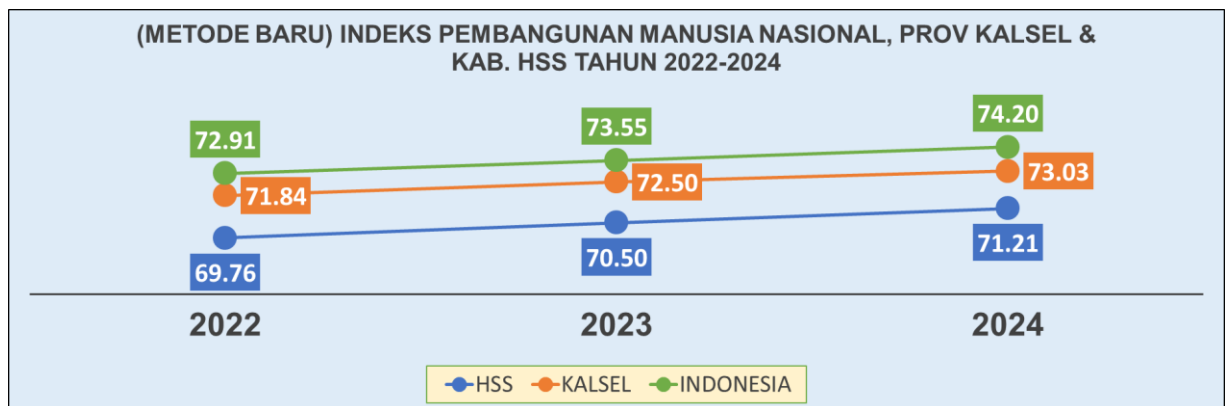
Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan yang positif, melebihi target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan keberhasilan dalam program pengembangan desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal peningkatan status desa ke mandiri baru dapat dicapai pada tahun 2021 yaitu sebanyak 3 desa berstatus mandiri hingga ditahun 2024 telah terdapat desa berstatus mandiri sebanyak 47 Desa atau sebesar 32,64% dari jumlah desa sebanyak 144 desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan upaya efektif dalam pembangunan desa. Pada 2024, IDM tercatat mencapai 0,77, sedikit melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 0,74. Kenaikan ini menunjukkan kemajuan dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Peningkatan yang stabil setiap tahunnya, mulai dari 0,67 pada 2020 hingga 0,77 pada 2024, menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas hidup warga desa dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten. Meskipun sudah melampaui target, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan angka ini masih perlu terus didorong untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang lebih merata.

### 11) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Tiga dimensi tersebut adalah, dimensi Pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi yang setiap tahunnya data IPM diperoleh dari hasil pengukuran oleh BPS. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 70,26, sementara realisasi yang dicapai 71,21. Dengan capaian **101,35%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ).

Gambar 2.3.3.11.1 Grafik Perkembangan IPM Nasional, Prov. Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2022-2024

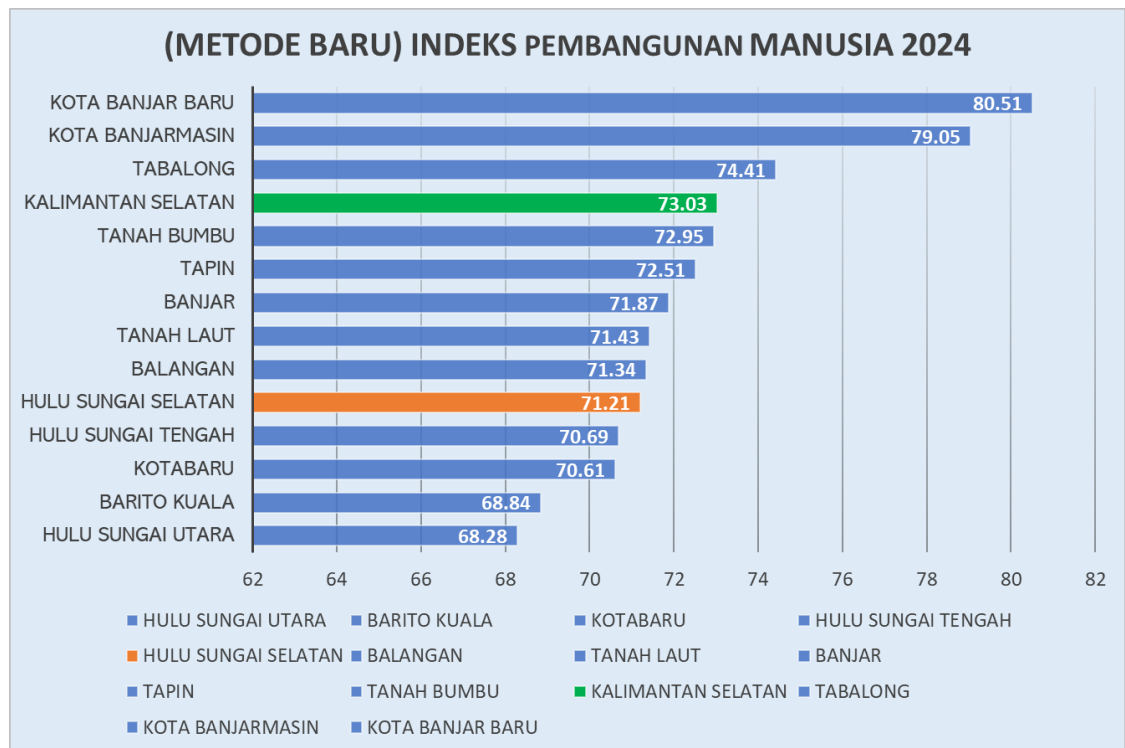


Sumber data : BPS Tahun 2024

Dari Grafik di atas dapat diketahui IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami laju pertumbuhan yang positif. Namun perkembangan ini masih dibawah angka IPM Provinsi Kalsel dan Nasional.

Perbandingan IPM kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 2.3.3.11.2 Grafik IPM Provinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber Data : BPS Kalimantan Selatan 2024

IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 mencapai 71,21 masih berada pada ranking 9 diantara 13 Kabupaten/Kota dan berada di bawah capaian Kab.Balangan dengan IPM 71,34.

Indeks Pembangunan Manusia di Hulu Sungai Selatan terus mengalami peningkatan. Selama periode 2022-2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022-2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup.

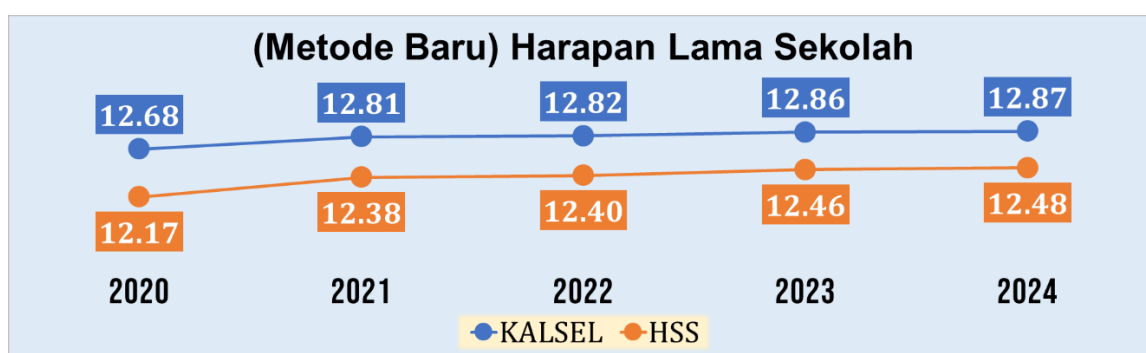
Program pemerintah daerah yang berfokus pada akses kesehatan yang lebih baik, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal menjadi faktor kunci dalam peningkatan ini ditunjang pula dengan upaya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dasar juga turut mendukung peningkatan kualitas hidup warga. Dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, diharapkan IPM di kawasan ini dapat terus meningkat dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

## 12) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang sejak usia 7 tahun hingga menyelesaikan pendidikan. HLS menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan bisa dicapai oleh seorang anak jika kondisi pendidikan di suatu wilayah tetap stabil. Semakin tinggi angka HLS, semakin baik akses dan kualitas pendidikan yang tersedia bagi penduduk di wilayah tersebut. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 12,60 tahun, sementara realisasi yang dicapai adalah 12,48 tahun. Dengan capaian **99,05%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ).

Meskipun realisasi sedikit di bawah target, pencapaian ini tetap menunjukkan bahwa akses dan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah cukup optimal, dengan rata-rata harapan lama sekolah yang mendekati target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.3.3.12.1 Grafik Perkembangan HLS antara Provinsi Kalsel dengan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024

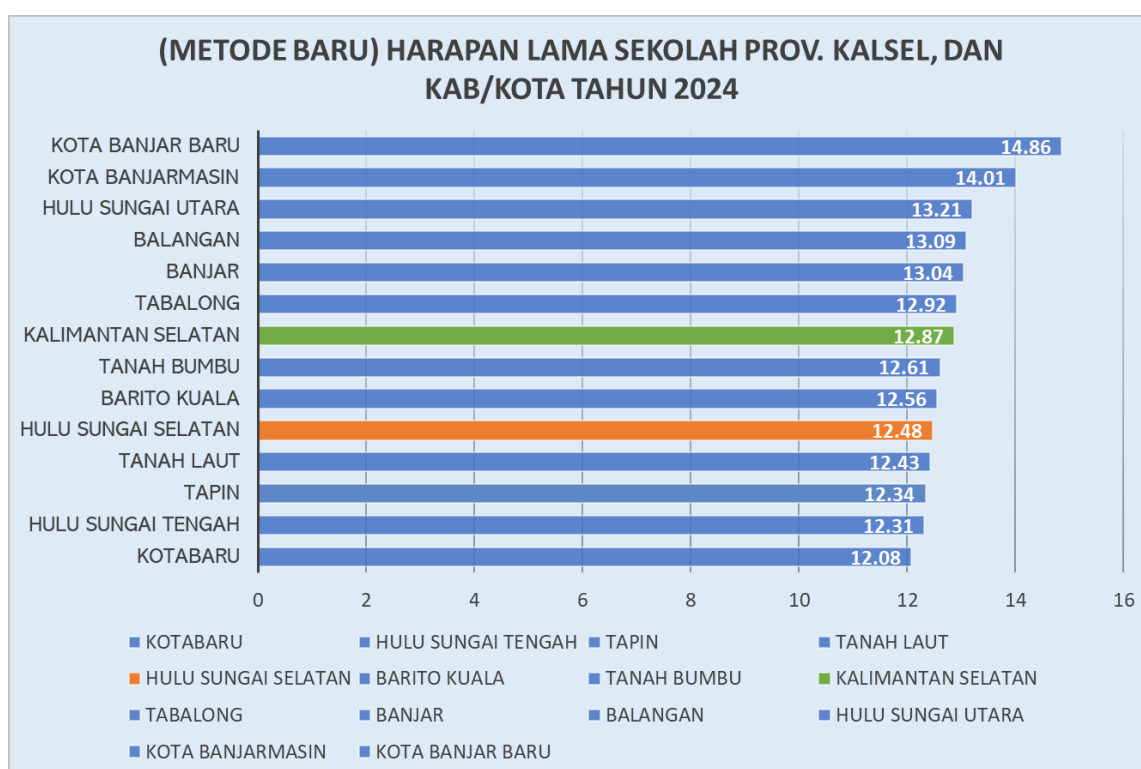


Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2020-2024. HLS di Kab. HSS meskipun lebih rendah dibandingkan dengan Prov. Kalsel, menunjukkan peningkatan yang stabil dari 12,17 tahun pada 2020 menjadi 12,48 tahun pada 2024. Sementara itu, HLS di Kalsel juga mengalami kenaikan tipis dari 12,68 tahun pada 2020 menjadi 12,87

tahun pada 2024. Meskipun perbedaan antara HSS dan Kalsel tidak terlalu besar, peningkatan yang konsisten di HSS mencerminkan perbaikan kualitas dan akses pendidikan yang terus berjalan. Agar bisa lebih mendekati angka HLS provinsi, HSS perlu terus fokus pada program pendidikan yang dapat meningkatkan lama pendidikan penduduknya, seperti memperluas akses dan meningkatkan kualitas sekolah di daerah-daerah yang lebih terpencil.

HLS digunakan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk melihat tingkat pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah.

Gambar 2.3.3.12.2 Grafik (Metode Baru) Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber Data : BPS Kalimantan Selatan 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada angka 12,48 tahun menunjukkan posisi yang cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Meskipun tidak tertinggi, angka ini lebih tinggi dari beberapa kabupaten seperti Kotabaru (12,08) dan Hulu Sungai Tengah (12,31), namun masih di bawah kota-kota besar seperti Kota Banjar Baru (14,86) dan Kota Banjarmasin (14,01). Peningkatan HLS di Hulu Sungai Selatan

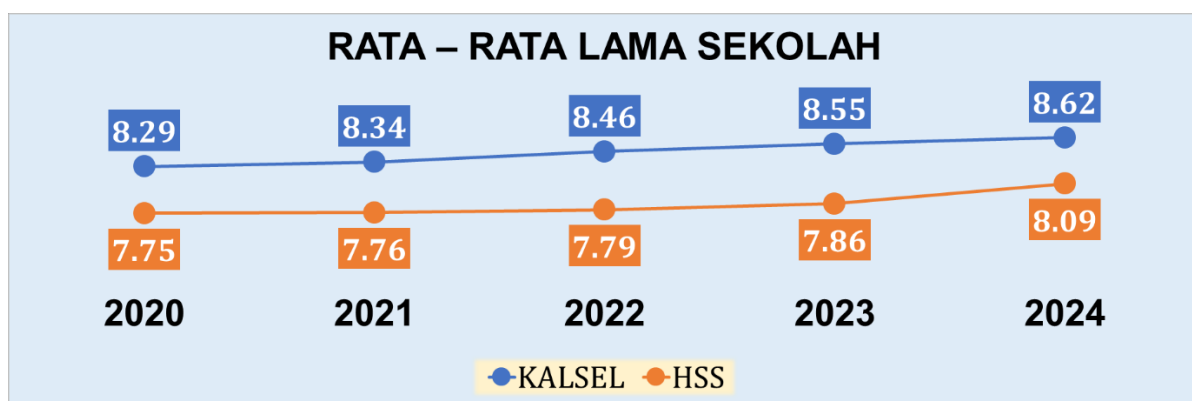
mencerminkan upaya yang terus dilakukan dalam memperbaiki akses dan kualitas pendidikan. Namun, untuk semakin mendekati angka yang ada di kota-kota besar, diperlukan penguatan lebih lanjut dalam sektor pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendidikan.

### 13) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 7,82 tahun, sementara realisasi yang dicapai adalah 8,09 tahun. Dengan capaian **103,45%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ). Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah tahun penduduk menempuh pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan keberhasilan dalam upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Gambar 2.3.3.13.1 Gambar Grafik Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalsel dan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024



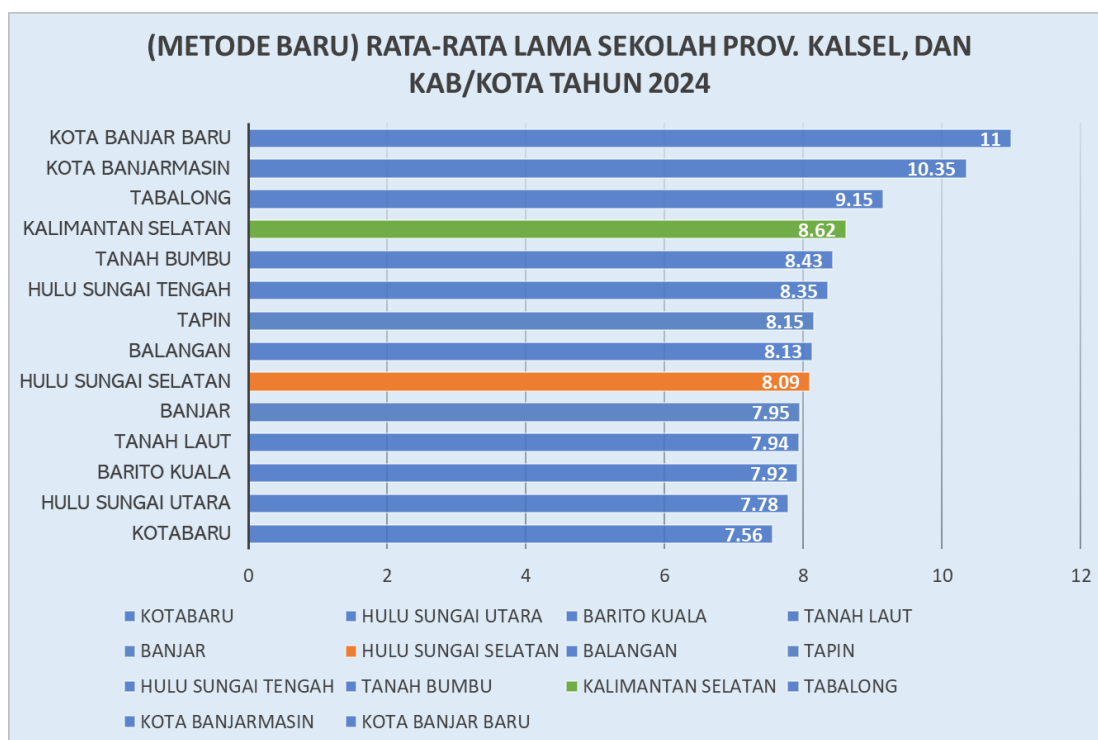
Sumber data : BPS tahun 2024

Data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun Kab. HSS masih berada di bawah Prov. Kalsel dalam hal pencapaian pendidikan. Pada 2020, RLS di Kab. HSS tercatat 7,75 tahun dan meningkat menjadi 8,09 tahun pada 2024. Sementara itu, RLS di Prov. Kalsel juga meningkat dari 8,29 tahun pada 2020 menjadi 8,62 tahun pada 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan di kedua wilayah, meskipun

perbedaan angka antara Prov. Kalsel dan Kab. HSS masih cukup signifikan. Dengan adanya peningkatan yang stabil, Kab. HSS berhasil menutup sedikit kesenjangan dengan Prov. Kalsel.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 24 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Pada Grafik di bawah ini disajikan RLS Provinsi Kalsel dan Kabupaten Kota tahun 2024.

Gambar 2.3.3.13.2 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber Data : BPS Kalimantan Selatan 2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebesar 8,09 tahun menunjukkan pencapaian yang cukup baik di tingkat provinsi Kalimantan Selatan, meskipun masih di bawah beberapa kabupaten dan kota lainnya. Angka ini mencerminkan bahwa penduduk dewasa di HSS rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP atau sebagian sudah mencapai pendidikan menengah atas. Dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki RLS sebesar 8,62 tahun, HSS masih memiliki ruang untuk meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan RLS di HSS dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang berhasil dalam

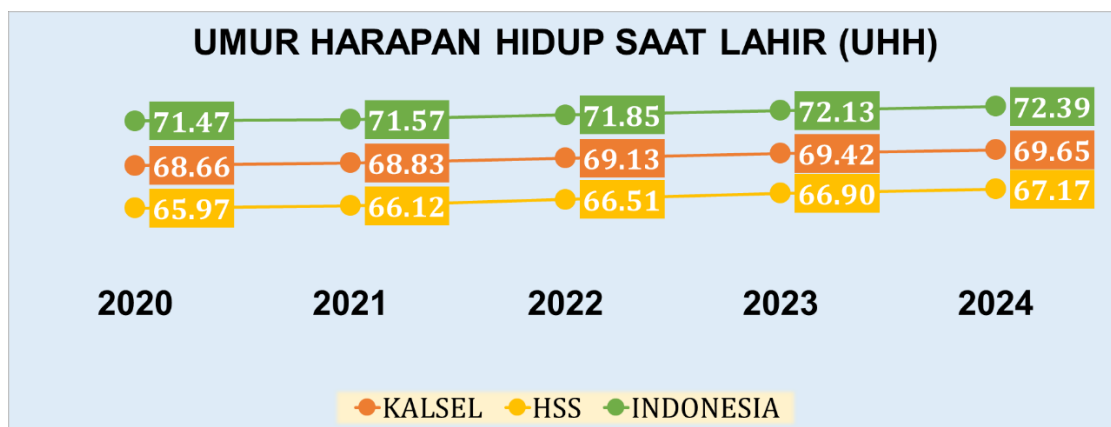


meningkatkan kualitas pendidikan, namun untuk mencapai angka yang lebih tinggi seperti di kota-kota besar seperti Banjarmasin 10.35 tahun dan Banjar Baru 11 tahun, diperlukan lebih banyak program yang mendukung akses pendidikan, terutama untuk daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan.

#### 14) Umur Harapan Hidup (UHH)

Dalam kehidupan masyarakat, indikator UHH memberikan banyak arti di berbagai aspek, UHH atau yang dikenal juga dengan istilah “Life Expectancy at Birth” merupakan rata - rata peluang hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. UHH bisa diartikan sebagai harapan atau umur yang dicapai seseorang yang lahir pada saat itu, UHH yang tinggi dapat disebabkan oleh membaiknya standar pelayanan kesehatan medis, diet sehat rendah kalori, jenis pekerjaan yang rendah resiko kematian dan polusi, tingkat kemakmuran yang tinggi, dan rutinitas olahraga. Sebaliknya, hal-hal yang dapat memperpendek usia diantaranya kegemukan, merokok, stress, pola hidup yang kurang baik serta kemiskinan.

Gambar 2.3.3.14.1 Grafik (Metode Baru) UHH Kab. HSS, Prov. Kalsel dan Nasional 2020-2024

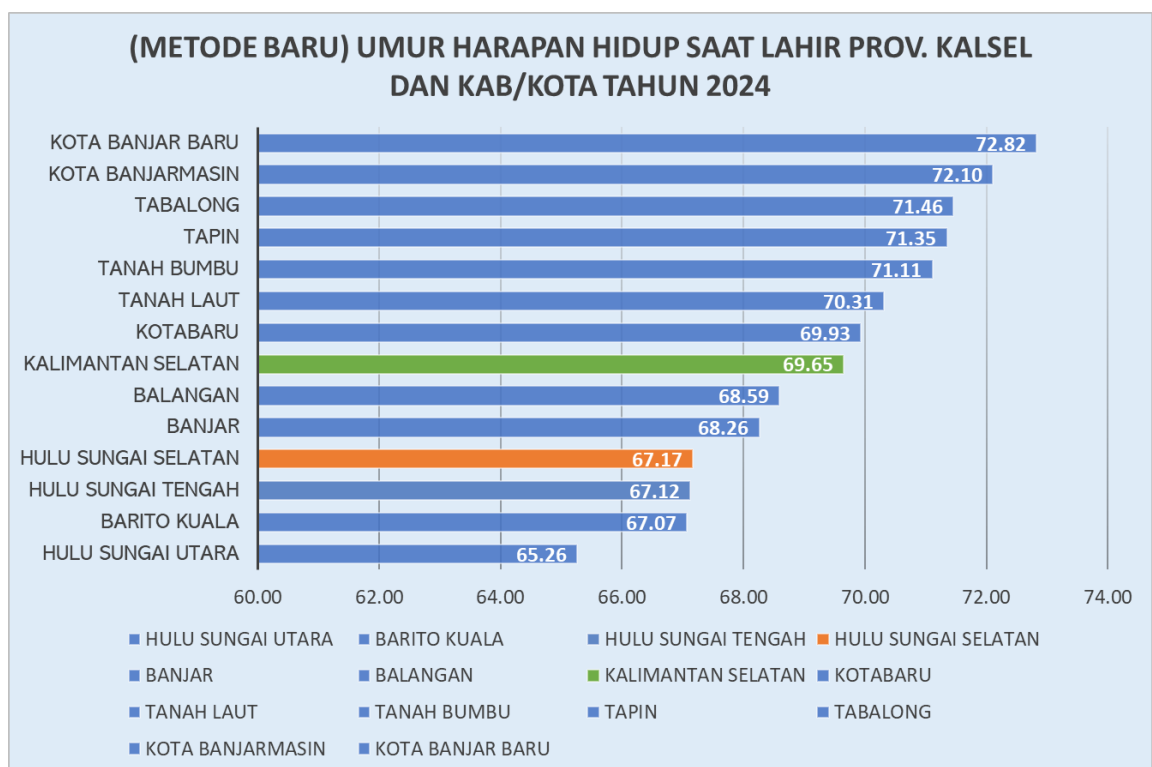


Sumber data : BPS tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, UHH di Kab.HSS menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, UHH di HSS tercatat sebesar 65.97 tahun dan meningkat menjadi 67.17 tahun pada 2024, dengan total kenaikan sekitar 1.2 tahun selama lima tahun. Peningkatan ini sejalan dengan tren yang terlihat pada tingkat provinsi Kalsel dan nasional.

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 66,72 tahun, realisasi yang dicapai adalah 72,82 tahun. Dengan capaian hasil **109,14%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ). Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diindikasikan oleh peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang lebih baik, serta pola hidup sehat yang semakin diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 2.3.3.14.2 Grafik (Metode Baru) UHH Prov. Kalsel dan Kab/Kota 2024



Sumber data : BPS tahun 2024

Perkembangan umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan angka yang relatif stabil dan sedikit meningkat, yaitu sebesar 67.17 tahun. Angka ini berada di bawah UHH provinsi Kalimantan Selatan sebesar 69.65 tahun. HSS berada dibawah Kab.Banjar 68,26 tahun.

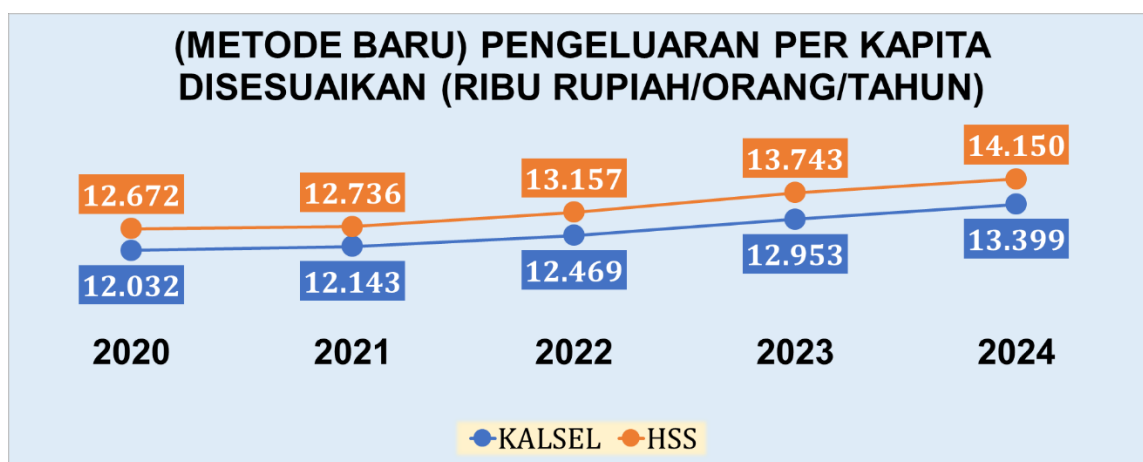
Kenaikan UHH mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, meskipun masih ada tantangan untuk

peningkatan UHH agar setaraa dengan kab/kota lain di provinsi Kalsel.

### 15) Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Pengeluaran Per Kapita adalah jumlah rata-rata uang yang dibelanjakan oleh setiap individu selama satu tahun. Pengeluaran ini mencakup berbagai kebutuhan seperti makanan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dan daya beli penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi angka pengeluaran per kapita, semakin besar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 13.413 ribu rupiah, realisasi yang dicapai adalah 14.150 ribu rupiah. Dengan perhitungan capaian diperoleh **105,49%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ).

Gambar 2.3.3.15.1 Grafik Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kab. HSS dan Prov. Kalsel 2020-2024



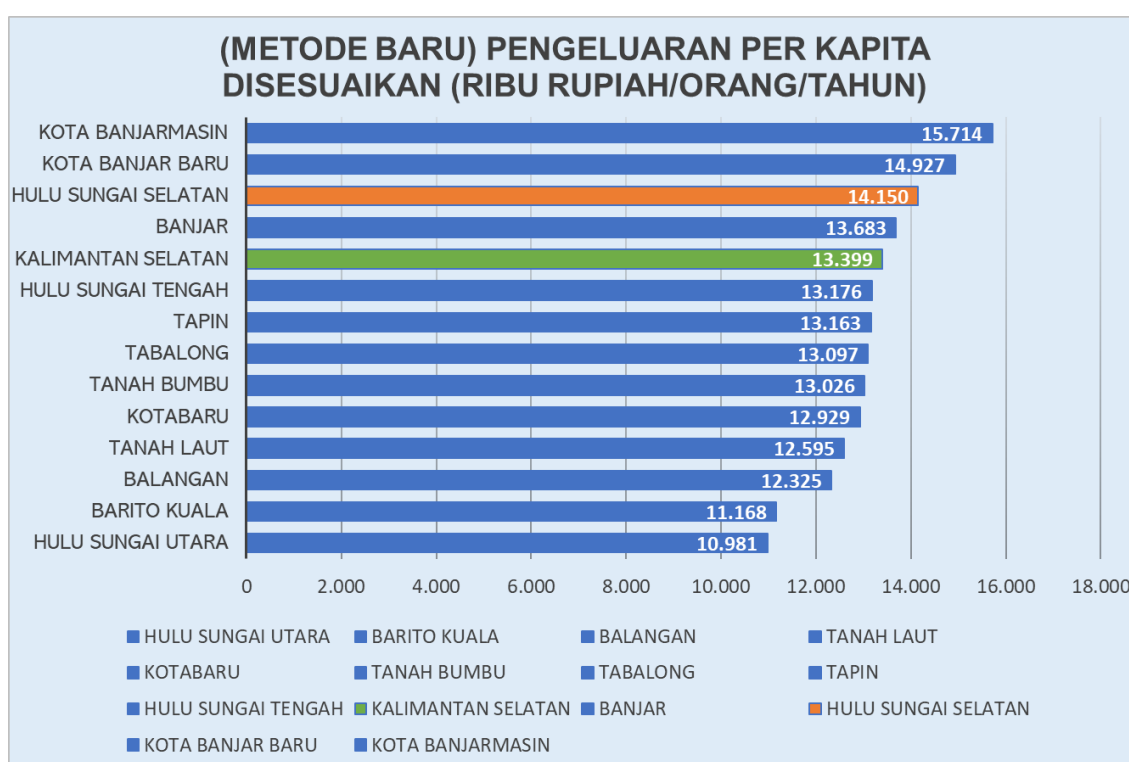
Sumber data : BPS tahun 2024

Berdasarkan data Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 12.672 ribu rupiah hingga mencapai 14.150 ribu rupiah pada periode terakhir. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kalimantan Selatan, yang juga mengalami peningkatan dari 12.032 ribu rupiah menjadi 13.399 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan daya beli masyarakat Hulu Sungai Selatan lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi. Dengan angka yang terus meningkat dan melebihi rata-rata

provinsi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan dan konsumsi masyarakat Hulu Sungai Selatan berada dalam kondisi yang relatif baik dan terus berkembang.

Capaian ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan pendapatan masyarakat, serta efektivitas program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan.

Gambar 2.3.3.15.2 Grafik Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kab/Kota dan Prov. Kalsel 2024



Sumber data : BPS tahun 2024

Konsumsi makanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih relatif tinggi. 51,70 persen konsumsi makanan ini dikategorikan kedalam 14 kelompok pengeluaran. Konsumsi makanan yang terbesar adalah untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi sebesar 21,64 persen. Kegemaran masyarakat HSS makan dan minum di luar rumah (warung makan/warung kopi), berkontribusi pada nilai konsumsi.. Setelah itu konsumsi yang besar lainnya adalah konsumsi pada padi-padian (6,46 persen) dan ikan/udang/cumi (6,40 persen). Kedua komoditas ini menjadi komoditas pokok. Padi-padian berupa beras, jagung, ubi dijadikan sebagai

makanan pokok masyarakat disini. Keberadaan sungai dan rawa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat penduduknya lebih banyak mengkonsumsi ikan karena lebih mudah untuk didapatkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat Pengeluaran per Kapita Disesuaikan sebesar 14.150 ribu rupiah per orang, menempatkannya sebagai wilayah dengan pengeluaran tertinggi ketiga di Kalimantan Selatan setelah Kota Banjar Baru (14.927 ribu rupiah) dan Kota Banjarmasin (15.714 ribu rupiah). Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang mencapai 13.399 ribu rupiah, mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif kuat. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Hulu Sungai Selatan memiliki tingkat konsumsi yang lebih baik, menunjukkan potensi ekonomi yang berkembang dan kualitas hidup yang lebih tinggi di wilayah ini.

#### **16) Indeks Literasi**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten adalah indikator yang mengukur tingkat literasi di suatu daerah berdasarkan akses terhadap bahan bacaan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, serta sarana dan prasarana pendukung. IPLM mencerminkan sejauh mana budaya membaca berkembang dalam masyarakat dan sejauh mana pemerintah daerah mendukung literasi melalui kebijakan serta fasilitas. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kualitas literasi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Berdasarkan data capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 38,95, sementara realisasi yang dicapai adalah **83,34**. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi IPLM Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari dua kali lipat dari target awal sebesar **213,97%**

Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil meningkatkan literasi masyarakat secara signifikan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini mencakup peningkatan akses terhadap bahan bacaan, program literasi yang efektif, serta

dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Kategori capaian **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ).

Tabel 2.3.3.16.1 Nilai IPLM Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

<b>Jumlah Penduduk</b> (BPS 2022)		<b>235.980</b>
<b>Jumlah Civitas Sekolah</b> (BPS 2022)		<b>44.264</b>
<b>Jumlah Civitas Akademika</b> (BPS 2022)		<b>1.646</b>
<b>Jumlah Kelembagaan</b> (BPS 2022)		<b>527</b>

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>		<b>83,34</b>	<b>Tinggi</b>
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,6679	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 67 persen dari standar
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	1,0000	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	1,0000	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)	0,1661	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 17 persen dari standar
5	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	1,0000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	1,0000	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
<b>Keterangan Standar:</b>			
UPLM1: Jumlah kelembagaan		UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan	
UPLM2: 2 x jumlah penduduk		UPLM6: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk		UPLM7: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM4: 2% dari jumlah penduduk			

Sumber : Laporan Akhir IPLM Perpustakaan RI Tahun 2024

Gambar 2.3.3.16.1 Grafik Nilai IPLM Kab/Kota Prov. Kalsel Tahun 2024



Sumber Data : Laporan Akhir IPLM Perpustakaan RI Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 81,16 dan masuk dalam kategori Tinggi. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kab. Balangan 94,94, Kota Banjarbaru 89,32, Kab. Tabalong 87,66 dan Kab. Hulu Sungai Selatan 83,34. Sedangkan tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Hulu Sungai Tengah 68,12; Kab. Tanah Laut 70,38; dan Kab. Banjar 71,80.

Tabel 2.3.3.16.2 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) pada Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan tahun 2024

PROVINSI/KAB/KOTA	Nilai TGM	Kategori
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	74,63	Sedang
Kab. Balangan	79,09	Tinggi
Kab. Banjar	81,16	Tinggi
Kab. Barito Kuala	68,24	Sedang
Kab. Hulu Sungai Selatan	83,27	Tinggi
Kab. Hulu Sungai Tengah	74,40	Sedang
Kab. Hulu Sungai Utara	68,83	Sedang
Kab. Kotabaru	70,14	Sedang
Kab. Tabalong	81,50	Tinggi
Kab. Tanah Bumbu	73,11	Sedang
Kab. Tanah Laut	73,07	Sedang
Kab. Tapin	70,28	Sedang
Kota Banjarbaru	73,92	Sedang
Kota Banjarmasin	69,90	Sedang

Sumber : Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024

Berdasarkan data yang diberikan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memiliki Nilai TGM (Tingkat Gemar Membaca) sebesar **83,27** pada tahun 2024. Dengan nilai ini, HSS masuk dalam kategori **Tinggi** dan menempati peringkat pertama di Kalimantan Selatan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

HSS menunjukkan tingkat kegemaran membaca yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang hanya 74,63 (kategori sedang). Keunggulan ini menunjukkan bahwa upaya literasi dan minat baca di HSS cukup berhasil, hal ini didukung oleh program perpustakaan daerah, komunitas literasi, serta akses terhadap bahan bacaan yang lebih baik.



## 17) Indeks Keamanan dan Ketertiban

Indeks Rawan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan suatu daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tingkat kabupaten atau kota. Indeks ini mencerminkan tingkat risiko terjadinya tindak kriminalitas, konflik sosial, serta gangguan ketertiban umum yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kenyamanan masyarakat.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan target Indeks Keamanan dan Ketertiban sebesar 0,70, namun berhasil mencapai realisasi sebesar 1,00. Pencapaian ini menunjukkan kondisi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada dalam kategori baik, dengan capaian **142,86%** kategori “**Sangat Baik**” :  $\geq 91\%$ .

Tabel 2.3.3.17.1 Indeks Keamanan dan Kab. Hulu Sungai Selatan 2024

Indeks Keamanan dan Ketertiban	Target 2024	Realisasi 2024
	0,70	1

Indeks ini penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Semakin tinggi indeks ini, semakin aman dan tertib suatu daerah.

## 18) Indeks Pembangunan Kebudayaan

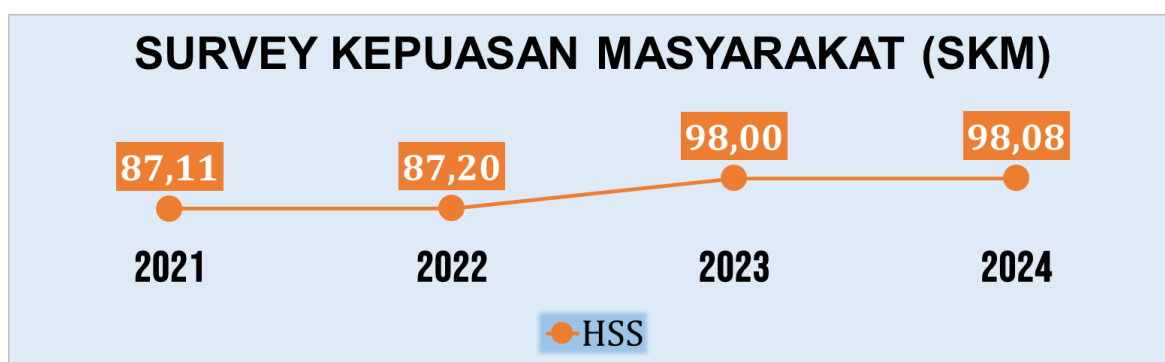
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan pelestarian kebudayaan di suatu daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Indeks ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai budaya, tradisi, dan ekspresi seni dijaga serta dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

IPK berfungsi sebagai alat evaluasi untuk melihat sejauh mana suatu daerah berhasil dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaannya. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kondisi pembangunan kebudayaan di daerah tersebut, yang berkontribusi pada identitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal.

## 19) Indeks Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten adalah instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah. Survey ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan, meningkatkan kinerja pemerintah, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 88,2, sementara realisasi yang dicapai adalah 98,08. Dengan perhitungan capaian hasil **111,19%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ).

Gambar 2.3.3.19.1 Grafik Survey Kepuasan Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021- 2024

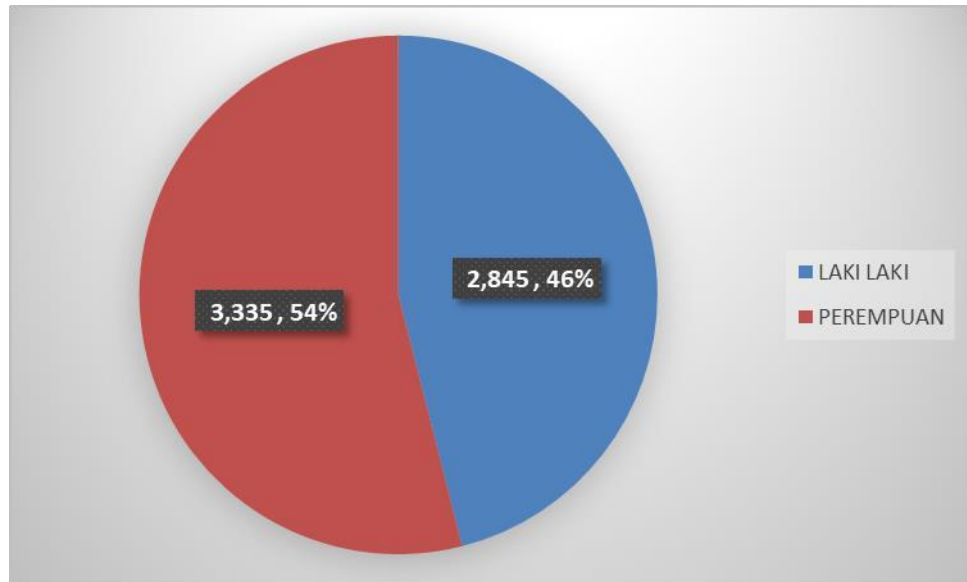


Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat tinggi, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator yang diukur biasanya mencakup prosedur, waktu, kualitas petugas, sarana prasarana, biaya, serta kenyamanan layanan. Hasil survey ini digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kuesioner yang terkumpul dari responden pada 66 (enam puluh enam) unit pelayanan dan dilakukan pengolahan data sesuai dengan jumlah sampel yang berhasil didapatkan yaitu sebanyak 6.180 (enam ribu seratus delapan puluh) kuesioner.

Gambar 2.3.3.19.2 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Dari diagram diatas dapat terlihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah responden dengan jenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 54% dari total responden sebanyak 6.180 (enam ribu seratus delapan puluh) orang.

Tabel 2.3.3.19.3 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Lingkup Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2024

No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
1	BAGIAN EKOBANG	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.990	3.936	3.963	3.900	3.990	3.965	3.900	3.982	98.94	A (Sangat Baik)	39	Online / Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Kesesuaian Pelayanan
2	BAGIAN HUKUM	Semester 2 (Agustus - Desember)	4.000	3.870	3.870	4.000	4.000	4.000	3.870	3.980	4.000	98.86	A (Sangat Baik)	29	Online / Manual	Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, dan Perilaku Petugas Pelayanan
3	BAGIAN PROKOPIM	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.771	3.870	3.987	3.987	3.936	3.968	3.936	3.968	3.987	98.36	A (Sangat Baik)	18	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, dan Kecepatan Pelayanan

No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
4	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.885	4.000	3.936	4.000	3.885	3.943	4.000	3.943	4.000	98.87	A (Sangat Baik)	87	Online / Manual	Keseuaian Pelayanan, Keseuaian Persyaratan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
5	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.838	3.990	3.990	3.875	3.968	3.900	3.875	3.990	98.38	A (Sangat Baik)	90	Online / Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana, Prosedur Pelayanan, dan Keseuaian Pelayanan
6	BAGIAN UMUM	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.833	3.710	3.833	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	98.10	A (Sangat Baik)	20	Online / Manual	Perilaku Petugas Pelayanan, Kompetensi Petugas, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
7	BAGIAN PEMERINTAHAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.863	3.863	3.990	3.710	4.000	3.990	3.863	4.000	97.97	A (Sangat Baik)	21	Online / Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana, Prosedur Pelayanan, dan Perilaku Petugas Pelayanan
8	BAGIAN ORGANISASI	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.839	3.990	3.839	3.990	3.771	3.990	3.990	3.771	3.990	97.70	A (Sangat Baik)	25	Online / Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana, Keseuaian Pelayanan, dan Prosedur Pelayanan
9	BPKPD	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.990	3.968	3.990	3.990	3.968	3.840	3.845	3.840	98.39	A (Sangat Baik)	150	Online / Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan
10	BAPPELITBANGDA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.970	3.990	3.960	3.910	3.910	3.880	3.880	3.830	98.11	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Penanganan Pengaduan, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Kompetensi Petugas
11	BKPSDM	Semester 2 (Agustus - Desember)	4.000	3.840	3.830	3.970	4.000	3.840	3.990	3.930	4.000	98.33	A (Sangat Baik)	280	Online / Manual	Kompetensi Petugas, Kecepatan Pelayanan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana

No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
12	DINAS KESEHATAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.970	4.000	3.771	3.830	3.936	3.970	3.871	3.871	4.000	97.83	A (Sangat Baik)	140	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Perilaku Petugas Pelayanan
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.780	3.840	3.936	3.960	3.990	3.960	3.936	3.990	3.960	98.20	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Keseuaian Persyaratan, Keseuaian Pelayanan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.936	3.936	3.936	3.936	3.840	3.840	3.990	4.000	3.913	98.13	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Kompetensi Petugas, Keseuaian Pelayanan, dan Kecepatan Pelayanan
15	DINAS PERHUBUNGAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.840	3.840	3.970	3.913	3.880	3.913	3.990	3.990	3.913	97.91	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana, Prosedur Pelayanan, dan Keseuaian Persyaratan
16	DINAS PERTANIAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	4.000	3.900	3.840	3.800	3.900	3.936	4.000	4.000	3.950	98.13	A (Sangat Baik)	20	Online / Manual	Keseuaian Biaya, Kecepatan Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan
17	DINAS PMD	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.771	3.900	4.000	3.800	3.930	3.936	3.913	3.913	4.000	97.67	A (Sangat Baik)	16	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas
18	DINAS PMPTSP	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.771	3.990	3.810	3.990	3.930	3.930	3.990	3.930	4.000	98.17	A (Sangat Baik)	383	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Keseuaian Biaya, dan Keseuaian Pelayanan
19	DINAS PPKBPPPA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.771	3.857	3.871	3.871	3.857	3.930	3.857	3.857	4.000	96.87	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kompetensi Petugas, dan Prosedur Pelayanan
20	DINAS SOSIAL	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.871	3.990	3.936	3.936	3.950	3.990	3.871	3.990	3.936	98.53	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Keseuaian Persyaratan, Kecepatan Pelayanan, dan Prosedur Pelayanan
21	DINAS PERDAGANGAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	3.850	3.710	3.850	3.850	3.990	3.850	3.990	3.936	96.49	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Keseuaian Biaya, Keseuaian Persyaratan, dan Prosedur Pelayanan

No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
22	DINAS KOMINFO	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	3.880	3.990	3.990	3.990	3.990	3.936	3.990	3.936	98.37	A (Sangat Baik)	13	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Kesesuaian Pelayanan, dan Prosedur Pelayanan
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.850	3.950	3.950	3.990	4.000	3.950	3.990	4.000	3.950	98.97	A (Sangat Baik)	217	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan, dan Kompetensi Petugas
24	DINAS DUKCAPIL	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	4.000	3.810	3.990	3.936	3.810	3.936	3.930	4.000	97.56	A (Sangat Baik)	152	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Kecepatan Pelayanan, dan Perilaku Petugas Pelayanan
25	DISPERA, KPLH	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.810	3.936	3.871	3.871	3.936	3.857	3.871	3.857	3.936	97.07	A (Sangat Baik)	60	Online / Manual	Kesesuaian Pelayanan, Prosedur Pelayanan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
26	INSPEKTORAT	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	3.990	3.936	3.990	3.936	3.936	3.936	3.936	3.990	98.22	A (Sangat Baik)	140	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, dan Kesesuaian Persyaratan
27	KECAMATAN ANGKINANG	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	3.850	3.710	3.990	3.850	3.710	3.990	3.990	4.000	96.67	A (Sangat Baik)	75	Online / Manual	Prosedur Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kecepatan Pelayanan
28	KECAMATAN DAHA BARAT	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.914	3.880	4.000	4.000	3.880	3.950	4.000	3.990	4.000	98.93	A (Sangat Baik)	22	Online / Manual	Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Prosedur Pelayanan
29	KECAMATAN DAHA SELATAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.914	3.950	4.000	4.000	3.950	4.000	3.950	4.000	3.950	99.21	A (Sangat Baik)	67	Online / Manual	Kompetensi Petugas, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Perilaku Petugas Pelayanan
30	KECAMATAN DAHA UTARA	Semester 2 (Agustus - Desember)	4.000	3.871	3.950	3.930	3.936	3.810	3.936	3.930	4.000	98.23	A (Sangat Baik)	32	Online / Manual	Kesesuaian Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan, dan Kecepatan Pelayanan

No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
31	KECAMATAN KALUMPANG	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.936	3.970	3.871	3.857	3.936	3.970	3.871	3.871	4.000	98.01	A (Sangat Baik)	26	Online / Manual 1	Kecepatan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
32	KECAMATAN LOKSADO	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	4.000	4.000	3.990	3.936	3.936	3.950	3.990	3.936	99.24	A (Sangat Baik)	35	Online / Manual 1	Kecepatan Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Penanganan Pengaduan
33	KECAMATAN PADANG BATUNG	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.850	3.850	3.936	3.936	4.000	3.710	3.936	3.936	3.936	97.47	A (Sangat Baik)	90	Online / Manual 1	Kesesuaian Persyaratan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas
34	KECAMATAN SUNGAI RAYA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.936	4.000	3.936	3.936	3.936	3.950	4.000	3.990	4.000	99.12	A (Sangat Baik)	27	Online / Manual 1	Kualitas Sarana dan Prasarana, Kesesuaian Persyaratan, dan Kecepatan Pelayanan
35	KECAMATAN SIMPUR	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.950	3.990	3.990	3.990	3.990	3.857	3.936	3.930	3.936	98.80	A (Sangat Baik)	24	Online / Manual 1	Kesesuaian Pelayanan, Prosedur Pelayanan, dan Kesesuaian Persyaratan
36	KECAMATAN TELAGA LANGSAT	Semester 2 (Agustus - Desember)	4.000	3.857	4.000	3.930	4.000	3.936	3.936	3.857	4.000	98.66	A (Sangat Baik)	56	Online / Manual 1	Kualitas Sarana dan Prasarana, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan
37	KECAMATAN KANDANGAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.936	3.970	3.871	3.871	4.000	4.000	4.000	3.990	3.936	98.82	A (Sangat Baik)	253	Online / Manual 1	Kecepatan Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas
38	KELURAHAN JAMBU HILIR	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	4.000	4.000	3.990	3.950	3.936	3.936	3.936	4.000	99.27	A (Sangat Baik)	30	Online / Manual 1	Kompetensi Petugas, Kesesuaian Persyaratan, dan Kesesuaian Pelayanan
39	KELURAHAN KANDANGAN BARAT	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.850	3.871	3.936	3.871	3.936	4.000	3.850	3.990	3.936	97.89	A (Sangat Baik)	23	Online / Manual 1	Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana

No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
40	KELURAHAN KANDANGAN KOTA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.936	4.000	3.990	3.990	3.936	3.990	3.990	4.000	3.950	99.39	A (Sangat Baik)	35	Online / Manual	Kesesuaian Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan, dan Kompetensi Petugas
41	KELURAHAN KANDANGAN UTARA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.871	4.000	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.710	3.829	97.67	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas
42	PKM BAJAYAU	Semester 2 (Agustus - Desember)	4.000	3.930	3.930	3.871	3.936	3.930	3.936	3.930	4.000	98.51	A (Sangat Baik)	36	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas
43	PKM BAMBAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.936	3.970	3.871	3.871	4.000	3.857	3.936	3.857	4.000	98.05	A (Sangat Baik)	55	Online / Manual	Penanganan Pengaduan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kecepatan Pelayanan
44	PKM BARUH JAYA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	4.000	3.936	3.990	3.936	3.990	3.950	3.990	4.000	99.39	A (Sangat Baik)	205	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Kecepatan Pelayanan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
45	PKM BATANG KULUR	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.850	3.850	4.000	3.936	4.000	4.000	3.990	4.000	3.936	98.78	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian Pelayanan, dan Prosedur Pelayanan
46	PKM BAYANAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.936	4.000	3.936	3.936	3.950	3.990	4.000	3.990	4.000	99.27	A (Sangat Baik)	92	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian Pelayanan, dan Kesesuaian Persyaratan
47	PKM GAMBAH	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.950	4.000	3.936	3.950	3.950	3.936	3.950	4.000	3.950	98.95	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Kesesuaian Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kecepatan Pelayanan
48	PKM JAMBU HILIR	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	4.000	3.936	3.810	3.936	3.930	4.000	3.930	4.000	97.92	A (Sangat Baik)	152	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan, dan Prosedur Pelayanan



No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
49	PKM KALIRING	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.539	3.936	3.936	3.970	3.871	3.857	3.936	3.857	3.930	96.76	A (Sangat Baik)	90	Online / Manual 1	Kesesuaian Persyaratan, Kesesuaian Pelayanan, dan Kompetensi Petugas
50	PKM KALUMPANG	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.539	3.871	3.990	3.871	3.936	3.990	3.990	3.990	4.000	97.71	A (Sangat Baik)	73	Online / Manual 1	Perilaku Petugas Pelayanan, Kesesuaian Pelayanan, dan Kecepatan Pelayanan
51	PKM KANDANGAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.539	3.850	3.850	3.710	4.000	3.936	4.000	4.000	4.000	96.90	A (Sangat Baik)	80	Online / Manual 1	Prosedur Pelayanan, Penanganan Pengaduan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
52	PKM LOKSADO	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	3.880	3.880	3.880	3.990	3.880	3.950	3.990	3.880	97.33	A (Sangat Baik)	30	Online / Manual 1	Kesesuaian Persyaratan, Kecepatan Pelayanan, dan Prosedur Pelayanan
53	PKM MALINAU	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.539	3.950	3.950	3.936	3.936	3.936	3.950	3.950	3.950	97.49	A (Sangat Baik)	50	Online / Manual 1	Kesesuaian Persyaratan, Kecepatan Pelayanan, dan Kesesuaian Pelayanan
54	PKM NEGARA	Semester 2 (Agustus - Desember)	4.000	3.880	3.936	3.970	3.810	3.936	3.930	3.970	3.425	96.83	A (Sangat Baik)	80	Online / Manual 1	Kualitas Sarana dan Prasarana, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Kecepatan Pelayanan
55	PKM PADANG BATUNG	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.936	3.970	3.880	3.936	3.970	3.871	3.857	3.936	3.000	95.43	A (Sangat Baik)	32	Online / Manual 1	Kualitas Sarana dan Prasarana, Kompetensi Petugas, dan Kesesuaian Pelayanan
56	PKM PASUNGKAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.970	4.000	3.990	4.000	4.000	3.990	4.000	3.465	98.35	A (Sangat Baik)	297	Online / Manual 1	Penanganan Pengaduan, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
57	PKM SUNGAI PINANG	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.850	3.850	3.936	3.850	3.710	3.936	3.936	3.936	3.739	96.51	A (Sangat Baik)	92	Online / Manual 1	Kesesuaian Persyaratan, Kecepatan Pelayanan, dan Kompetensi Petugas Pelayanan

No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
58	PKM SIMPUR	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.936	4.000	3.880	4.000	3.936	3.990	4.000	3.525	97.94	A (Sangat Baik)	80	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan, dan Kesesuaian Pelayanan
59	PKM SUNGAI RAYA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.950	4.000	3.950	3.950	4.000	3.936	4.000	3.950	3.364	97.50	A (Sangat Baik)	101	Online / Manual	Kesesuaian Pelayanan, Penanganan Pengaduan Prosedur Pelayanan
60	PKM TELAGA LANGSAT	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.810	3.930	3.810	3.810	3.950	3.810	3.810	3.930	4.000	96.83	A (Sangat Baik)	86	Online / Manual	Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan, dan Prosedur Pelayanan
61	PKM WASAH	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.810	3.871	3.710	3.871	3.871	3.810	3.871	3.857	3.930	96.11	A (Sangat Baik)	160	Online / Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana, Kesesuaian Persyaratan, dan Prosedur Pelayanan
62	RSUD BHHB	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	3.990	3.936	3.810	3.990	3.936	4.000	3.871	4.000	97.90	A (Sangat Baik)	379	Online / Manual	Kesesuaian Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan, dan Kecepatan Pelayanan
63	RSUD DAHA SEJAHTERA	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.950	3.936	3.990	3.936	3.950	3.936	3.950	3.936	98.82	A (Sangat Baik)	75	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Kompetensi Petugas, dan Kualitas Sarana dan Prasarana
64	DINAS PERIKANAN	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.936	3.950	3.936	3.950	3.990	3.950	3.936	3.950	98.86	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Kesesuaian Biaya
65	DINAS PUTR	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.710	3.990	3.990	3.990	3.936	3.990	3.990	3.990	3.990	98.82	A (Sangat Baik)	40	Online / Manual	Kesesuaian Persyaratan, Kualitas Sarana dan Prasarana, dan Perilaku Petugas Pelayanan
66	BPBD	Semester 2 (Agustus - Desember)	3.990	3.990	3.990	3.880	3.880	3.990	3.990	3.990	3.880	98.83	A (Sangat Baik)	100	Online / Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, dan Perilaku Petugas Pelayanan
	JUMLAH		255.236	259.349	258.694	259.371	259.458	259.533	260.357	260.099	258.287	6473.291				

No	Unit Pelayanan	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayanan									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
	RATA - RATA		3.867	3.930	3.920	3.930	3.931	3.932	3.945	3.941	3.913	98.08	A (Sangat Baik)			
			96.68	98.24	97.99	98.25	98.28	98.31	98.62	98.52	97.84					

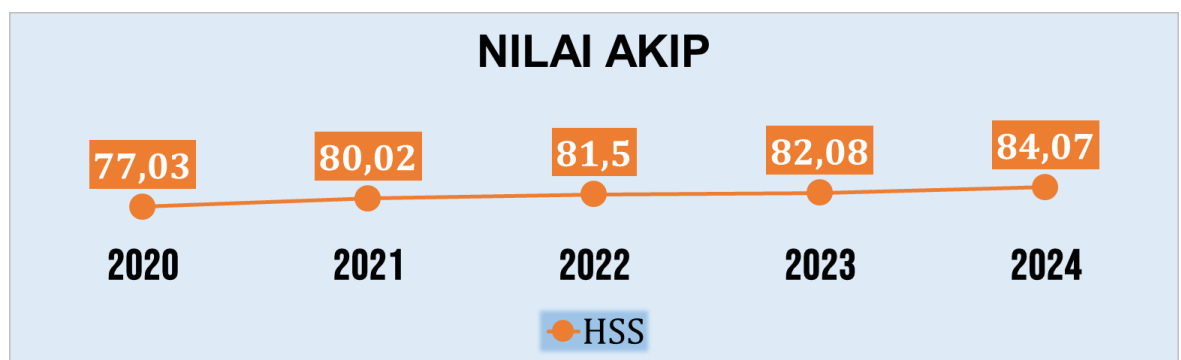
Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan pada kuesioner diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 98,08 dengan Nilai Interval Konversi (NIK) 88,31 – 100,00, mutu pelayanan A, kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**.

## 20) SAKIP

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur dan melaporkan kinerja instansi pemerintah, termasuk di tingkat kabupaten. SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau program yang dijalankan oleh pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang jelas, dapat diukur hasilnya, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar A, dan realisasi yang dicapai juga sebesar A. Dengan capaian tersebut, maka persentase pencapaian adalah **100%**, yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah sudah sangat baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ).

Gambar 2.3.3.20.1 Grafik Realisasi Nilai AKIP Tahun 2020-2024 Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber Data : Kemen PAN RB, Data diolah Tahun 2024

Capaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengelola anggaran dan program kerja dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

SAKIP juga menjadi dasar untuk penilaian kinerja pemerintah daerah dalam laporan tahunan dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## 21) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen kinerja, penguatan organisasi, akuntabilitas, pelayanan publik, serta efektivitas kebijakan reformasi.

Tabel 2.3.3.21.1 Realisasi Dan Target Indeks RB Tahun 2020-2024

REALISASI					TARGET RPD
2020	2021	2022	2023	2024	2024
B (66.22)	B (66.81)	BB (70.45)	BB (80.11)	AA (91,25)	A

Sumber Data : Kemen PANRB, Data diolah Tahun 2024

Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, kategori penilaian masih berada di tingkat B, dengan skor masing-masing 66,22 dan 66,81, yang mencerminkan upaya awal dalam perbaikan birokrasi. Kemajuan mulai terlihat lebih jelas pada tahun 2022 dengan kenaikan skor menjadi 70,45, masuk dalam kategori BB, yang menandakan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan skor 80,11, tetap dalam kategori BB, tetapi mendekati standar yang lebih tinggi. Puncaknya, pada tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil mencapai kategori A dengan skor 91,25, dengan kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ), yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan secara optimal dengan sistem pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan

efisien. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat dalam membangun birokrasi yang profesional serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

## 22) Indeks Sistem Merit ASN

Indeks Sistem Merit ASN (Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 275, sementara realisasi yang dicapai adalah 267,5. Dengan capaian hasil **97,27%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian, angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ). Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah hampir mencapai target yang ditetapkan, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan seleksi, penempatan, dan pengembangan ASN dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, tanpa ada intervensi yang bersifat subjektif.

Tabel 2.3.3.22.1 Realisasi Dan Target Nilai Indeks Sistem Merit Tahun 2021-2024

REALISASI				TARGET PK	TARGET RPD
2021	2022	2023	2024	2024	2024
148,5	219	262,5	267,5	275	285

## 23) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah indikator yang mengukur sejauh mana suatu daerah mengembangkan dan menerapkan kebijakan, program, serta layanan inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti inovasi dalam pelayanan publik, kebijakan publik, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Daerah dengan indeks inovasi yang tinggi menunjukkan kemampuan dalam menciptakan solusi kreatif untuk permasalahan sosial dan ekonomi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 70,07, realisasi yang dicapai adalah 73,15. Dengan capaian hasil **104,38%**. Berdasarkan kategori penilaian capaian,

angka tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik** ( $\geq 91\%$ ).

Gambar 2.3.3.23.1 Tabel Indeks Inovasi Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023-2024

REALISASI		TARGET
2023	2024	2024
62,47	73,15	70,07

Capaian ini menunjukkan bahwa inovasi yang diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

## 2.3.4 Akuntabilitas Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan & pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan

### 2.3.4.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari sasaran strategis yang dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan Efisiensi jika Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Indramayu telah tercapai/melebihi target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati dan terdapat sisa anggaran yang sudah digunakan. Berikut analisis efisiensi yang dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai :

Tabel 2.3.4.1.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Hasil (Kinerja) Yang Dicapai Tahun 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
1.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.433.183.900	1.255.331.634	177.852.266	12,41
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.852.500	200.216.230	33.636.270	14,38

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
3.	Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	696.847.335	645.797.455	51.049.880	7,33
4.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	16.214.800	11.817.300	4.397.500	27,12
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.691.467.290	4.620.240.337	71.226.953	1,52
6.	Pengembangan Ekspor	1.866.691.600	1.792.908.874	73.782.726	3,95
7.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.000.000	34.964.612	2.035.388	5,50
8.	Program Promosi Penanaman Modal	135.300.000	87.609.972	47.690.028	35,25
9.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	447.247.650	402.066.625	45.181.025	10,10
10.	Program Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	292.275.280	255.883.976	36.391.304	12,45
11.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.000.802.480	1.657.194.013	343.608.467	17,17
12.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.074.210.370	4.337.508.100	736.702.270	14,52
13.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	337.619.800	306.393.500	31.226.300	9,25
14.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	883.465.900	827.034.720	56.431.180	6,39
15.	Program Perizinan Usaha Pertanian	97.802.750	89.805.200	7.997.550	8,18
16.	Program Penyuluhan Pertanian	438.128.900	424.186.500	13.942.400	3,18
17.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	661.420.250	486.955.000	174.465.250	26,38
18.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	895.614.530	860.977.825	34.636.705	3,87
19.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.119.418.000	862.587.400	256.830.600	22,94
20.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	79.017.500	78.928.050	89.450	0,11
21.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.178.299.535	893.468.372	284.831.163	24,17
22.	Program Pemasaran Pariwisata	1.073.532.750	882.298.254	191.234.496	17,81
23.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	148.390.000	79.390.000	69.000.000	46,50
24.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30.086.793.380	28.669.139.885	1.417.653.495	4,71
25.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.044.474.401	20.940.024.494	104.449.907	0,50
26.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.464.146.869	16.011.512.805	452.634.064	2,75
27.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.155.507.000	3.098.841.241	56.665.759	1,80
28.	Program Penataan Bangunan Gedung	166.874.743.080	160.090.150.551	6.784.592.529	4,07
29.	Program Penyelenggaraan Jalan	116.884.844.037	113.892.931.614	2.991.912.423	2,56
30.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.365.378.800	800.063.656	565.315.144	41,40
31.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.619.755.500	815.798.026	803.957.474	49,63
32.	Program Pengembangan Perumahan	219.798.750	167.781.803	52.016.947	23,67
33.	Program Kawasan Pemukiman	1.727.661.000	1.626.551.976	101.109.024	5,85
34.	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	15.163.940.000	14.089.840.975	1.074.099.025	7,08
35.	Program Peningkatan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum (PSU)	12.805.030.188	11.369.028.028	1.436.002.160	11,21
36.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	19.850.000	2.710.000	17.140.000	86,35
37.	Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	24.975.000	1.450.000	23.525.000	94,19

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
38.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	34.079.000	23.294.700	10.784.300	31,65
39.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	371.371.650	360.886.100	10.485.550	2,82
40.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	840.361.600	637.639.870	202.721.730	24,12
41.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	378.432.000	370.712.467	7.719.533	2,04
42.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	596.892.250	475.750.000	121.142.250	20,30
43.	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	708.744.700	521.724.900	187.019.800	26,39
44.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	77.507.000	24.790.000	52.717.000	68,02
45.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.975.000	3.725.000	46.250.000	92,55
46.	Program Pengelolaan Persampahan	13.517.328.220	11.271.292.846	2.246.035.374	16,62
47.	Program Penanggulangan Bencana	1.698.820.000	5.508.011.264	-3.809.191.264	-224,23
48.	Program Penanganan Bencana	647.335.000	605.841.400	41.493.600	6,41
49.	Program Pemberdayaan Sosial	6.033.920.950	5.648.776.256	385.144.694	6,38
50.	Penempatan Tenaga Kerja	51.999.950	45.857.150	6.142.800	11,81
51.	Hubungan Industrial	71.951.350	69.161.350	2.790.000	3,88
52.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	360.546.938	357.811.508	2.735.430	0,76
53.	Program Rehabilitasi Sosial	8.634.888.163	7.226.104.150	1.408.784.013	16,32
54.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.938.158.350	16.190.920.350	1.747.238.000	9,74
55.	Penataan Desa	175.070.000	156.830.730	18.239.270	10,42
56.	Peningkatan Kerjasama Desa	37.750.000	27.187.500	10.562.500	27,98
57.	Administrasi Pemerintah Desa	281.291.850	202.812.150	78.479.700	27,90
58.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat	930.603.300	833.431.057	97.172.243	10,44
59.	Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	1.134.363.900	827.621.500	306.742.400	27,04
60.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	650.000.000	650.000.000	0	0,00
61.	Program Pengelola Pendidikan	88.377.747.325	86.311.141.147	2.066.606.178	2,34
62.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	160.340.146.392	151.746.348.063	8.593.798.329	5,36
63.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.398.972.355	93.137.723.148	3.261.249.207	3,38
64.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.415.366.500	1.799.109.003	616.257.497	25,51
65.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	291.293.000	235.247.500	56.045.500	19,24
66.	Program Pengendalian Penduduk	102.890.100	100.041.700	2.848.400	2,77
67.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.841.423.050	4.808.357.863	33.065.187	0,68
68.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.443.368.750	2.395.277.829	48.090.921	1,97
69.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	13.052.000	11.200.000	1.852.000	14,19
70.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.337.759.600	1.095.743.800	242.015.800	18,09
71.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	163.754.100	153.542.600	10.211.500	6,24
72.	Program Perlindungan Perempuan	56.165.800	43.930.600	12.235.200	21,78
73.	Program Perlindungan Khusus Anak	433.184.200	409.176.742	24.007.458	5,54



No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
74.	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	209.750.000	208.335.698	1.414.302	0,67
75.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	921.980.617	662.563.143	259.417.474	28,14
76.	Program Pembinaan Perpustakaan	278.373.000	274.291.239	4.081.761	1,47
77.	Program Pengelolaan Arsip	167.762.000	137.747.950	30.014.050	17,89
78.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1.837.500	1.587.500	250.000	13,61
79.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	11.421.544.878	11.009.706.728	411.838.150	3,61
80.	Program pencegahan. penanggulangan. Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.605.515.000	1.581.214.608	24.300.392	1,51
81.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.306.758.888	1.963.414.954	343.343.934	14,88
82.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	548.323.800	485.129.730	63.194.070	11,52
83.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	507.820.000	361.320.026	146.499.974	28,85
84.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	103.336.000	99.211.871	4.124.129	3,99
85.	Program Pengembangan Kebudayaan	5.695.633.400	5.369.857.862	325.775.538	5,72
86.	Program Pembinaan Sejarah	218.990.000	218.430.000	560.000	0,26
87.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.426.786.800	1.416.930.672	9.856.128	0,69
88.	Program Pengelolaan Permuseuman	1.119.336.250	1.072.055.788	47.280.462	4,22
89.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.060.665.259	9.738.239.709	4.322.425.550	30,74
90.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	927.857.450	822.020.319	105.837.131	11,41
91.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.143.850.000	904.274.925	239.575.075	20,94
92.	Program Pendaftaran Penduduk	55.820.000	54.995.000	825.000	1,48
93.	Program Pencatatan Sipil	31.145.000	30.779.500	365.500	1,17
94.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	258.536.000	181.099.000	77.437.000	29,95
95.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.729.095.384	6.949.061.642	780.033.742	10,09
96.	Pengelolaan Keuangan Daerah	269.433.738.205	229.192.521.957	40.241.216.248	14,94
97.	Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	9.422.192.800	4.579.004.924	4.843.187.876	51,40
98.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.735.950.800	1.304.831.078	1.431.119.722	52,31
99.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.903.662.750	1.567.407.471	336.255.279	17,66
100.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	793.787.000	520.454.646	273.332.354	34,43
101.	Penyelenggaraan Pengawasan	1.459.745.000	1.036.145.000	423.600.000	29,02
102.	Kepegawaian Daerah	4.470.744.585	3.343.315.862	1.127.428.723	25,22
103.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.942.017.060	1.728.284.529	1.213.732.531	41,26
104.	Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.546.167.300	1.433.427.802	112.739.498	7,29
105.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	176.424.200	153.745.000	22.679.200	12,85
106.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	906.886.100	841.197.186	65.688.914	7,24
107.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.060.529.600	3.792.743.038	267.786.562	6,59
108.	Program Aplikasi Informatika	4.891.863.000	3.917.791.086	974.071.914	19,91
109.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.506.200	73.315.556	1.190.644	1,60
Total		1.179.290.147.294	1.083.982.864.245	95.307.283.049	14,47

Sumber Data : Data Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk Analisis Efisiensi Anggaran, dapat diperoleh dari tersedianya total pagu seluruh program yaitu sebesar Rp. 1.179.290.147.294,00 yang dialokasikan untuk 109 program, mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan, 5 (lima) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama selama tahun 2024 telah terserap/terrealisasi sebesar Rp. 1.083.982.864.245,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 95.307.283.049,00 dengan persentase efisiensi anggaran 14,47%.

#### **2.3.4.1 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Keberhasilan pencapaian target kinerja didalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang meliputi 3 Tujuan, 5 Sasaran dan 23 Indikator Kinerja Utama yang didukung oleh 109 program dapat dianalisis keberhasilan maupun hambatan dan solusi yang dilakukan terhadap permasalahan yang dijabarkan pada tabel.

Tabel 2.3.4.2 Analisis Program Yang Mendukung Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan											
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	5,15	97,09	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Fasilitas Inkubasi Industri Kecil	30	30	100	Jumlah fasilitas inkubasi industri kecil menunjukkan kinerja yang baik dengan target 30. Capaian ini mencerminkan efektivitas program dalam mendukung pertumbuhan industri kecil melalui pembinaan, akses teknologi, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.
						Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kebijakan terkait inflasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Kebijakan inflasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan sampai dengan bulan Desemberr 2024 adalah melaksanakan operasi pasar murah dan pengawasan harga bahan pokok sesuai dengan rencana kerja Dinas Perdagangan terkait inflasi yaitu operasi pasar murah dan pengawasan harga bahan pokok. Maka persentase capaian adalah: Kebijakan inflasi yang dilaksanakan/kebijakan inflasi yang ditetapkan*100 =2/2*100 = 100%
						Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Pelatihan bagi Wirausaha	3 Kali	3 Kali	100	Program Pemberdayaan UMKM menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan target sesuai. Capaian ini mencerminkan efektivitas program dalam menjangkau dan mendukung pelaku UMKM, serta meningkatnya akses mereka terhadap pendampingan, pelatihan, dan fasilitas usaha.
						Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang menggunakan e-Commerce	100%	100%	100	Target presentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan eCommerce adalah 21,19. Pada 2024 pelaku usaha perdagangan telah menggunakan eCommerce sebanyak 50 orang dari 236 pelaku usaha yang dibina sehingga target tercapai: 50/236 = 21,19%

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	100%	100%	100	" Capaian Kinerja dicapai dengan program pada Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Perdagangan. - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik 100%, dengan formulasi = $11/11 \times 100$ . Terdiri dari 11 Pasar yaitu: Pasar Kandangan, Pasar Rakyat Terpadu, Pasar Senin Negara, Pasar Hamayung, Pasar Angkinang, Pasar Taniran, Pasar Bajayau, Pasar Arba Batang Kulur, Pasar Sirih, Pasar Rakyat Wasah Hilir, dan Pasar Ambarai. Untuk menunjang kenaikan PAD dilakukan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Jumlah sarana distribusi perdagangan sesuai peruntukannya yaitu 11 pasar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tercapai 100%."
						Pengembangan Ekspor	Persentase KAD yang dilaksanakan	100%	100%	100	"Target kerjasama yang dilakukan adalah 10 kerjasama antar daerah dalam 5 (lima) tahun, dan 3 (tiga) kerjasama antar daerah pada tahun 2024. Perhitungan persentase KAD adalah: KAD yang dilaksanakan / KAD yang ditargetkan *100 Pada triwulan IVtahun 2024 ditargetkan tercapai sebesar 30% dengan capaian sebesar $3/10 \times 100 = 30\%$ yaitu kerjasama yang dilakukan Dinas Perdagangan dengan Pertamina berupa penyediaan gas LPG 3kg pada kegiatan operasi pasar murah, Kerjasama dengan Bulog untuk penyediaan stok gula dan minyak goreng, serta penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya. Dengan adanya kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Pertamina maka harga Tabung Gas LPG 3kg dapat dipasarkan dengan harga Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) jauh lebih murah dibandingkan harga ecer di pasaran yaitu mencapai Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah). Kerja sama dengan Bulog merupakan upaya menyediakan gula dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasar pada saat pelaksanaan operasi pasar murah."

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pemenuhan faktor iklim investasi yang kondusif	100%	66.60%	66.60	Regulasi Penanaman Modal yang seharusnya ada sebanyak 6 yaitu Perbup Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal, Perbup Penanaman Modal,Perbup Perijinan Berusaha Berbasis Resiko,SOP Pengawasan Penanaman Modal, Perda RDTR,dan Perda SIMBG. Akan tetapi pada saat ini yang ada hanya 4 Regulasi yaitu Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,Perda Penanaman Modal,Perda Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan SOP Pengawasan Penanaman Modal
						Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor yang berinvestasi	2	2	100	Program "Jumlah Investor yang Berinvestasi" dengan realisasi 100% menunjukkan pencapaian yang sempurna, di mana seluruh target investor yang ditetapkan telah berhasil berinvestasi. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam menarik minat investor dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan daerah yang mendukung, fasilitas yang memadai, serta kepercayaan yang tinggi terhadap potensi ekonomi daerah. Dengan realisasi 100%, program ini menunjukkan efektivitas dalam mempromosikan dan memfasilitasi investasi, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kegiatan Terealisasi sesuai target, Hanya saja narasumber kegiatan mengalami penyesuaian jumlah, sehingga menyisakan anggaran
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal	100%	97,14%	97.14	Nilai realisasi yang dilaporkan dari pembelian aset berupa peralatan dan mesin dan penambahan bangunan. PMDN yang realisasinya kosong dikarenakan pada periode pelaporan LKPM belum ada pembelian aset atau penambahan bangunan. Data PMDN yang melaporkan LKPM Periode Triwulan IV tahun 2024 diwajibkan untuk Pelaku Usaha Besar/Non UMK dan pelaku usaha kecil /UMK. Pada Triwulan 4 tahun 2024 sebanyak 34 pelaku usaha telah melaporkan LKPM, persentase capaiannya apabila dihitung dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 97,14 %
						Program Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	90.84%	100.9	Seluruh izin telah dilayani secara elektronik yaitu sebanyak 63 jenis izin yang dilayani melalui Aplikasi SiCantik Cloud, SimBG, OSS RBA dan MPPD

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PDRB Sektor Unggulan	%	6.4	5.10	79,68	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi	9.522 Ha	9.530 Ha	100.08	Kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan II (April-Juni) tahun 2024. Pengembangan luas tanam padi seluas 200 ha ini tersebar di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Telaga Langsung seluas 140 ha, Kecamatan Kandangan seluas 10 ha, Kecamatan Angkinang seluas 40 ha dan Kecamatan Sungai Raya seluas 10 ha.
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Luas Lahan Sawah Fungsional	17.06%	17.06%	100	Program "Persentase Luas Lahan Sawah Fungsional" dengan realisasi sesuai target menunjukkan pencapaian yang sangat baik, di mana seluruh lahan sawah yang ada telah terkelola dan berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan dan menjaga luas lahan pertanian yang produktif, yang sangat penting untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan realisasi 100%, program ini memastikan bahwa tidak ada konversi atau alih fungsi lahan sawah yang dapat mengganggu pasokan pangan, serta mendukung upaya pembangunan pertanian yang berkelanjutan di daerah. Dilaksanakan optimalisasi lahan, dan rehab irigasi
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular	100%	100%	100	Capaian berhasil karena pada tahun berjalan tidak ada kasus hewan menular
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Tanam Yang Aman dari Serangan Hama/ Penyakit Tanaman	92%	92%	100	Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan seperti bahan obat gerdal 397,5 liter/kg
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	3 Kelompok	3 kelompok	100	Pelaksanaan Latihan Konsultasi di Balai Penyuluhan Pertanian dan Kelompok menjadi Kelembagaan Ekonomi Pertanian
						Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani	5 Kelompok	5 kelompok	100	Pelaksanaan Latihan dan Konsultasi di 11 Balai Penyuluhan Pertanian

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	14.500 Ton	14.724 Ton	101.55	Harga di e purchasing yg ternyata lebih murah daripada harga di pagu harga DPA skpd dan harga SSH Kabupaten dengan kualitas yg baik membuat perbedaan harga sedikit turun signifikan namun realisasi kegiatan selesai 100%
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	7.300 Ton	7293,9 Ton	99.9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang mencapai target menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan produksi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta penerapan praktik budidaya berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan sinergi yang baik antara kebijakan pemerintah, partisipasi pelaku usaha, dan dukungan teknologi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor perikanan budidaya secara signifikan serta memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional.
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Jumlah wilayah Perikanan tangkap Yang Diawasi	12 Kali	12 Kali	100	Sebagian besar anggaran yang tidak dapat diserap adalah dari kegiatan Penanganan Kasus perkara pidana perikanan yang bersifat antisipatif dan akomodatif, karena tahun 2024 tidak ditemukan adanya penanganan kasus perkara tersebut, maka anggaran untuk hal ini tidak dipergunakan.
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Omzet Penjualan Usaha Perikanan	Rp. 2.400.00 0.000	Rp. 2.480.000. 000	103.12	" Kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi sesuai target. Ada beberapa pekerjaan yang rencana awal dilaksanakan dan akhirnya dibatalkan diantaranya adalah: a. Pemerliharaan Fasilitas Kawasan Objek Wisata Air Panas Tanuhi, Dermaga Bamboo Rafting Ni'ih dan Green House Loksado b. Jasa Konsultan perencanaan rehab aula Objek Wisata Air Panas Tanuhi (wc, atap, plafon dalam dan luar, frame jendela dan pintu c. Jasa konsultan perencanaan rehabilitasi cottage Objek Wisata Air Panas Tanuhi (10 cottage : atap, plafon luar – dalam, wc, dll) d. Jasa konsultan perencanaan rehab musholla dermaga bamboo rafting ni'ih (atap dan plafon) e. Jasa konsultan perencanaan rehab WC dan plafon luar resepsionis Objek Wisata Air Panas Tanuhi Alasannya rencana ke depan Objek Wisata Air Panas Tanuhi akan direvitalisasi. Untuk gambar perencanaan pembangunannya sudah dibuat di anggaran perubahan 2024"

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Indeks Daya Saing Pariwisata	%	2	3	150	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang di bina	13 Pokdrwis yang di bina	13 Pokdrwis yang di bina	100	" Kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi sesuai target. Ada beberapa pekerjaan yang rencana awal dilaksanakan dan akhirnya dibatalkan diantaranya adalah: a. Pemeliharaan Fasilitas Kawasan Objek Wisata Air Panas Tanuhi, Dermaga Bamboo Rafting Ni'ih dan Green House Loksado b. Jasa Konsultan perencanaan rehab aula Objek Wisata Air Panas Tanuhi (wc, atap, plafon dalam dan luar, frame jendela dan pintu c. Jasa konsultan perencanaan rehabilitasi cottage Objek Wisata Air Panas Tanuhi (10 cottage : atap, plafon luar – dalam, wc, dll) d. Jasa konsultan perencanaan rehab musholla dermaga bamboo rafting ni'ih (atap dan plafon) e. Jasa konsultan perencanaan rehab WC dan plafon luar resepsionis Objek Wisata Air Panas Tanuhi Alasannya rencana ke depan Objek Wisata Air Panas Tanuhi akan direvitalisasi. Untuk gambar perencanaan pembangunannya sudah dibuat di anggaran perubahan 2024"
						Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Daya Tarik Wisata	6 Media	6 Media	100	Secara keseluruhan program ini terlaksana sesuai target, karena kegiatan ini termasuk Festival Bamboo Rafting (FBR) yang masuk dalam KEN tingkat Nasional, termasuk Kegiatan Promosi lainnya. Hanya saja ada 1 kegiatan Pembinaan Temu Komunitas tidak dapat terlaksana karena adanya masa transisi kepengurusan Komunitas Pecinta Wisata.
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di bina dan diberi bantuan	32 orang	32 orang	100	Program/Kegiatan ini juga terlaksana sesuai target karena Kegiatan ini adalah bagian dari Rangkaian Festival Bamboo Rafting (FBR). Adapun kegiatan ini berupa Live Performance dan Mahumbal



N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	85,2	75,95	89,14	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi	70.74 %	70.79 %	100.07	"Dari 2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (12 Sub Kegiatan) 103 Paket sudah serah terima pekerjaan 100% dan 2 Paket terjadi Kahar sehingga pekerjaan dihentikan. Untuk menghitung realisasi Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya Air setiap tahunnya melaksanakan kegiatan E-PAKSI, dimana data yang dihasilkan terkait hasil survei kondisi bangunan irigasi dengan klasifikasi baik, rusak ringan, rusak sedang dan berat. Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi merupakan indikator sebagai tolak ukur mengetahui kondisi Infrastruktur irigasi, dengan rumus perhitungan : Jumlah Luas areal yang dapat dilayani / Luas Areal Irigasi Sesuai Kewenangan ditambah dengan Luas Irigasi Baru yang telah berfungsi x 100 %  Berdasarkan data hasil survey E-PAKSI Tahun 2024, diketahui : Ø Jumlah Luas areal yang dapat dilayani = 7.853 Ha Ø Jumlah Luas Areal Irigasi Sesuai Kewenangan ditambah dengan Luas Irigasi Baru yang telah berfungsi =11.094 Ha Jadi Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi adalah : 7.853/11.094 x 100 = 70,79 % (Realisasi melebihi target)"
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase akses air minum layak	96.43 %	93.36 %	96.82	"Pada tahun 2024, capaian akses terhadap layanan air minum aman mencapai sebesar 93,36%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemerataan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Capaian ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur air minum, baik melalui sistem perpipaan maupun non-perpipaan. Salah satu indikator konkret dari capaian tersebut adalah jumlah sambungan rumah (SR) yang telah berhasil dibangun sebanyak 1.824 sambungan. Jumlah ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang kini dapat menikmati akses air minum langsung ke rumah mereka melalui jaringan perpipaan, yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta efisiensi penggunaan air. Keberhasilan ini juga sejalan dengan target pembangunan daerah dan mendukung tujuan nasional dalam mencapai akses universal air minum aman sesuai agenda Sustainable Development Goals (SDGs). "

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi sehat	90.29 %	89.37 %	98.98	Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2024, persentase akses masyarakat terhadap sanitasi sehat tercatat sebesar 89,37%. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan memenuhi standar kesehatan lingkungan. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai program dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Salah satu indikator penting yang mendasari capaian tersebut adalah pembangunan sebanyak 1.085 unit toilet keluarga yang dilengkapi dengan tangki septik sesuai standar teknis dan lingkungan. Fasilitas sanitasi ini tidak hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga berfungsi untuk mencegah pencemaran sumber air tanah serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Keberhasilan ini turut memperkuat pencapaian target pembangunan sanitasi yang tertuang dalam RPJMD serta berkontribusi terhadap tujuan nasional dalam pemenuhan akses sanitasi layak dan aman sebagaimana yang diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 6.2 yang menekankan pada akses sanitasi dan kebersihan yang adil dan merata bagi semua.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Lama dan Tinggi Genangan Air	7 jam 65 cm	7 jam 65 cm	100	"Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan oleh tim teknis, ditemukan bahwa terdapat wilayah tertentu yang mengalami genangan air dengan rata-rata ketinggian mencapai 35 cm dan durasi genangan berlangsung selama kurang lebih 7 jam. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem drainase di wilayah tersebut belum berfungsi secara optimal dalam mengalirkan air hujan atau limpasan permukaan secara cepat dan efektif. Lamanya waktu genangan yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan dan bangunan di sekitarnya. Selain itu, genangan air yang bertahan dalam jangka waktu cukup lama dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit, seperti nyamuk, serta meningkatkan risiko terhadap penyakit berbasis lingkungan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program perbaikan atau peningkatan infrastruktur drainase di wilayah terdampak, baik melalui normalisasi saluran, pembangunan saluran baru, maupun peningkatan kapasitas sistem pengelolaan air limpasan. Intervensi ini juga penting untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan intensitas curah hujan yang semakin tidak menentu. "

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Pembangunan Publik yang layak	71.41 %	71.41%	100	"Pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tercatat sebanyak 22 dokumen dari total target sebanyak 25 dokumen. Hal ini menunjukkan tingkat pencapaian sebesar 88%, yang mencerminkan kinerja yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan untuk periode tersebut. Jika dilihat secara kumulatif, dari tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2024, jumlah total dokumen PBG dan SLF yang berhasil diterbitkan mencapai 989 dokumen. Jumlah ini kemudian dibandingkan dengan total permohonan atau kebutuhan sebanyak 1.385 dokumen pada periode yang sama, sehingga menghasilkan rasio capaian sebesar 71,41%. Rasio ini memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan, proses perizinan dan penerbitan dokumen legalisasi bangunan gedung masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, baik dari segi kecepatan pelayanan, penyederhanaan proses birokrasi, maupun pemenuhan persyaratan teknis dan administratif oleh pemohon. Pencapaian ini sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan regulasi bangunan gedung yang sesuai standar, serta upaya mendukung tata kelola pembangunan fisik yang tertib dan berkelanjutan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang bangunan dan lingkungan. "

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	63.06 %	63.60 %	100.86	<p>"Pada tahun 2024, kondisi jalan kabupaten mengalami peningkatan dengan persentase jalan mantap mencapai 63,60%, sedikit lebih tinggi dari target 63,06% atau sebesar 100,86% dari rencana awal. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.</p> <p>Beberapa kegiatan penignkatan akses jalan meliputi:</p> <p>Survey Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan anggaran Rp 601,95 juta dan realisasi pada survei kondisi Jalan senesarn Rp 351,20 juta.</p> <p>Pembangunan Jalan berhasil membangun 0,58 km dari target 0,3 km, dengan serapan anggaran Rp 4,55 miliar dari total pagu Rp 4,74 miliar (95,96%).</p> <p>Rekonstruksi Jalan mencatat pencapaian 5,7 km dari target 3 km, dengan realisasi anggaran Rp 58,73 miliar dari total Rp 60,62 miliar (96,89%).</p> <p>Rehabilitasi Jalan berhasil mencapai 16,67 km dari target 16,25 km, dengan serapan anggaran Rp 16,62 miliar dari total Rp 17,15 miliar (96,89%).</p> <p>Pemeliharaan Berkala Jalan melampaui target dengan capaian 10,26 km dari rencana 1,5 km, dengan realisasi anggaran Rp 11,87 miliar dari total Rp 12,15 miliar (97,71%).</p> <p>Pemeliharaan Rutin Jalan mencapai 4,6 km dari target 0,75 km, dengan realisasi anggaran Rp 2,97 miliar dari total Rp 3,02 miliar (98,55%).</p> <p>Secara keseluruhan, dari total pagu anggaran Rp 98,08 miliar, realisasi mencapai Rp 95,10 miliar atau 96,96%. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan, yang berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan agar lebih optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah."</p>

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pekerjaan konstruksi yang menerapkan SMKK	100%	105.6 %	105.60	"Belum optimal pelaksanaan kegiatan pengawasan tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi karena : 1. Belum dilaksanakan penunjukan langsung konsultan pengawas jasa konstruksi 2. Belum dilaksanakan pembuatan SOP Pengawasan 3. Adanya ketidak sesuaian penghitungan kebutuhan anggaran perjadiin utk kegiatan peningkatan kapasitas pengawasan jaskon"
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemenuhan peta kawasan potensi daerah	65%	65%	100	"Analisis capaian realisasi tata ruang rendah: 1. Studi kelayakan bandara tidak bisa dilaksanakan karena waktu yg terbatas (APBD perubahan) 2. Penyusunan KLHS tidak dilaksanakan karena Tim Penyusun masih fokus dalam penyelesaian Validasi KLHS RDTR WP Perkotaan Kandangan, kemudian penyelesaian KLHS Revisi RTRW dan KLHS RDTR Padang Bantung 3. Untuk honor FPR dikarenakan belum ada permohonan KKPR skala besar yang melibatkan FPR maka belum diadakan rapat Pembahasan FPR, dan sedang dilakukan revisi SK FPR untuk pergantian anggota FPR"

						Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	100%	100	<p>"Merupakan Salah Satu Indikator unsur SPM</p> <p>Pada Tahun 2024 tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai bencana daerah/kabupaten sehingga tidak ada penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan realisasi capaian 100% =(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100% =0/0 x 100% = 100%"</p> <p>"Target akumulasi hingga tahun 2024 adalah sejumlah 10.730 unit atau penambahan 100 unit pada tahun 2024. Namun yang dapat terealisasi hingga tahun 2024 adalag 10.664 unit dengan persentase 50,19 % dari target 50,50%.</p> <p>Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan, antara lain melalui :</p> <p>APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;</p> <p>APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementrian PUPR;</p> <p>Dana CSR dan bantuan lainnya.</p> <p>Pada tahun 2024 ini peningkatan kualitas RTLH yang telah terealisasi yaitu melalui APBD Provinsi yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bantuan RTLH pada Kawasan rawan bencana sebanyak 24 unit di Desa Halunuk dan Desa Panggungan Kecamatan Loksado;</li><li>- Bantuan RTLH pada kawasan kumuh dengan luas lebih dari 10 Ha sebanyak 10 unit di desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan dan Desa Gambah Dalam Kec. Kandangan</li></ul> <p>Target yang dicantumkan sebelumnya tidak dapat tercapai karena hanya mengandalkan dukungan program dari provinsi dan Kementrian PUPR, karena program kementrian yang awalnya akan dilaksanakan di Kab. Hulu Sungai Selatan batal dilaksanakan dan dialihkan ke kab/kota lain maka target tidak dapat tercapai.</p> <p>Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2025 APBD Kab. Hulu Sungai Selatan akan menganggarkan dan memulai program terkait penanganan RTLH pada kawasan kumuh dan di luar kawasan kumuh."</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	---	------	------	-----	---

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Kawasan Pemukiman	Presentase Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni	50.50%	50.19%	99.39	Program "Persentase Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni" dengan target 50,50% dan realisasi 50,19% menunjukkan pencapaian yang hampir mencapai target yang ditetapkan, meskipun ada sedikit selisih. Realisasi sebesar 50,19% mencerminkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan akses rumah layak huni bagi penduduk pra-sejahtera, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai angka target sepenuhnya. Pencapaian ini menunjukkan adanya kemajuan yang positif dalam program perumahan, namun evaluasi lebih lanjut dan strategi peningkatan perlu dilakukan untuk memastikan seluruh penduduk pra-sejahtera dapat menikmati kondisi tempat tinggal yang layak dan aman.



						Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Presentase Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni	50.50%	50.19%	99.39	<p>"Target akumulasi hingga tahun 2024 adalah sejumlah 10.730 unit atau penambahan 100 unit pada tahun 2024. Namun yang dapat terealisasi hingga tahun 2024 adalag 10.664 unit dengan persentase 50,19 % dari target 50,50%.</p> <p>Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan, antara lain melalui :</p> <p>APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;</p> <p>APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian PUPR;</p> <p>Dana CSR dan bantuan lainnya.</p> <p>Pada tahun 2024 ini peningkatan kualitas RTLH yang telah terealisasi yaitu melalui APBD Provinsi yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bantuan RTLH pada Kawasan rawan bencana sebanyak 24 unit di Desa Halunuk dan Desa Panggungan Kecamatan Loksado;</li><li>- Bantuan RTLH pada kawasan kumuh dengan luas lebih dari 10 Ha sebanyak 10 unit di desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan dan Desa Gambah Dalam Kec. Kandangan</li></ul> <p>Target yang dicantumkan sebelumnya tidak dapat tercapai karena hanya mengandalkan dukungan program dari provinsi dan Kementerian PUPR, karena program kementerian yang awalnya akan dilaksanakan di Kab. Hulu Sungai Selatan batal dilaksanakan dan dialihkan ke kab/kota lain maka target tidak dapat tercapai.</p> <p>Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2025 APBD Kab. Hulu Sungai Selatan akan menganggarkan dan memulai program terkait penanganan RTLH pada kawasan kumuh dan di luar kawasan kumuh."</p> <p>"Indikator PSU Perumahan yang berkualitas menunjukkan perumahan telah memiliki PSU yang lengkap dan berfungsi dengan baik.</p> <p>Pada Tahun 2024 terdapat 18 perumahan yang memiliki PSU yang berkualitas dari sebanyak 26 perumahan yang terdapat di wilayah Kabupaten HSS. Sehingga Presentase PSU Perumahan yang berkualitas adalah sebanyak <math>(18/26) \times 100\% = 69.23\%</math>.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--------	--------	-------	--

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											Pencapaian tersebut dapat terlaksana melalui:  1. Perbaikan/Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 1787 lokasi 2. Pemeliharaan Rutin Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 23 lokasi meliputi pemeliharaan kebersihan taman, pemangkasan tanaman, dll."
						Program Peningkatan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase PSU Perumahan yang berkualitas	69.62%	69.62%	100	Pencapaian yang sempurna dalam memastikan bahwa seluruh Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang disediakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur perumahan yang tidak hanya mencakup jumlah unit, tetapi juga kualitas yang mendukung kenyamanan dan keberlanjutan hidup penghuni. Dengan realisasi 100%, program ini dapat dijadikan acuan untuk memastikan bahwa proyek perumahan di masa depan juga memperhatikan kualitas infrastruktur yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100	Merupakan program salah satu dari Indikator IKK LPPD. Anggaran yang disediakan adalah bersifat persediaan yang berfungsi sebagai anggaran untuk mengakomodir apabila terjadi sengketa pertanahan dari masyarakat beserta tindak lanjut proses penanganannya. Pada tahun 2024 terdapat 3 kasus pengaduan sengketa pertanahan dari masyarakat yang penanganannya memerlukan biaya Rp. 2.710.000 atau 13,65% dari pagu total anggaran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, tindak lanjut tahun selanjutnya pagu anggaran untuk penyelesaian sengketa tanah akan digabung dengan program pertanahan lainnya.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100%	100%	100	Merupakan program salah satu dari Indikator IKK LPPD dan mengakomodir usulan dari acara rakortekrenbang tingkat propinsi kalsel. Anggaran ini bersifat persediaan yang digunakan untuk pendampingan saat BPN melaksanakan kegiatan redistribusi tanah serta ganti kerugian program maksimum dan tanah absentee kepada masyarakat, tetapi untuk pelaksanaan di tahun 2024 BPN tidak mengajukan tambahan bantuan dana operasional yang disediakan oleh disperakplh, sehingga nilai realisasi kinerja diperoleh dari terlaksananya pendampingan kegiatan tersebut dengan nilai capaian untuk program ini adalah 100% untuk tahun selanjutnya pagu anggaran akan digabung dengan program pertanahan lainnya.
						Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap	73.08%	73.08%	100	Indikator dari program ini adalah jumlah pengesahan siteplan merupakan salah satu kegiatan layanan dalam proses penerbitan ijin usaha pengembang perumahan. Sampai dengan tahun 2024 ini telah diberikan layanan sejumlah 19 pengesahan dari target sejumlah 26 sehingga persentase capaian realisasi program ini adalah = $(19/26) \times 100\% = 73.08\%$ .

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	71,49	67,39	94,26	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH memenuhi standar	100%	100%	100	Pada tahun 2024, Hulu Sungai Selatan menyusun dokumen Rencana Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.Posisi dan peran RPPLH di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat sentral/penting terhadap dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diilustrasikan pada gambar di atas, diketahui bahwa RPPLH berada pada tahap perencanaan. Hal ini memberikan posisi bahwa RPPLH termasuk RPPLH menjadi dasar penyusunan kebijakan dan menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam. RPPLH Hulu Sungai Selatan disusun oleh tim ahli yang berasal LPPPM universitas Lambung Mangkuratt dari memperhatikan enam hal yaitu keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi sumber daya alam; kearifan lokal; aspirasi masyarakat; dan perubahan iklim. RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.Dengan tersusunnya dokumen Rencana Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2055, sehingga indikator tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH yang memenuhi standar tercapai 100 %.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai kekeruhan(TSS) air sungai di bawah batas ambang	50 mg/l	50 mg/l	100	"Parameter TSS (Total Solid Suspended) atau lebih dikenal dengan nilai kekeruhan air merupakan limbah pencemar utama dari pertambangan batu bara yang mengindikasikan terjadinya pencemaran air dan mempengaruhi kualitas air sungai, terutama kualitas air sungai amandit sehingga diperlukan pemantauan dan pengawasan kualitas air sungai yang diutamakan pada parameter TSS tersebut. Nilai Baku mutu air sungai parameter TSS berdasarkan PP nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ≤50 mg/L. Hasil pengambilan dan pengujian sampel pada 3 titik lokasi pada TW 4 tahun 2024 oleh analis laboratorium dengan metode gravimetri menunjukkan hasil yang memenuhi baku mutu pada semua lokasi yaitu 3 titik lokas yaitu sungai amandit loksado, sungai amandit kandangan, sungai amandit padang batung (titik koordinat terlampir di data dukung LHU triwulan) Dengan 3 titik lokasi yang telah memenuhi baku mutu tersebut telah merealisasikan capaian indikator Jumlah titik lokasi pembuangan air limbah tambang batu bara yang memenuhi standar baku mutu pada tahun 2024 sebesar (3/3) x 100% = 100%"

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	6.97%	6.67%	95.70	<p>"Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator Persentase kecukupan RTH Publik berdasarkan pada Permendagri No.1 Th. 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan dan Permen PU No.5 Th. 2008 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.</p> <p>Pada tahun 2024 indikator persentase luasan RTH publik di wilayah perkotaan memiliki target dengan nilai 6,97 %, namun realisasi yang tercapai hanya 6,67%, sehingga capaian indikator ini hanya 95,70% Kondisi ini diakibatkan oleh semakin banyaknya lahan diperkotaan yang dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan perumahan serta sentra usaha perdagangan, hal ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan di daerah perkotaan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH. solusi yang dapat dilakukan kedepannya adalah dengan bekerja sama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan area RTH dalam proses perizinan."</p>

						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Pengelolaan Limbah cair/Emisi Udara)	100%	100%	100	<p>"Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan, mengingat tekanan terhadap ekosistem terus meningkat akibat aktivitas manusia. Laporan ini disusun untuk memberikan rekomendasi strategis dalam pengawasan lingkungan hidup selama tahun 2024.</p> <p>Tujuan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku.</li><li>2. Mengidentifikasi dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan.</li><li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan.</li><li>4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.</li></ol> <p>Fokus Pengawasan Tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Limbah Industri:<ul style="list-style-type: none"><li>o Memastikan limbah industri dikelola sesuai dengan standar yang berlaku.</li><li>o Meningkatkan frekuensi inspeksi terhadap fasilitas pengolahan limbah.</li></ul></li><li>2. Pemantauan Kualitas Udara dan Air:<ul style="list-style-type: none"><li>o Penguatan sistem pemantauan kualitas udara di daerah perkotaan.</li><li>o Pengawasan ketat terhadap sumber pencemar air, seperti pabrik dan pertanian.</li></ul></li><li>3. Konservasi Keanekaragaman Hayati:<ul style="list-style-type: none"><li>o Mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak habitat alami.</li><li>o Memperkuat pengawasan terhadap perdagangan ilegal flora dan fauna.</li></ul></li></ol> <p>Sejumlah rekomendasi pengawasan lingkungan hidup telah diberikan kepada semua usaha yang telah dilakukan pengawasan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PT. Surya Langgeng Sejahtera;</li><li>2. PT. Antang Gunung Meratus;</li><li>3. RS Permata Bunda;</li><li>4. PT. Subur Agro Makmur;</li><li>5. RSUD Daha Sejahtera.</li></ol> <p>dimana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh usaha/kegiatan demi perbaikan pengelolaan lingkungan hidup</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	------	------	-----	--

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											yang tidak terealisasi adalah dana persediaan pendampingan penertiban penambangan galian golongan C di sekitar sungai amandit, tetapi pada tahun 2024 tidak dilaksanakan karena tidak ada gangguan akibat adanya tambang pasir di sungai amandit dan dari hasil pemantauan juga tidak lagi di dapatkan aktivitas penambangan pasir yang mengakibatkan keresahan masyarakat disekitar aliran sungai."
						Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	6.97%	6.67%	95.70	<p>"Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator Persentase kecukupan RTH Publik berdasarkan pada Permendagri No.1 Th. 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan dan Permen PU No.5 Th. 2008 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.</p> <p>Pada tahun 2024 indikator persentase luasan RTH publik di wilayah perkotaan memiliki target dengan nilai 6,97 %, namun realisasi yang tercapai hanya 6,67%, sehingga capaian indikator ini hanya 95,70% Kondisi ini diakibatkan oleh semakin banyaknya lahan diperkotaan yang dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan perumahan serta sentra usaha perdagangan, hal ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan di daerah perkotaan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH. solusi yang dapat dilakukan kedepannya adalah dengan bekerja sama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan area RTH dalam proses perizinan."</p>



N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	6.97%	6.67%	95.70	<p>"Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator Persentase kecukupan RTH Publik berdasarkan pada Permendagri No.1 Th. 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan dan Permen PU No.5 Th. 2008 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.</p> <p>Pada tahun 2024 indikator persentase luasan RTH publik di wilayah perkotaan memiliki target dengan nilai 6,97 %, namun realisasi yang tercapai hanya 6,67%, sehingga capaian indikator ini hanya 95,70% Kondisi ini diakibatkan oleh semakin banyaknya lahan diperkotaan yang dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan perumahan serta sentra usaha perdagangan, hal ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan di daerah perkotaan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH. solusi yang dapat dilakukan kedepannya adalah dengan bekerja sama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan area RTH dalam proses perizinan."</p>

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Nilai kekeruhan(TSS) air sungai amandit sekitar tambang di bawah batas ambang	50 mg/l	50 mg/l	100	<p>"Parameter TSS (Total Solid Suspended) atau lebih dikenal dengan nilai kekeruhan air merupakan limbah pencemar utama dari pertambangan batu bara yang mengindikasikan terjadinya pencemaran air dan mempengaruhi kualitas air sungai, terutama kualitas air sungai amandit sehingga diperlukan pemantauan dan pengawasan kualitas air sungai yang diutamakan pada parameter TSS tersebut. Nilai Baku mutu air sungai parameter TSS berdasarkan PP nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ≤50 mg/L. Hasil pengambilan dan pengujian sampel pada 3 titik lokasi pada TW 4 tahun 2024 oleh analis laboratorium dengan metode gravimetri menunjukkan hasil yang memenuhi baku mutu pada semua lokasi yaitu 3 titik lokas yaitu sungai amandit loksado, sungai amandit kandungan, sungai amandit padang batung (titik koordinat terlampir di data dukung LHU triwulan)</p> <p>Dengan 3 titik lokasi yang telah memenuhi baku mutu tersebut telah merealisasikan capaian indikator Jumlah titik lokasi pembuangan air limbah tambang batu bara yang memenuhi standar baku mutu pada tahun 2024 sebesar (3/3) x 100% = 100%</p> <p>Anggaran yang disediakan adalah bersifat persediaan yang berfungsi sebagai anggaran untuk mengakomodir adanya pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat beserta tindak lanjut proses penanganannya. Pada tahun 2024 hanya terdapat 4 pengaduan LH dari mayarakat yang penanganannya memerlukan biaya Rp. 3.725.000 atau 7,45% dari pagu total anggaran. tindak lanjut tahun selanjutnya pagu anggaran untuk penanganan pengaduan akan digabung dengan program prioritas LH lainnya."</p>

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkurangi melalui program 3R	20.30%	20.55%	101.23	<p>"Upaya pengurangan sampah dengan mengelola sampah dengan benar adalah salah satu cara penting untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang. Upaya Pengurangan dengan dengan pola 3R pada triwulan 4 adanya penambahan bangunan TPS3R Di Desa Gumbil dan Desa Sirih Hulu.</p> <p>Dengan upaya pengurangan yang dilakukan dengan Pola 3R dan Peran serta Masyarakat meliputi:</p> <p>Kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah pada TPS3R Kegiatan pemilahan dan ekonomi kreatif sampah pada Bank Sampah Penambahan personil untuk kegiatan pemilahan dan pengolahan di TPS3R. Pada TW4, sampah terkelola mencapai 20.55 % dengan lokasi TPS3R di :</p> <p>TPS3R Pandai TPS3R Taniran TPS3R Baluti TPS3R Jembatan Merah TPS3R Jambu Hulu TPS3R Ulin TPS3R Tambingkar TPS3R Batang Kulur Tengah TPS3R Muning TPS3R Madang TPS3R Gumbil</p> <p>Kendala yang kadang muncul yang mempengaruhi target adalah naik turunnya peran serta masyarakat dan semakin meningkatnya timbulan sampah pada momen - momen tertentu."</p>

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Indeks Risiko Bencana	Skor	135	119,36	113,1	Program Penanggulangan Bencana	Persentasi Kawasan yang tertangani Bencana	100%	100%	100%	Persentase kawasan yang tertangani bencana mencapai 100%, menunjukkan respons cepat dan penanganan yang optimal. Capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan yang tinggi, koordinasi yang baik antar lembaga, serta efektivitas sistem mitigasi bencana dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
						Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan	100%	100%	100.00	Realisasi anggaran pada program ini menyesuaikan kondisi lapangan
SASARAN STRATEGIS 2 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan											
7	Persentase Penduduk Miskin	%	3,96	3,38	117,16	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS	100%	93.62%	93.62	Sebagian besar anggaran pada program ini adalah belanja jasa atau honor potensi sosial, realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan adanya pengurangan potensi sosial yang lulus PPPK
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,1	2,11	99,53	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	76.70	76.70	100	Pencari kerja yang ditempatkan mencapai 100%, menunjukkan keberhasilan program penempatan tenaga kerja yang efektif dan tepat sasaran. Capaian ini mencerminkan sinergi yang baik antara pelatihan, informasi pasar kerja, dan keterlibatan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja sesuai kebutuhan.
						Hubungan Industrial	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	100%	100%	100	Penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang mencapai 100% pada tahun 2024 mencerminkan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik ketenagakerjaan. Capaian ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik, mediasi yang responsif, serta komitmen kedua belah pihak dalam mencari solusi damai dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.10	2.10	100	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang mencapai target pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian luar biasa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program pelatihan dan sertifikasi yang intensif, yang memastikan setiap tenaga kerja memiliki keterampilan yang diakui dan siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif.
9	Gini Rasio	Rasio	0,257	0,288	89,24	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang ditangani	100%	88.73%	88.73	Anggaran pada program ini berisikan anggaran beberapa jenis bantuan sosial, realisasi tidak mencapai 100% karena adanya bantuan sosial yang tidak tersalurkan disebabkan penerima bantuan Jaminan Hidup Lanjut usia ada yang meninggal dunia atau menerima bantuan sosial sejenis. Sedangkan untuk bantuan sosial terhadap anak terlantar disebabkan anak tersebut menikah, lewat usia, tidak sekolah, dan menerima bantuan sosial sejenis.
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	100%	97.34%	97.34	Anggaran pada program ini berisikan anggaran bantuan sosial Program Rumah Sejahtera, Beras Sejahtera Daerah dan Paket Sembako. Realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan adanya bantuan sosial yang tidak tersalurkan disebabkan calon penerima meninggal dunia tanpa ahli waris, pindah domisili, dan menerima bantuan sejenis
10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,77	102,67	Penataan Desa	Persentase Manajemen Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Ketentuan	100%	100%	100	1. Untuk anggaran pembelian Laptop pemetaan batas wilayah dengan spesifikasi diusulkan, pada e purchasing ternyata lebih murah daripada pagu DPA skpd. namun realisasi kegiatan selesai 100%. 2. Untuk pagu makan minum sifatnya persediaan sehingga direalisasikan sesuai kebutuhan,namun kegiatan selesai 100%
						Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama	6,94%	6,94%	100	Kegiatan pelatihan untuk pengurus BUMDesa depending/dilaksanakan ditahun 2025 karena menyesuaikan dengan program prioritas nasional.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Administrasi Pemerintah Desa	1. Persentase Kesesuaian RKPDDes Terhadap RPJMDes	100%	100%	100	1. Untuk Sub kegiatan Manajemen Pemerintahan Desa kegiatan pelatihan aparaturnya desa pada akhir tahun 2024 tidak dilaksanakan karena berbarengan dengan program kegiatan pusat terkait LMS (Learning Manajemen System) yaitu proses pembelajaran aparaturnya desa secara daring, namun pelatihan tetap dilaksanakan melalui program kegiatan pusat (Efisiensi anggaran). 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa untuk honorarium Narasumber/instruktur/pengajar/pelatih spesialisasi dari kabupaten berhalangan hadir, realisasi kegiatan 100%. 3. Pada sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan pada honorarium kegiatan peningkatan kapasitas aparaturnya desa dalam rangka penyusunan laporan kepala desa tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan tenaga.
						Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Laba BUMDes	15.56%	16,47%	105.85	1. Masih tersisanya anggaran makan minum pada sub kegiatan Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat karena ada sharing cost pembiayaan dari pihak ketiga/AMAN, sehingga direalisasikan sesuai kebutuhan (efisiensi anggaran) 2. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK pada perjalanan dinas dalam daerah anggaran bersifat persediaan sehingga direalisasikan sesuai kebutuhan
						Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda	5 WMP	8 WPM	160	Ada kegiatan di kepemudaan yang tidak dapat terlaksana salah satunya yaitu pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) karena RAD seharusnya dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD periode 2018 - 2023 serta sejalan dengan Rencana Aksi Nasional dalam penyusunan RPJMN periode 2020 - 2024. Sehingga jika kegiatan ini dilaksanakan maka tidak akan efektif, mengingat saat ini Pimpinan Daerah masih dijabat oleh Penjabat Bupati sementara sampai dengan adanya Bupati terpilih. Berdasarkan saran dari Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rencana Aksi Daerah (RAD) sebaiknya dilaksanakan pada periode awal RPJMD tahun 2025 - 2030 Bupati terpilih dan kegiatan Sarjana Pemuda Penggerak Pembangunan (SP3) dikarenakan Dispora Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan kegiatan tersebut sehingga dari Kabupaten juga tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepramukaan	10.78%	20.30%	188	Pemuda yang aktif dalam organisasi kepramukaan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024, hal ini menunjukkan partisipasi yang luar biasa, Capaian ini mencerminkan antusiasme tinggi dari pemuda dalam mengikuti kegiatan kepramukaan, yang berperan penting dalam pengembangan karakter, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda.
TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter											
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan. Kesehatan. Komoditas Pangan Dan Non Pangan											
11	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,26	71,21	101,35	Program Pengelola Pendidikan	Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan (usia >24 tahun)	100%	100%	100	Pada jenjang SD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, angka putus sekolah berhasil ditekan menjadi 0,25% sesuai target. Angka melanjutkan sekolah mencapai 99,90% meski masih ada tiga siswa yang tidak melanjutkan. Namun, capaian literasi dan numerasi berdasarkan asesmen nasional masih di bawah target, masing-masing 65,92% dan 54,64%. Meski
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,6	12,48	99,05						

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	8,09	103,45						<p>demikian, persentase siswa yang mencapai nilai minimum dalam literasi dan numerasi melebihi target, menunjukkan peningkatan kemampuan. Capaian sertifikasi guru masih rendah (62,66% dari target 96%), namun kualifikasi DIV/S1 guru hampir memenuhi target. Rasio guru-murid sangat baik, dan sebagian besar sekolah telah menerapkan sistem administrasi dan manajemen sekolah sesuai standar.</p> <p>Untuk jenjang SMP, angka putus sekolah masih tinggi di angka 0,68%, jauh dari target 0,15%. Angka melanjutkan sekolah 97,24% dan capaian asesmen literasi dan numerasi mendekati target. Peningkatan signifikan terlihat pada persentase siswa yang mencapai nilai minimum asesmen. Kualifikasi guru SMP cukup tinggi (97,71%), namun tingkat sertifikasi dan kompetensi guru masih rendah. Seluruh sekolah SMP telah menerapkan sistem administrasi dan manajemen sesuai standar.</p> <p>Pada jenjang PAUD, angka melanjutkan ke PAUD formal mencapai 100%. Capaian sertifikasi guru PAUD melebihi target, dan kualifikasi DIV/S1 mendekati target. Rasio guru-murid cukup baik, dan seluruh PAUD telah melaksanakan program PAUD Holistik Integratif. Capaian administrasi dan manajemen sekolah sesuai standar juga sangat baik. Secara keseluruhan, sebagian besar lembaga pendidikan dasar, menengah, dan nonformal di Hulu Sungai Selatan telah terakreditasi sesuai standar, dengan capaian pendidikan kesetaraan usia &gt;24 tahun juga mencapai 100%.</p>
14	Umur Harapan Hidup	Tahun	66.72	72.82	109,14	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (85)	A (88,76)	104,42	Hal ini sesuai dengan konsep efisiensi anggaran pada organisasi perangkat daerah yang bersifat BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) , mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Adanya keterbatasan anggaran BLUD membatasi anggaran yang ada hanya untuk kegiatan prioritas dan tepat sasaran. Penghematan anggaran dilakukan dengan menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan.



N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan	100	100	100	dari sasaran 16.503 remaja putri terdapat 16.451 remaja putri yang dilakukan skrinning, berbagai upaya untuk mempertahankan capaian di tahun berikutnya yakni pada saat pelaksanaan skrining akan dilakukan tim ( 2 orang tenaga kesehatan) dan pelatihan untuk menskrining kesehatan pada remaja putri masih terdapat 8,9% balita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar karena belum mendapatkan imunisasi dasar lanjutan, sehingga upaya yang dilakukan dengan Memastikan pelayanan posyandu aktif setiap bulan untuk melakukan pelayanan ( penimbangan, Imunisasi dasar dan lanjutan pada balita ), Memberikan pembinaan dan pelatihan pada penanggung jawab program ( SDIDTK/ MTBS),
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular	100	99,64	99,64	Realisasi ini mencerminkan komitmen dan efektivitas layanan kesehatan dalam menjangkau masyarakat secara luas, baik dalam pencegahan maupun penanganan penyakit menular dan tidak menular. Capaian 99,64% menunjukkan bahwa akses dan kualitas pelayanan kesehatan sudah merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya tambahan untuk menjangkau sisanya guna memastikan layanan kesehatan yang benar-benar inklusif dan menyeluruh.
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular	100	99,64	99,64	Realisasi ini mencerminkan komitmen dan efektivitas layanan kesehatan dalam menjangkau masyarakat secara luas, baik dalam pencegahan maupun penanganan penyakit menular dan tidak menular. Capaian 99,64% menunjukkan bahwa akses dan kualitas pelayanan kesehatan sudah merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya tambahan untuk menjangkau sisanya guna memastikan layanan kesehatan yang benar-benar inklusif dan menyeluruh.
						Program Pengendalian Penduduk	Persentase pengendalian penduduk dan pendampingan keluarga yang di bina	20	20	100	Persentase pengendalian penduduk dan pendampingan keluarga yang dibina mencapai target 20% dengan realisasi yang juga sebesar 20% pada tahun 2024, menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pencapaian program. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam melaksanakan program dengan baik, serta upaya yang efektif dalam memberikan dukungan kepada keluarga dalam pengelolaan jumlah penduduk secara berkelanjutan.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pelayanan PUS berKB sesuai standar	100%	100%	100	Persentase pelayanan PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB yang sesuai standar mencapai 100% menunjukkan keberhasilan penuh dalam memberikan layanan yang berkualitas dan tepat sasaran. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam memastikan setiap pasangan mendapatkan akses pelayanan KB yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, mendukung program pengendalian jumlah penduduk yang berkelanjutan. Sisa anggaran yg tdk terserap : Pelayanan KB pria :MOP krn realisasi hanya 1 aseptor, hadiah utk KB lestari 30 th dan 10 th tdk ada pasangan serta sisa dari proses kontrak/efisiensi belanja
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna	81%	81%	100	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna mencapai target yang ditentukan menunjukkan keberhasilan penuh dalam memperkuat ketahanan keluarga di seluruh wilayah. Capaian ini mencerminkan efektivitas program dalam memberikan pendampingan, pendidikan, dan dukungan kepada keluarga agar lebih mandiri, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.
						Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak	100%	100%	100	Pencapaian ini mencerminkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, meskipun tantangan dalam memastikan konsistensi serta kualitas data tetap ada. Keberlanjutan pemantauan dan penguatan kapasitas perangkat daerah menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D)	8,33%	7,43%	89,2	Program "Persentase Desa Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D)" dengan target 8,33% dan realisasi 7,43% menunjukkan bahwa meskipun terdapat pencapaian yang signifikan, ada sedikit selisih antara target dan realisasi. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi program di beberapa desa yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, aksesibilitas, atau kesadaran masyarakat. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, pencapaian sebesar 7,43% tetap menunjukkan kemajuan dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga di tingkat desa. Ke depannya, penting untuk melakukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan merancang strategi yang lebih efektif agar target dapat tercapai secara optimal.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak	8,78%	8,78%	100	biaya cetak (spanduk) yg tak habis terserap dan sisa perjadiin, serta belanja kegiatan yang tidak bisa terealisasi krn di perlukan koordinasi, pembentukan tim terlebih dahulu
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Tidak semua kasus yang masuk ke PPA mendapatkan layanan visum krn itu dananya bersifatnya tersedia
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Tidak semua kasus yang masuk ke PPA mendapatkan layanan visum krn itu dananya bersifatnya tersedia
15	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/ Orang/ tahun	13.413	14.150	105	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	12%	14,48%	120,67	Program "Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat" dengan target 12% dan realisasi 14,48% menunjukkan pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam memperkuat ketahanan pangan di masyarakat, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan produksi, distribusi, atau keberhasilan program pendukung seperti pelatihan pertanian dan distribusi bantuan pangan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil telah efektif dalam meningkatkan cadangan pangan, namun tetap penting untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan distribusi pangan di seluruh wilayah. Ke depannya, pemantauan berkelanjutan dan evaluasi akan penting untuk menjaga kestabilan dan kualitas cadangan pangan di masa yang akan datang.
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Persentase rumah tangga stunting yang mengkonsumsi pangan B2SA	60%	60%	100	Program "Persentase Rumah Tangga Stunting yang Mengonsumsi Pangan B2SA" dengan realisasi 100% menunjukkan keberhasilan penuh dalam memastikan bahwa seluruh rumah tangga yang mengalami stunting telah mengonsumsi pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pencapaian ini mencerminkan efektivitas program dalam meningkatkan pola konsumsi pangan yang sehat dan bergizi di kalangan rumah tangga yang rentan terhadap stunting. Realisasi 100% ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam distribusi pangan B2SA dan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Ke depannya, penting untuk memastikan keberlanjutan program ini agar dapat mengatasi masalah stunting secara lebih komprehensif.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	38,95	83,34	213,97	Program Pembinaan Perpustakaan	jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan perpustakaan	27000	27000	100	semua kegiatan sudah dilaksanakan 100 % akan tetapi masih adanya sisa anggaran itu disebabkan oleh efisiensi anggaran
						Program Pengelolaan Arsip	Persentase Capaian Perangkat Daerah dengan nilai Pengawasan Kearsipan	50%	64.1	128.2	semua kegiatan sudah dilaksanakan 100 % akan tetapi masih adanya sisa anggaran itu disebabkan oleh adanya honor narasumber untuk pusat yang tidak bisa direalisasikan dikarenakan oleh tidak terlaksananya BImtek Ke ANRI disebabkan oleh anggaran perjalanan Dinas yang sudah tidak mencukupi untuk kegiatan tersebut.
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang dipindahkan dan dimusnahkan	1000	1405	140.5	semua kegiatan sudah dilaksanakan 100 % akan tetapi masih adanya sisa anggaran itu disebabkan oleh efisiensi anggaran
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat Yang Berkarakter Dan Berbudaya											
17	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Indeks	0,7	1	142,857142 9	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Patroli Rutin	360 Kali	360 Kali	100	Program "Jumlah Patroli Rutin" dengan realisasi 100% menunjukkan keberhasilan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawasan wilayah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen aparat keamanan atau penegak ketertiban dalam menjaga situasi wilayah tetap aman, kondusif, dan tertib. Dengan terlaksananya seluruh patroli rutin secara optimal, diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara dalam menjaga ketertiban umum.
						Program pencegahan. penanggulangan. Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP	100%	100%	100	Program "Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditanggulangi Sesuai SOP" dengan realisasi 100% menunjukkan pencapaian optimal dalam penanganan insiden kebakaran. Seluruh kejadian berhasil ditanggulangi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mencerminkan kesiapsiagaan, kecepatan respons, serta profesionalisme petugas dalam menangani situasi darurat. Capaian ini menandakan sistem penanggulangan kebakaran berjalan dengan efektif, serta menunjukkan bahwa koordinasi, peralatan, dan pelatihan yang ada telah memadai untuk menghadapi insiden secara tepat dan efisien. Keberhasilan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kedaruratan pemerintah daerah.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah siswa yang tingkat pemahamannya diatas 70 (nilai post test)	70	70	100	Program "Jumlah Siswa yang Tingkat Pemahamannya di Atas 70 (Nilai Post Test)" dengan capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh peserta didik yang mengikuti evaluasi berhasil mencapai tingkat pemahaman yang baik sesuai indikator yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan metode pembelajaran, efektivitas materi ajar, serta kualitas pengajaran yang mampu meningkatkan pemahaman siswa secara merata. Dengan seluruh siswa mencapai nilai di atas 70, program ini menandakan proses pembelajaran berlangsung optimal dan mampu mentransfer pengetahuan secara efektif. Ke depannya, penting untuk mempertahankan kualitas ini serta terus mendorong peningkatan inovasi dalam strategi pembelajaran.
						Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	Persentase hasil koordinasi FKUB dalam Penyelenggaraan kegiatan SARA yang di tindak lanjuti	70%	70%	100	Program "Persentase Hasil Koordinasi FKUB dalam Penyelenggaraan Kegiatan SARA yang Ditindaklanjuti" dengan realisasi 100% menunjukkan bahwa seluruh hasil koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terkait kegiatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan telah ditindaklanjuti secara optimal. Capaian ini mencerminkan efektivitas peran FKUB dalam menjaga kerukunan, mencegah potensi konflik, dan memperkuat toleransi antarumat beragama. Dengan realisasi 100%, dapat disimpulkan bahwa mekanisme koordinasi dan respons pemerintah daerah terhadap isu-isu sensitif SARA telah berjalan sangat baik, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan keharmonisan di masyarakat.
						Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah FKDM yang Kompeten	11 Kecamat an	11 Kecamatan	100	Program "Jumlah FKDM yang Kompeten" dengan capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pembinaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas FKDM sebagai garda terdepan dalam deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan realisasi 100%, program ini memastikan bahwa FKDM mampu menjalankan peran strategisnya secara efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal. Banyak Kegiatan Rapat-rapat yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan SDM dan terbatasnya waktu,tapi seluruh kecamatan dalam keadaan kondusif dan baik.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	350	392	112	Program "Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)" dengan target 350 dan realisasi 392 menunjukkan pencapaian yang melampaui ekspektasi. Nilai ini mencerminkan bahwa tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah telah berada pada tingkat kematangan yang tinggi, baik dari segi kebijakan, prosedur, hingga implementasi teknis. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan data dan sistem informasi dari ancaman keamanan siber, serta kesiapan dalam menghadapi risiko digital. Dengan nilai yang melebihi target, program ini menjadi indikator positif atas kesadaran dan keseriusan dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi di era digital.
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56.75	N/A		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Atraksi Spiritual Yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal	45,45%	45,45%	100%	Persentase Atraksi Spiritual Yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal tercapai 45,45% dari target 45,45% dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori sangat baik
						Program Pembinaan Sejarah	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar	81,25%	81,25%	100%	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar tercapai 81,25% dari target 81,25% dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori sangat baik
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar	81,25%	81,25%	100%	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar tercapai 81,25% dari target 81,25% dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori sangat baik
						Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar	81,25%	81,25%	100%	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar tercapai 81,25% dari target 81,25% dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori sangat baik

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4 / K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9 / K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Event Olahraga Pelajar	5 Event	5	100	<p>1. Progres pemasangan lampu stadion yang belum terealisasi dikarenakan termin waktu yang diperlukan begitu singkat, sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.</p> <p>2. Pengesahan perubahan anggaran yang dilaksanakan dipertengahan bulan oktober, dengan waktu yg tersisa kurang lebih 2 (dua) bulan , untuk progres pemasangan lampu stadion tidak bisa dilaksanakan mengingat waktu yang diperlukan dalam proyek tersebut sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Ada kegiatan SDI (Sport Development Index) yang tidak dilaksanakan karena beberapa alasan. Pertama, hasil pengukuran SDI tahun 2023 menunjukkan bahwa skor SDI Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sebesar 0,327. Ini berarti bahwa kondisi pembangunan olahraga di Indonesia masih memprihatinkan <sup>1</sup>.</p> <p>Kedua, angka partisipasi masyarakat berolahraga juga mengalami penurunan, yaitu dari 28,4% di tahun 2022 menjadi 25,4% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga <sup>1</sup>.</p> <p>Ketiga, kegiatan SDI memerlukan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk dapat dilaksanakan dengan efektif. Namun, proses pengumpulan data dan informasi ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar <sup>2</sup>.</p> <p>Dengan demikian, kegiatan SDI tidak bisa dilaksanakan di tahun ini karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi pembangunan olahraga di Indonesia, serta memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan adalah akurat dan terkini.</p>
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	100%	Selain anggaran untuk pemeliharaan taman makam pahlawan, program ini juga beisikan anggaran bantuan sosial tli asih kepada veteran atau janda veteran. Realiasi tidak mencapai 100% dikarenakan adanya bantuan sosial yang tidak tersalurkan dikarenakan calon penerima meninggal dunia.
TUJUAN 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik											

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa											
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,2	98,08	111,2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90.84	100,90%	Ada 9 unsur pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu : Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian/ Kewajaran Biaya, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan. untuk triwulan IV Unsur paling rendah adalah Unsur Kecepatan Pelayanan dengan Nilai yaitu 3,47 dan Nilai Unsur paling tinggi adalah Unsur Penanganan Pengaduan dengan nilai 3,96
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga	100%	98,71%	98,71%	Program "Persentase Kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga" dengan target 100% dan realisasi 98,71% menunjukkan pencapaian yang sangat mendekati target, meskipun ada sedikit selisih. Realisasi 98,71% mencerminkan upaya yang hampir sepenuhnya berhasil dalam memastikan seluruh penduduk memiliki KTP-el dan Kartu Keluarga, yang merupakan elemen penting dalam identifikasi administratif dan akses terhadap layanan publik. Meskipun tidak mencapai angka 100%, pencapaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan untuk mencapai target 100%
						Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	100%	98,77%	98,77%	Program "Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian" dengan target 100% dan realisasi 98,77% menunjukkan pencapaian yang sangat baik meskipun ada sedikit selisih dengan target yang ditetapkan. Realisasi 98,77% mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki dokumen sipil yang penting ini, yang mendukung administrasi kependudukan dan hak-hak hukum individu. Meskipun belum mencapai 100%, pencapaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap pembuatan dokumen sipil. Untuk mencapai target 100%, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan, seperti keterbatasan layanan di daerah terpencil atau kurangnya informasi tentang pentingnya dokumen tersebut.



N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase akurasi data kependudukan	100%	99%	99%	meskipun ada sedikit selisih dengan target yang ditetapkan. Realisasi 99% mencerminkan tingkat akurasi data yang hampir sempurna, yang menunjukkan keberhasilan dalam pengumpulan, pemutakhiran, dan verifikasi data kependudukan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data kependudukan sudah berjalan dengan efektif, namun untuk mencapai 100% akurasi, masih diperlukan upaya tambahan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan atau ketidaksesuaian data, serta memperkuat sistem pelaporan dan validasi yang ada.
20	SAKIP	%	A	AA	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	100%	100%	100	Pencapaian ini mencerminkan efektivitas dalam penyusunan organisasi yang efisien, serta kesesuaian fungsi dengan kebutuhan tugas pemerintah daerah. Dengan realisasi 100%, program ini memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal, mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien.
						Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai standar	100%	100%	100	Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan dan ketidaksesuaian. Dengan realisasi 100%, program ini tidak hanya memastikan pengelolaan yang tepat sesuai regulasi, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan tersedianya anggaran dana yang bersifat disediakan (BTT)
						Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Skor level kapabilitas APIP	3,050	3,030	99,34%	Program "Skor Level Kapabilitas APIP" dengan target 3,050 dan realisasi 3,030 menunjukkan pencapaian yang sangat baik, meskipun ada sedikit selisih dengan target yang ditetapkan. Realisasi 3,030 mencerminkan bahwa sebagian besar capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah mendekati standar yang diinginkan, yang menandakan bahwa APIP telah menunjukkan kemampuan yang solid dalam melakukan pengawasan dan evaluasi di tingkat pemerintahan. Meskipun sedikit di bawah target, pencapaian ini tetap menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan internal pemerintahan. Upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas APIP akan membantu mencapai atau bahkan melampaui target di masa depan.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai standar	100%	100%	100	1. tidak terlaksananya lelang umum karena keterbatasan waktu 2. Tersedianya anggaran dana yang bersifat disediakan untuk penanganan sengketa Tanah BMD, yang hanya dapat direalisasikan apabila terdapat sengketa tanah bmd dengan masyarakat 3. kesalahan dalam uraian penganggaran kegiatan honor tim 4. Terdapat penghematan atas realisasi kegiatan"
						Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel	100%	100%	100	Pencapaian ini mencerminkan bahwa semua proses penerimaan, pengelolaan, dan pelaporan pendapatan daerah dilakukan secara jelas, terdokumentasi dengan baik, dan diawasi dengan ketat. Dengan realisasi 100%, program ini memastikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Adanya jadwal yg direncanakan bentrok/bersamaan dengan penyusunan/pembuatan Ranperbup PDRD
21	Indeks Reformasi Birokrasi	%	BB	AA (91.25)	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	97	98,21	101,24	Realisasi 98,21% mencerminkan keberhasilan dalam mencapai hampir seluruh sasaran pembangunan daerah, yang menunjukkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Pencapaian ini tidak hanya menggambarkan kinerja yang optimal, tetapi juga mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah. Meskipun sudah melampaui target, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar sasaran pembangunan yang lebih ambisius dapat tercapai dengan lebih baik di masa depan.

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Temuan Material Eksternal pada Pemerintah Daerah	<5%	0,031%	100	Program "Persentase Temuan Material Eksternal pada Pemerintah Daerah" dengan realisasi 0,031% dan target <5% menunjukkan pencapaian yang sangat baik, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Realisasi 0,031% ini mencerminkan bahwa temuan material eksternal yang signifikan sangat minim, yang menunjukkan pengelolaan yang baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang dapat berdampak besar pada integritas dan kepercayaan publik. Dengan angka yang sangat rendah ini, program ini memperlihatkan upaya yang sukses dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan serta administrasi di tingkat daerah.
22	Indeks Sistem Merit ASN	Angka	275	267,5	97,27	Kepegawaian Daerah	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB	90	99,49	110.54	Pada tahun 2024 tidak dilaksanakan mutasi, rotasi dan promosi pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana disebabkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sementara dijabat oleh Pejabat Bupati yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindah, memberhentikan ASN kecuali dengan pertimbangan teknis BKN (Deputi Pengawasan dan Pengendalian) dan surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri
						Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	75%	40,64%	54,18	Tidak ada kouta yang diberikan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait pengiriman pejabat ess. II, III dan IV untuk Pelatihan Kepemimpinan di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu Koordinasi dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan agar untuk tahun 2025 menjadi prioritas, karena masih banyak pejabat di Kab. HSS yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan
23	Indeks Inovasi Daerah	%	70,07	73,15	104,4	Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	Keselarasan RKPD terhadap RPJMD/RPD berhasil dikarenakan dalam penyusunan perencanaan sudah mengacu pada pohon kinerja yang ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam RPJMD sehingga pada saat pembuatan RKPD dapat dipastikan akan selaras dengan RPJMD

N O	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%) (K9/K8*100)	ANALISIS PROGRAM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sektoral	3	3	100%	adanya permasalahan pembangunan khususnya sektoral memerlukan perencanaan sektoral juga untuk mengatasinya, prioritas daerah jelas menetapkan sektor sektor yang menjadi perhatian khusus untuk dilakukan perencanaan agar pada pelaksanaan pembangunanya dapat berjalan dengan optimal sehingga mencapai target pembangunan daerah
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase riset dan inovasi yang sesuai dengan logic frame kinerja	100%	100%	100%	Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya pohon kinerja / logic frame yang baik sehingga riset atau inovasi di arahkan dapat berkontribusi pada pembanguann daerah jadi setiap riset atau inovasi tersebut sudah selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang sudah di tetapkan
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi	81%	90,33%	111.51	Seluruh kegiatan terealisasi sesuai target, sisa anggaran merupakan efisiensi belanja bahan cetak, pemeliharaan sapras sumber daya informasi dan cadangan kerjasama dengan televisi.
						Program Aplikasi Informatika	Persentase Data Penduduk yang Masuk pada Database	100%	100%	100	Seluruh kegiatan terlaksanakan sesuai target, sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan efisien dari belanja langganan internet, bahan cetak, makan minum dan honorarium penyelenggaraan kegiatan.
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Domain Proses Bisnis Statistik	2,2 Nilai	2,89 Nilai	131.36	Seluruh kegiatan terlaksanakan sesuai target, sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan efisien dari belanja bahan cetak dan biaya sewa gedung

Sumber Data : Data Diolah Tahun 2024

Berdasarkan capaian 109 program Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan sangat baik dan menunjukkan tren yang positif. Sebagian besar program mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelaksanaan yang optimal di berbagai sektor. Capaian-capaian pelayanan dasar, pengelolaan keuangan, keamanan informasi, hingga peningkatan kualitas SDM dan layanan publik menggambarkan kondisi pemerintahan yang tertib, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan tingkat keberhasilan program yang dominan tercapai, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikategorikan dalam keadaan baik, dan menunjukkan arah pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.3.4.3 Realisasi Anggaran Program Yang Mendukung Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan											
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	5,15	97,09	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.433.183.900	1.255.331.634	87,6	177.852.266	1,11
						Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	233.852.500	200.216.230	85,6	33.636.270	1,13
						Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	696.847.335	645.797.455	92,7	51.049.880	1,05
						Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	16.214.800	11.817.300	72,9	4.397.500	1,33
						Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.691.467.290	4.620.240.337	98,5	71.226.953	0,99
						Pengembangan Ekspor	1.866.691.600	1.792.908.874	96	73.782.726	1,01
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.000.000	34.964.612	94,5	2.035.388	1,03
						Program Promosi Penanaman Modal	135.300.000	87.609.972	64,8	47.690.028	1,50
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	447.247.650	402.066.625	89,9	45.181.025	1,08
						Program Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	292.275.280	255.883.976	87,5	36.391.304	1,11
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			87	543.243.340	1,12
2	PDRB Sektor Unggulan	%	6.4	5.10	79,68	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.000.802.480	1.657.194.013	82,8	343.608.467	0,96

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.074.210.370	4.337.508.100	85,5	736.702.270	0,93
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	337.619.800	306.393.500	90,8	31.226.300	0,88
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	883.465.900	827.034.720	93,6	56.431.180	0,85
						Program Perizinan Usaha Pertanian	97.802.750	89.805.200	91,8	7.997.550	0,87
						Program Penyuluhan Pertanian	438.128.900	424.186.500	96,8	13.942.400	0,82
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	661.420.250	486.955.000	73,6	174.465.250	1,08
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	895.614.530	860.977.825	96,1	34.636.705	0,83
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.119.418.000	862.587.400	77,1	256.830.600	1,03
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	79.017.500	78.928.050	99,9	89.450	0,80
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			88,8	1.655.930.172	0,90
3	Indeks Daya Saing Pariwisata	%	2	3	150	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.178.299.535	893.468.372	75,8	284.831.163	1,98
						Program Pemasaran Pariwisata	1.073.532.750	882.298.254	82,2	191.234.496	1,82
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	148.390.000	79.390.000	53,5	69.000.000	2,80
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			70,5	545.065.659	2,13
4	Indeks Kepuasan Layanan	%	85,2	75,95	89,14	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30.086.793.380	28.669.139.885	95,3	1.417.653.495	0,94

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Infrastruktur					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.044.474.401	20.940.024.494	99,5	104.449.907	0,90
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.464.146.869	16.011.512.805	97,3	452.634.064	0,92
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.155.507.000	3.098.841.241	98,2	56.665.759	0,91
						Program Penataan Bangunan Gedung	166.874.743.080	160.090.150.551	95,9	6.784.592.529	0,93
						Program Penyelenggaraan Jalan	116.884.844.037	113.892.931.614	97,4	2.991.912.423	0,92
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.365.378.800	800.063.656	58,6	565.315.144	1,52
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.619.755.500	815.798.026	50,4	803.957.474	1,77
						Program Pengembangan Perumahan	219.798.750	167.781.803	76,3	52.016.947	1,17
						Program Kawasan Pemukiman	1.727.661.000	1.626.551.976	94,1	101.109.024	0,95
						Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	15.163.940.000	14.089.840.975	92,9	1.074.099.025	0,96
						Program Peningkatan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum (PSU)	12.805.030.188	11.369.028.028	88,8	1.436.002.160	1,00
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	19.850.000	2.710.000	13,7	17.140.000	6,51
						Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	24.975.000	1.450.000	5,8	23.525.000	15,37
						Program Pengelolaan Tanah Kosong	34.079.000	23.294.700	68,4	10.784.300	1,30

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			75,5	15.891.857.251	1,18
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	71,49	67,39	94,26	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	371.371.650	360.886.100	97,2	10.485.550	0,97
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	840.361.600	637.639.870	75,9	202.721.730	1,24
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	378.432.000	370.712.467	98	7.719.533	0,96
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	596.892.250	475.750.000	79,7	121.142.250	1,18
						Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	708.744.700	521.724.900	73,6	187.019.800	1,28
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	77.507.000	24.790.000	32	52.717.000	2,95
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.975.000	3.725.000	7,5	46.250.000	12,57
						Program Pengelolaan Persampahan	13.517.328.220	11.271.292.846	83,4	2.246.035.374	1,13
6	Indeks Risiko Bencana	Skor	135	119,36	113,1	Program Penanggulangan Bencana	6.110.244.094	5.508.011.264	90,1	602.232.830	1,26
						Program Penanganan Bencana	647.335.000	605.841.400	93,6	41.493.600	1,21
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			91,9	643.726.430	1,23
SASARAN STRATEGIS 2 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan											
7	Persentase Penduduk Miskin	%	3,96	3,38	117,16	Program Pemberdayaan Sosial	6.033.920.950	5.648.776.256	93,6	385.144.694	1,25



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			93,6	385.144.694	1,25
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,1	2,11	99,53	Penempatan Tenaga Kerja	51.999.950	45.857.150	88,2	6.142.800	1,13
						Hubungan Industrial	71.951.350	69.161.350	96,1	2.790.000	1,04
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	360.546.938	357.811.508	99,2	2.735.430	1,00
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			94,5	11.668.230	1,05
9	Gini Rasio	Rasio	0,257	0,288	89,24	Program Rehabilitasi Sosial	8.634.888.163	7.226.104.150	83,7	1.408.784.013	1,07
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.938.158.350	16.190.920.350	90,3	1.747.238.000	0,99
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			87	3.156.022.013	1,03
10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,77	102,67	Penataan Desa	175.070.000	156.830.730	89,6	18.239.270	1,15
						Peningkatan Kerjasama Desa	37.750.000	27.187.500	72	10.562.500	1,43
						Administrasi Pemerintah Desa	281.291.850	202.812.150	72,1	78.479.700	1,42
						Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat	930.603.300	833.431.057	89,6	97.172.243	1,15
						Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	1.134.363.900	827.621.500	73	306.742.400	1,41
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	650.000.000	650.000.000	100	0	1,03
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			82,7	511.196.113	1,24
TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter											
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan. Kesehatan. Komoditas Pangan Dan Non Pangan											
11	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,26	71,21	101,35	Program Pengelola Pendidikan	88.377.747.325	86.311.141.147	97,7	2.066.606.178	1,04
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,6	12,48	99,05						
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	8,09	103,45						
					101,28	Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			97,7	97,7	1,04

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umur Harapan Hidup	Tahun	66.72	72.82 (69,65)	104,42	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	160.340.146.392	151.746.348.063	94,6	8.593.798.329	1,10
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.398.972.355	93.137.723.148	96,6	3.261.249.207	1,08
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.415.366.500	1.799.109.003	74,5	616.257.497	1,40
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	291.293.000	235.247.500	80,8	56.045.500	1,29
						Program Pengendalian Penduduk	102.890.100	100.041.700	97,2	2.848.400	1,07
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.841.423.050	4.808.357.863	99,3	33.065.187	1,05
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.443.368.750	2.395.277.829	98	48.090.921	1,07
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	13.052.000	11.200.000	85,8	1.852.000	1,22
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.337.759.600	1.095.743.800	81,9	242.015.800	1,27
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	163.754.100	153.542.600	93,8	10.211.500	1,11
						Program Perlindungan Perempuan	56.165.800	43.930.600	78,2	12.235.200	1,34
						Program Perlindungan Khusus Anak	433.184.200	409.176.742	94,5	24.007.458	1,10
						Rata-Rata Realisasi Program			89,6	12.901.676.999	1,17
15	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/ Orang/ tahun	13.413	14.150	105	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	209.750.000	208.335.698	99,3	1.414.302	1,06

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	921.980.617	662.563.143	71,9	259.417.474	1,46
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			85,6	260.831.776	1,23
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	38,95	83,34	213,97	Program Pembinaan Perpustakaan	278.373.000	274.291.239	98,5	4.081.761	2,17
						Program Pengelolaan Arsip	167.762.000	137.747.950	82,1	30.014.050	2,606211937
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1.837.500	1.587.500	86,4	250.000	2,47650463
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			89	34.345.811	2,404157303
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat Yang Berkarakter Dan Berbudaya											
17	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Indeks	0,7	1	142,857143	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	11.421.544.878	11.009.706.728	96,4	411.838.150	1,48
						Program pencegahan. penanggulangan. Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.605.515.000	1.581.214.608	98,5	24.300.392	1,45
						Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.306.758.888	1.963.414.954	85,1	343.343.934	1,68
						Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	548.323.800	485.129.730	88,5	63.194.070	1,61
						Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	507.820.000	361.320.026	71,2	146.499.974	2,01
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	103.336.000	99.211.871	96	4.124.129	1,49
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			89,3	993.300.649	1,60
18	Indeks Pembangunan	Indeks	56.75	N/A		Program Pengembangan Kebudayaan	5.695.633.400	5.369.857.862	94,3	325.775.538	N/A

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kebudayaan					Program Pembinaan Sejarah	218.990.000	218.430.000	99,7	560.000	N/A
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.426.786.800	1.416.930.672	99,3	9.856.128	N/A
						Program Pengelolaan Permuseuman	1.119.336.250	1.072.055.788	95,8	47.280.462	N/A
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.060.665.259	9.738.239.709	69,3	4.322.425.550	N/A
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	927.857.450	822.020.319	88,6	105.837.131	N/A
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			91,2	4.811.734.809	N/A
TUJUAN 3 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik											
SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa											
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,2	98,08	111,2	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.143.850.000	904.274.925	79,1	239.575.075	1,41
						Program Pendaftaran Penduduk	55.820.000	54.995.000	98,5	825.000	1,13
						Program Pencatatan Sipil	31.145.000	30.779.500	98,8	365.500	1,13
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	258.536.000	181.099.000	70	77.437.000	1,59
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			86,6	318.202.575	1,28
20	SAKIP	%	A	AA	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.729.095.384	6.949.061.642	89,9	780.033.742	1,11
						Pengelolaan Keuangan Daerah	269.433.738.205	229.192.521.957	85,1	40.241.216.248	1,18
						Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	9.422.192.800	4.579.004.924	48,6	4.843.187.876	2,06
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.735.950.800	1.304.831.078	47,7	1.431.119.722	2,10
						Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.903.662.750	1.567.407.471	82,3	336.255.279	1,22
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			70,72	47.631.812.867	1,41

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%) (K4/K3*100)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%) (K8/K7*100)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE EFISIENSI CAPAIAN (K5/K9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Indeks Reformasi Birokrasi	%	BB	AA (91.25)	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	793.787.000	520.454.646	65,6	273.332.354	1,52
						Penyelenggaraan Pengawasan	1.459.745.000	1.036.145.000	71	423.600.000	1,41
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			68,27	696.932.354	1,46
22	Indeks Sistem Merit ASN	Angka	275	267,5	97,27	Kepegawaian Daerah	4.470.744.585	3.343.315.862	74,78	1.127.428.723	1,30
						Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.942.017.060	1.728.284.529	58,74	1.213.732.531	1,66
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			66,76	2.341.161.254	1,46
23	Indeks Inovasi Daerah	%	70,07	73,15	104,4	Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.546.167.300	1.433.427.802	92,7	112.739.498	1,13
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	176.424.200	153.745.000	87,1	22.679.200	1,20
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	906.886.100	841.197.186	92,8	65.688.914	1,13
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.060.529.600	3.792.743.038	93,4	267.786.562	1,12
						Program Aplikasi Informatika	4.891.863.000	3.917.791.086	80,1	974.071.914	1,30
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.506.200	73.315.556	98,4	1.190.644	1,06
						Rata-Rata Realisasi Anggaran Program			90,8	1.444.156.732	1,15
						Total	1.183.701.571.388	1.083.982.864.245	91,6	99.718.707.143	

Sumber Data : Data Diolah Tahun 2024

Analisis terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp. 1.183.701.571.388, telah terealisasi Rp. 1.083.982.864.245 atau mencapai 91,6%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 99.718.707.143, serta efisiensi adalah perbandingan antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran;

angka <1 berarti penggunaan anggaran tidak efisien dan angka ≥ 1 berarti penggunaan anggaran efisien.

